



PT JAMKRIDA JABAR
**ANNUAL
REPORT**

2023

**Menguat Bersama dan Melangkah Lebih Jauh
melalui Penjaminan Kredit untuk UMKM yang
Berdaya Saing**

**Strengthening Together and Going Further
through Credit Guarantee for Competitive
MSMEs**



KATA PENGANTAR

PREFACE

Tentang Laporan Tahunan

About Annual Report

PT Jamkrida Jabar melalui kegiatan usaha penjaminan, turut serta mendukung perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin seperti PT Jamkrida Jabar akan meningkatkan akses permodalan/pembiayaan bagi UMKM. PT Jamkrida Jabar meyakini bahwa potensi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM ini sangat besar. Dengan dukungan yang tepat dari produk dan layanan penjaminan yang ditawarkan oleh PT Jamkrida Jabar, sektor UMKM khususnya di Jawa Barat diharapkan dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian daerah.

PT Jamkrida Jabar adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang penjaminan baik kredit maupun non kredit. PT Jamkrida Jabar telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Pasal 28 Ayat (1) bahwa Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan/atau laporan lain kepada OJK. Dan, sesuai Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 59 Ayat (1) bahwa Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT Jamkrida Jabar dalam setahun. Dalam Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar ini termuat informasi kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan atas Laporan Keuangan Perseroan. Selain itu juga termuat informasi-informasi lainnya yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan pernyataan data historis.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko serta ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia.

Demikian Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun Anggaran 2023 ini kami susun dan sampaikan. Semoga PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi BUMD Jabar Juara, dan membantu mewujudkan Jawa Barat

Juara Lahir Batin. **Menguat Bersama dan Melangkah Lebih Jauh melalui Penjaminan Kredit untuk UMKM yang Berdaya Saing.** *Aamiin.*

PT Jamkrida Jabar through its guaranteed business activities supports the development of the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector which continues to grow in line with regional and national economic growth. The existence of Guarantee Institutions such as PT Jamkrida Jabar will increase access to capital/financing for MSMEs. PT Jamkrida Jabar believes that the potential for economic growth for the community through the development of the MSME sector is enormous. With proper support from guaranteed products and services offered by PT Jamkrida Jabar, the MSME sector, especially in West Java, is expected to grow more rapidly and contribute more to the regional economy.

PT Jamkrida Jabar is a Business Entity Owned by the Government of West Java Province and is a non-bank financial institution engaged in guarantees, both credit and non-credit. PT Jamkrida Jabar has been registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK).

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantees Article 28 Paragraph (1) that Guarantee Institutions are required to submit monthly reports, annual financial reports that a public accountant has audited, and other reports to OJK. In addition, according to OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017 Concerning the Implementation of Guarantee Agency Business Article 59 Paragraph (1) that Guarantee Institutions are required to submit complete annual financial reports that have been audited by a public accountant to the OJK no later than 4 (four) months after the end of the financial year.

This Annual Report is a report on the progress and achievements achieved by PT Jamkrida Jabar in a year. The Annual Report of PT Jamkrida Jabar contains information on financial performance and results of business activities based on audit results by Hertanto, Grace, and Karunawan Public Accounting Firm on the Company's Financial Statements. In addition, it also contains other information that contains projections, plans, strategies, and objectives that are not statements of historical data.

Forward-looking statements contain risks and uncertainties regarding outcomes and events that may differ materially from what is expected and stated in the statements, including those caused by changes in Indonesia's economic, political, and social environment.

Thus, we have prepared and submitted the Annual Report of PT Jamkrida Jabar for Fiscal Year 2023. Hopefully, PT Jamkrida Jabar will become a trusted credit guarantee company that contributes to regional economic growth, becomes a Champion of West Java Regional Owned Enterprise, and helps to make West Java an Inner and Inner Champion. **Strengthening Together and Going Further through Credit Guarantee for Competitive MSMEs.** *Aamiin.*



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Daftar Isi

Table of Contents

1	KATA PENGANTAR PREFACE	52	Legalitas Usaha Business Legality
4	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS	54	Peraturan Perundang-undangan Lembaga Penjamin Guarantee Institution Regulation
8	IKHTISAR KINERJA 2023 2023 PERFORMANCE OVERVIEW	54	Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Tata Kelola Governance Implementation Regulation
9	Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Performance Highlights		
13	Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	55	Visi dan Misi Vision and Mission
16	Peristiwa dan Kinerja Penting Important Events and Performance	56	Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Values
22	Tingkat Kesehatan Keuangan Financial Soundness Level	57	Produk dan Layanan Products and Services
23	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	58	Informasi Modal dan Pemegang Saham Information About Capital and Shareholders
24	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	59	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioner Profile
32	Laporan Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory Report	61	Profil Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory Profile
38	Laporan Direksi Board of Directors Report	65	Profil Direksi Board of Director Profile
50	Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 Responsibility for The 2023 Annual Report	68	Data Demografi Sumber Daya Manusia Human Resources Demographic Data
50	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	69	Struktur Organisasi Organizational Structure
51	Sekilas Jamkrida Jabar About Jamkrida Jabar		

Daftar Isi
Table of Contents

71	KINERJA PERSEROAN	121	Dasar Penerapan GCG
	COMPANY PERFORMANCE		Base of GCG Implementation
72	Tinjauan Ekonomi	121	Struktur dan Mekanisme GCG
	Economic Review		GCG Structure and Mechanism
74	Tinjauan Prospek Masa Depan	123	Rapat Umum Pemegang Saham
	Future Business Prospects Review		General Meeting of Shareholders
77	Tinjauan Bisnis	124	Rapat Umum Pemegang Saham
	Business Review		Tahunan
			Annual General Meeting of
			Shareholders
80	Tinjauan Keuangan	125	Rapat Umum Pemegang Saham Luar
	Financial Review		Biasa
80	Laporan Posisi Keuangan		Extraordinary General Meeting of
	Statement of Financial Position		Shareholders
82	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan	128	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
	Komprehensif Lainnya		Jawab Direksi
	Statement of Profit and Loss and		Implementation of Duties and
	Other Comprehensive Income		Responsibilities of the Board of
			Directors
85	Tinjauan Operasional	129	Komposisi Direksi
	Operational Review		Composition of The Board of
85	Aspek Penjaminan		Directors
	Guarantee Aspect		
91	Aspek Manajemen Risiko	132	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
	Risk Management Aspect		Jawab Dewan Komisaris
94	Aspek Klaim dan Subrogasi		Implementation of Duties and
	Claim and Subrogation Aspect		Responsibilities of the Board of
97	Aspek Sumber Daya Manusia		Commissioners
	Human Resources Aspect		
102	Aspek Umum	134	Komposisi Dewan Komisaris
	General Aspect		Composition of The Board of
103	Aspek Sistem Manajemen Informasi		Commissioners
	Information Management System		
	Aspect		
106	Aspek Pengawasan	137	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
	Supervision Aspect		Jawab Dewan Pengawas Syariah
			Implementation of Duties and
108	Unit Usaha Syariah		Responsibilities of the Board of
	Sharia Business Units		Sharia Supervisory
119	TATA KELOLA PERUSAHAAN	138	Komposisi Dewan Pengawas Syariah
	CORPORATE GOVERNANCE		Composition of The Board of Sharia
			Supervisory
120	Komitmen Penerapan GCG	140	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
	GCG Implementation Commitment		Komite Perseroan Di Bawah Dewan
120	Tujuan Penerapan GCG		Komisaris
	Purpose of GCG Implementation		

Daftar Isi
Table of Contents

	Completeness and Implementation of Duties of Company Committees Under the Board of Commissioners		Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners which achieve 5% (five per hundred) or more, which covers Type and Number of Share Share
156	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi Completeness and Implementation of Duties of Company Committees Under the Board of Directors	183	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota lain, dan/atau Pemegang Saham PT Jamkrida Jabar Disclosure of Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of The BSS with Other Members of The Board of Directors, Other Members of the Board of Commissioners, Other BSS Members, and/or Shareholders of PT Jamkrida Jabar
160	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal Implementation of Compliance, Internal Auditors, and External Auditors		
171	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi Implementation of Risk Management, Internal Control Systems, and Information Technology Governance	186	Pengungkapan Hal Penting Lainnya Other Important Disclosures
173	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Karyawan Implementation of Remuneration Policy and Other Facilities for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Employees	190 LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT	
177	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions	197 LAPORAN AUDIT AUDIT REPORT	
177	Rencana Strategis Perusahaan Corporate Strategic Plan	200	Surat Pernyataan Direksi Directors' Statement Letter
182	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham	202	Laporan Auditor Independen Independent Auditor's Report
		205	Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2022-2023 Consolidated Financial Statements 2022-2023

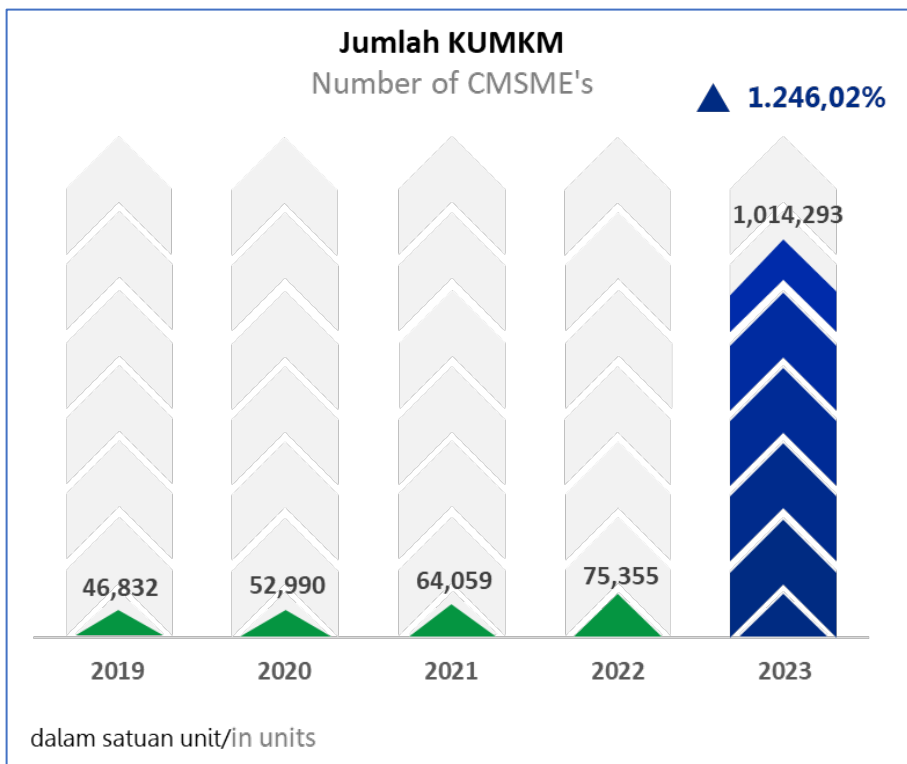
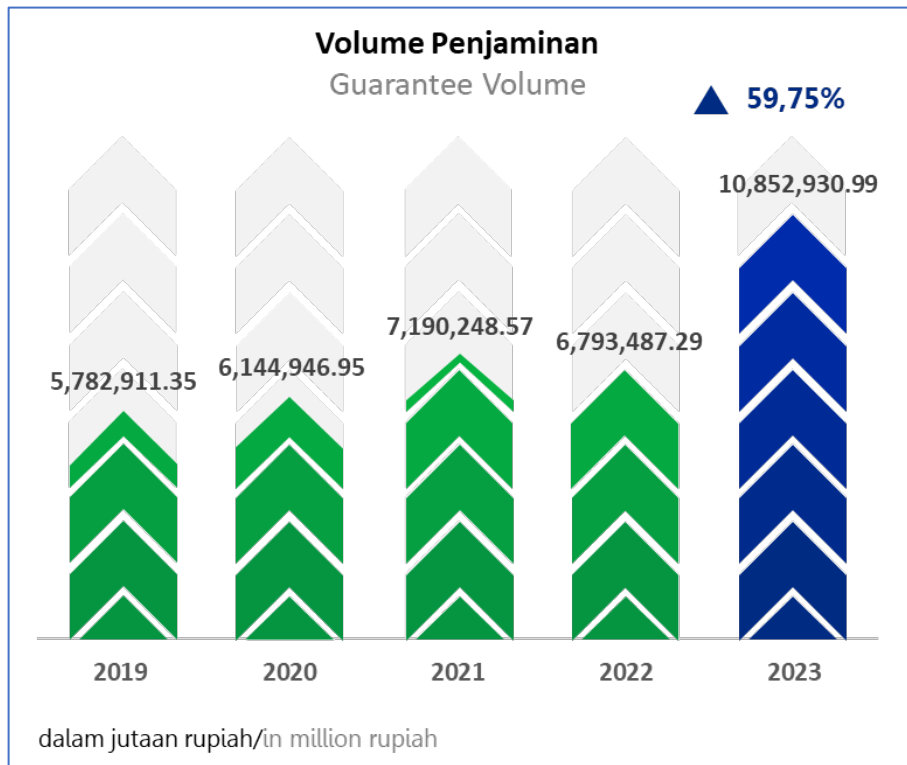


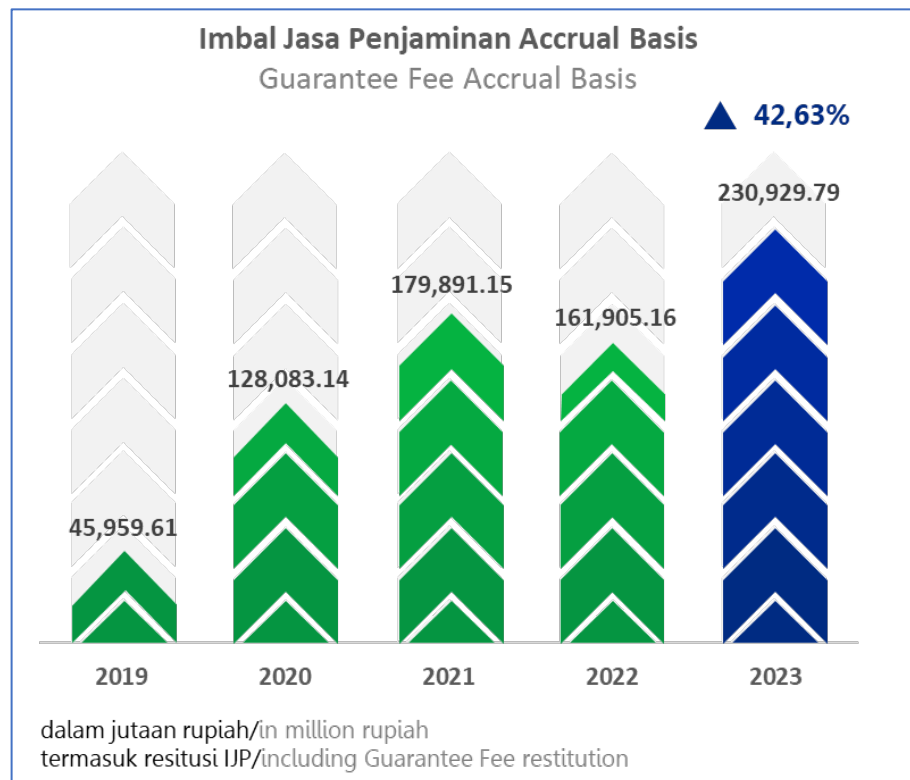
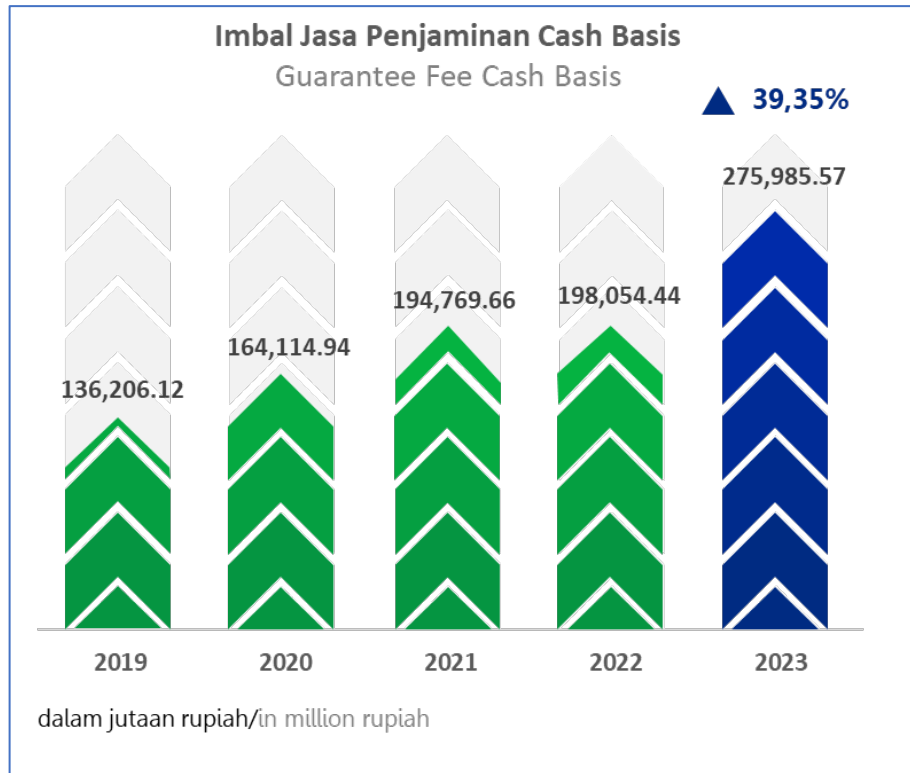
IKHTISAR KINERJA 2023

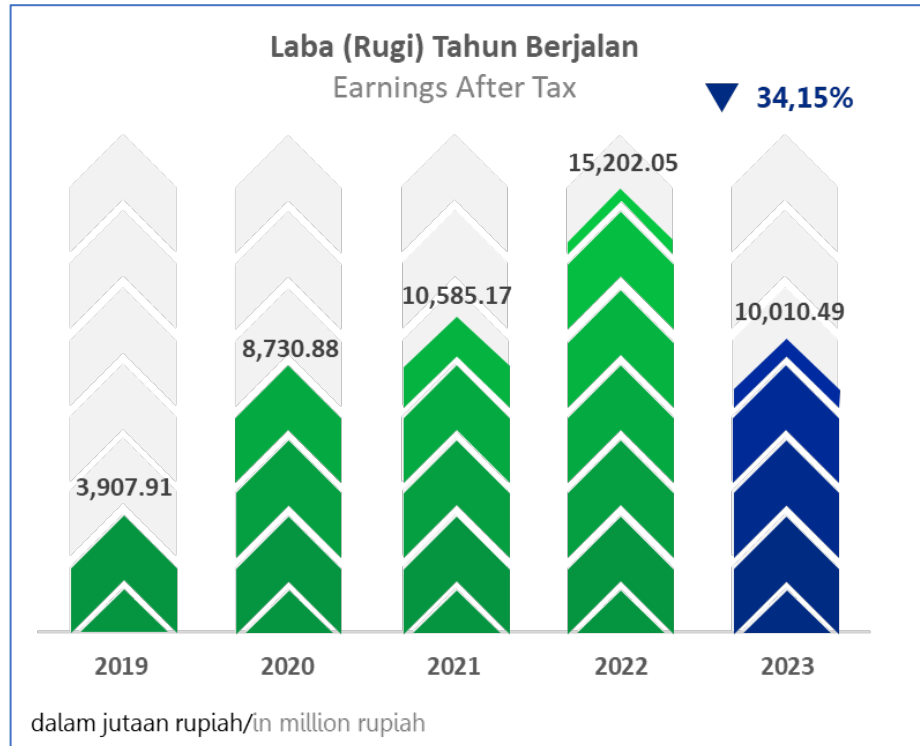
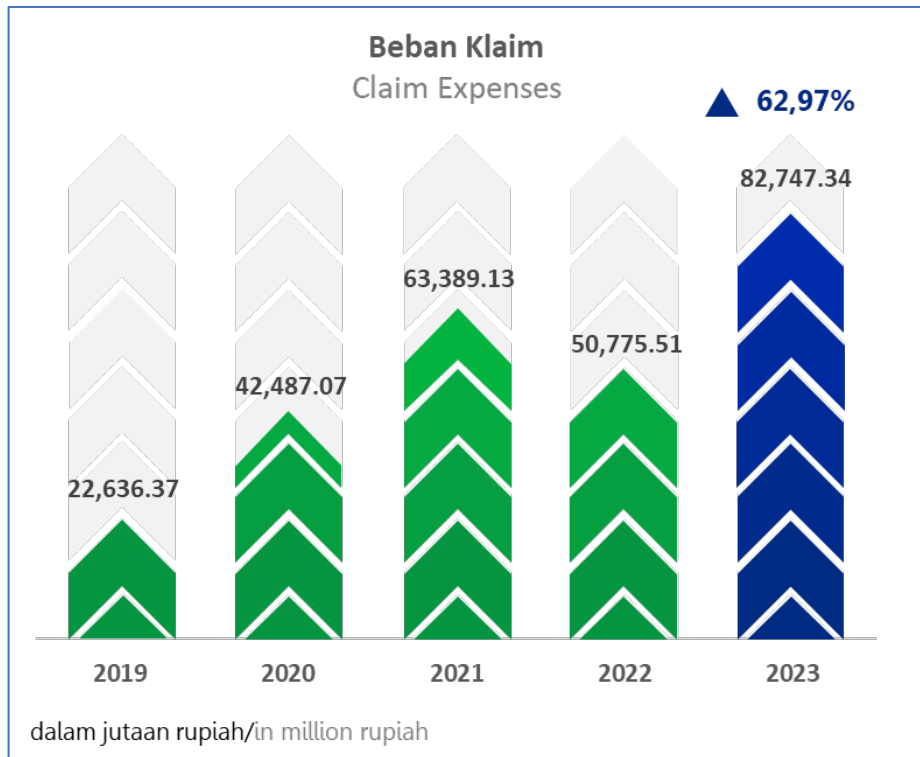
2023 PERFORMANCE OVERVIEW

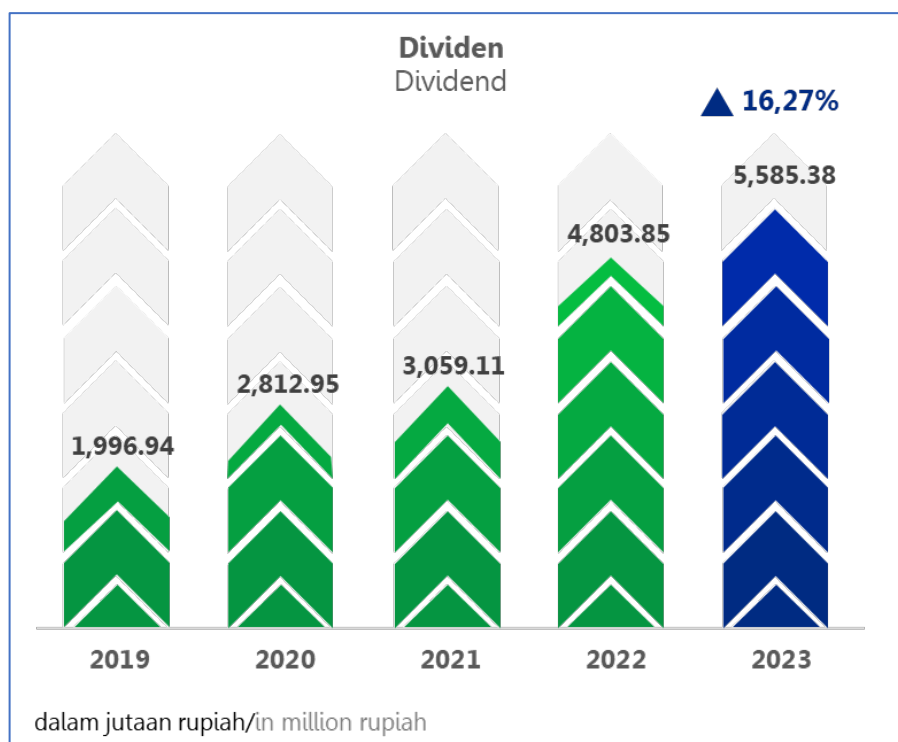
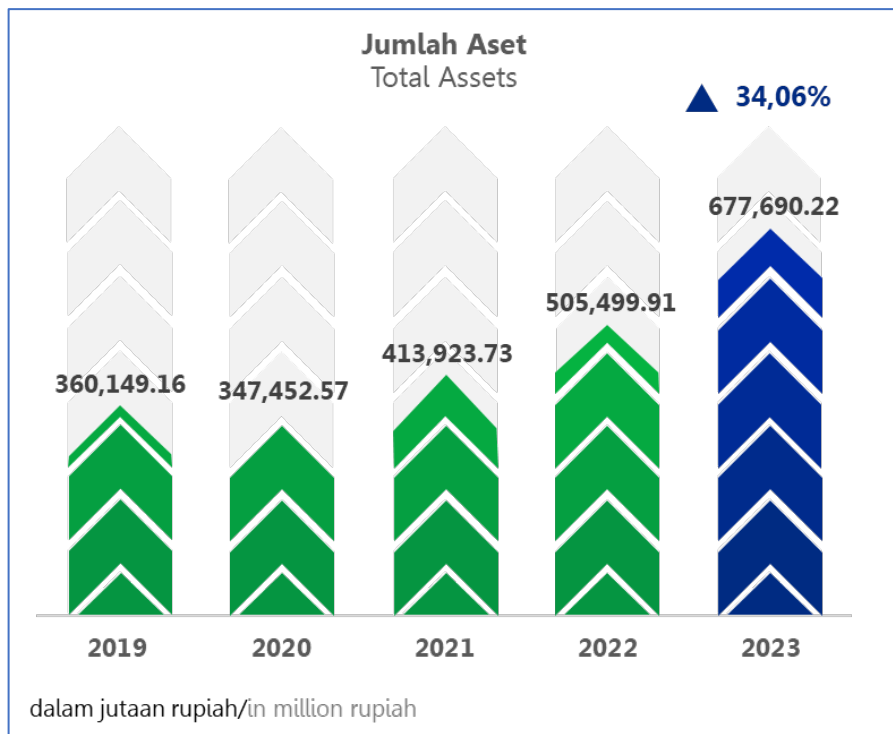
IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

Operational Performance Highlights









IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2023
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
ASET ASSETS					
Kas dan Setara Kas - Bersih Cash and Cash Equivalents - Net	190,394.06	260,506.45	227,676.25	87.40%	19.58%
Surat Berharga - Bersih Marketable Securities - Net	104,734.34	147,183.41	148,439.70	100.85%	41.73%
Piutang Re/Cogaransi - Bersih Re/Co-Guarantee Receivables - Net	78,262.85	43,498.35	126,808.58	291.53%	62.03%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bersih Accrued Income - Net	9,810.97	9,655.19	21,931.44	227.15%	123.54%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	99,655.24	92,748.65	130,036.21	140.20%	30.49%
Properti Investasi Investment Property	2,495.10	2,495.10	2,626.97	105.29%	5.29%
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	13,361.22	12,174.55	12,694.10	104.27%	-4.99%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	5,840.94	7,564.44	4,607.48	60.91%	-21.12%
Aset Lain-Lain Other Assets	945.18	1,413.95	1,441.80	101.97%	52.54%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	505,499.91	577,240.09	676,262.53	117.15%	33.78%
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
Utang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Payable	38,197.83	28,854.94	96,310.58	333.78%	152.14%
Penampungan Sementara Temporary Shelter	17,652.89	11,266.08	24,573.60	218.12%	39.20%
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	165,570.10	153,361.96	206,139.17	134.41%	24.50%
Cadangan Klaim Claim Reserve	15,062.09	20,968.35	19,265.17	91.88%	27.91%
Liabilitas Lain-Lain Other Liabilities	7,419.25	6,719.84	9,747.98	145.06%	31.39%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	243,902.15	221,171.18	356,036.51	160.98%	45.98%
EKUITAS EQUITY					
Modal Capital Stock	203,200.00	300,000.00	260,280.00	86.76%	28.09%
Cadangan Umum General Reserve	44,817.71	48,545.95	50,195.71	103.40%	12.00%
Saldo Laba Retained Earnings	15,202.05	8,189.58	10,010.49	122.23%	-34.15%
Ekuitas Lain-Lain Other Equity	(1,622.00)	(666.61)	(260.18)	39.03%	-83.96%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	261,597.76	356,068.92	320,226.02	89.93%	22.41%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	505,499.91	577,240.09	676,262.53	117.15%	33.78%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

Ikhtisar Kinerja 2023
2023 Performance Overview

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
PENDAPATAN PENJAMINAN GUARANTEE INCOME					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah Guarantee Fee	166,944.97	213,351.91	236,550.79	110.87%	41.69%
Beban Akuisisi Acquisition Expenses	(24,228.09)	(32,057.93)	(35,601.46)	111.05%	46.94%
Restitusi IJP Restitution of Guarantee Fee	(5,039.82)	-	(5,621.01)	0.00%	11.53%
Manajemen Fee Management Fee	19,458.76	13,004.23	27,629.98	212.47%	41.99%
Beban Regaransi Re-Guarantee Expenses	(73,770.80)	(84,867.84)	(108,944.08)	128.37%	47.68%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN TOTAL GUARANTEE INCOME	83,365.03	109,430.38	114,014.22	104.19%	36.77%
KLAIM CLAIM					
Beban Klaim Claim Expenses	(50,775.51)	(76,016.65)	(82,747.34)	108.85%	62.97%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim Recovery (Establishment) in Reserve Claim	625.62	(1,882.09)	(2,366.66)	125.75%	-478.29%
JUMLAH KLAIM TOTAL CLAIM	(50,149.90)	(77,898.74)	(85,114.00)	109.26%	69.72%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH GUARANTEE INCOME - NET	33,215.14	31,531.64	28,900.22	91.65%	-12.99%
PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME	13,279.74	18,776.25	18,302.70	97.48%	37.82%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME	1,924.57	3,072.77	2,519.76	82.00%	30.93%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)	1,543.40	(5,202.89)	(4,401.11)	84.59%	-385.16%
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES					
Beban Operasional Operating Expenses	(3,936.84)	(5,894.92)	(6,143.01)	104.21%	56.04%
Beban Sumber Daya Manusia Human Resource Expenses	(18,966.64)	(22,717.85)	(21,445.49)	94.40%	13.07%
Beban Administrasi & Umum General and Administrative Expenses	(6,574.67)	(9,117.00)	(6,870.80)	75.36%	4.50%
JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL OPERATING EXPENSES	(29,478.16)	(37,729.76)	(34,459.30)	91.33%	16.90%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK EARNINGS BEFORE TAX	20,484.68	10,448.00	10,862.26	103.96%	-46.97%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES	(5,282.63)	(2,258.42)	(851.77)	37.72%	-83.88%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN EARNINGS AFTER TAX	15,202.05	8,189.58	10,010.49	122.23%	-34.15%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	(955.39)	-	1,361.82	0.00%	-242.54%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	14,246.66	8,189.58	11,372.31	138.86%	-20.18%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

Ikhtisar Kinerja 2023
2023 Performance Overview

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
OTHER INCOME (EXPENSES)					
CKKE Aset Keuangan Expected Credit Losses Reserve of Financial Assets	3,615.63	(2,658.02)	(2,475.60)	93.14%	-168.47%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	368.68	350.00	359.64	102.75%	-2.45%
Pendapatan Lain-Lain Other Income	12.21	-	425.19	0.00%	3381.27%
Beban Lain-Lain Other Expenses	(545.76)	-	(0.78)	0.00%	-99.86%
Pajak Jasa Giro Service Tax	(73.83)	(70.00)	(72.47)	103.53%	-1.84%
Pajak Investasi Investment Tax	(1,833.54)	(2,824.88)	(2,637.08)	93.35%	43.82%
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	1,543.40	(5,202.89)	(4,401.11)	84.59%	-385.16%
TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)					

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

PERISTIWA DAN KINERJA PENTING

Important Events and Performance



27 Desember 2023
Desember 27, 2023

Perseroan berkolaborasi dengan Perum LKBN Antara dalam rangka promosi dan branding korporat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak.

The Company collaborates with Perum LKBN Antara in the context of promotion and corporate branding through the signing of a Cooperation Agreement between the two parties.



21 Desember 2023
Desember 21, 2023

Perseroan bersinergi dengan Kospin Jasa dan PT Jamkrida Jateng (sebagai mitra kogaransi) dalam Penjaminan Bersama atas Pinjaman yang Disalurkan oleh Kospin Jasa kepada anggotanya.

The Company synergizes with Kospin Jasa and PT Jamkrida Jateng (as co-guarantee partners) in Co-Guarantee for Loans Distributed by Kospin Jasa to its members.



12 Desember 2023
Desember 12, 2023

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan secara Hybrid oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen. Otda Kemendagri.

West Java Provincial Draft Regional Regulation Discussion Meeting which was held in a hybrid manner by the Directorate of Regional Legal Products, Directorate General of Regional Autonomy, Ministry of Home Affairs.



08 Desember 2023
Desember 08, 2023

Rapat ASPENDA yang diadakan di sela-sela Acara Sharing Session Jamkrida Se-Indonesia, bertempat di de Braga by Artotel Bandung.

The ASPENDA meeting was held on the sidelines of the Jamkrida all over Indonesia Sharing Session, at de Braga by Artotel Bandung.



08 Desember 2023
December 08, 2023

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Bersama dan Sharing Session Jamkrida Se-Indonesia, bertempat di Kimaya Baraga Bandung by Harris.

Signing of the Co-Guarantee Cooperation Agreement and Jamkrida all over Indonesia Sharing Session, at Kimaya Baraga Bandung by Harris.



29 November 2023
November 29, 2023

Rapat ASPENDA, bertempat di Four Points by Sheraton Bali Ungasan.

The ASPENDA Meeting, at Four Points by Sheraton Bali Ungasan..



29 November 2023
November 29, 2023

Rapat Koordinasi Lembaga Penjamin dengan LPDB-KUMKM, bertempat di Four Points by Sheraton Bali Ungasan.

Guarantee Institution Coordination Meeting with LPDB-KUMKM, at Four Points by Sheraton Bali Ungasan.



28 November 2023
November 28, 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jamkrida Jabar Tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Biro BUMD, Investasi, & Administrasi Pembangunan Setda Jabar.

PT Jamkrida Jabar Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023, at the Meeting Room, Floor IV, Bureau of BUMD, Investment & Development Administration of the Regional Secretariat of West Java.



17 November 2023
November 17, 2023

Seminar Nasional Penjaminan tentang "Setengah Abad Penjaminan Kredit UMKM Berkontribusi Bagi ekonomi Negeri", bertempat di Hotel JW Marriott Jakarta.

National Guarantee Seminar on "Half a Century of MSME Credit Guarantee Contributing to the Country's Economy", at the JW Marriott Hotel Jakarta.



09 November 2023
November 09, 2023

Rapat Kerja dengan Pansus V Raperda DPRD Provinsi Jawa Barat dan OJK Provinsi Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Komisi III.

Working Meeting with Special Committee V of the Draft Regional Regulation of the West Java Province Regional People's Representative Council and West Java Provincial Financial Services Authority, at the Commission III Meeting Room.



07 November 2023
November 07, 2022

Kegiatan Konsultasi Pansus V Raperda DPRD Provinsi Jawa Barat ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemnterian Dalam Negeri.

Special Committee V of the Draft Regional Regulation of the West Java Province Regional People's Representative Council Consultation Activities to the Directorate General of Regional Financial Development, Ministry of Home Affairs.



02 November 2023
November 02, 2023

Kegiatan Desk Kinerja BUMD Tahun 2023 dan Peoyeksi Dividen Tahun 2024, bertempat di Mason Pine Hotel KBP Kabupaten Bandung Barat.

2023 BUMD Performance Desk Activities and 2024 Dividend Projections, at the Mason Pine Hotel KBP West Bandung Regency.



17 Oktober 2023
October 17, 2023

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertanggungan Ulang Asuransi Jiwa Kredit antara PT Jamkrida Jabar dengan PT Pialang Reasuransi Dekai Indonesia, bertempat di Grand Hotel Preanger.

Signing of the Credit Life Insurance Re-Insurance Cooperation Agreement between PT Jamkrida Jabar and PT Dekai Indonesia Reinsurance Broker, at the Grand Hotel Preanger.



12 Oktober 2023
October 12, 2023

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan antara PT Jamkrida Jabar dengan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, bertempat di Kantor Pusat Investasi Pemerintah.

Signing of the Financing Guarantee Cooperation Agreement between PT Jamkrida Jabar and the Government Investment Center of the Ministry of Finance, at the Head Office of the Government Investment Center.



11 Oktober 2023
October 11, 2023

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Segenap Insan PT Jamkrida Jabar sebagai Komitmen untuk Mewujudkan Visi Misi Perseroan dan Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Signing of the Integrity Pact by All Personnel of PT Jamkrida Jabar as a Commitment to Realizing the Company's Vision and Mission and Improving Good Corporate Governance.



11 Oktober 2023
October 11, 2023

Pengajian dalam rangka Syukuran Milad PT Jamkrida Jabar ke-11 dengan Pembicara DR. Iskandar Mirza, M.Ag.

Recitation in commemoration of the 11th Anniversary of PT Jamkrida Jabar with Speaker DR. Iskandar Mirza, M.Ag..



10 Oktober 2023
October 10, 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jamkrida Jabar Tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Biro BUMD, Investasi, & Administrasi Pembangunan Setda Jabar.

PT Jamkrida Jabar Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023, at the Meeting Room, Floor IV, Bureau of BUMD, Investment & Development Administration of the Regional Secretariat of West Java.



08 Oktober 2023
October 08, 2023

Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar mendampingi Pansus V Raperda DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja pada Badan Pembina BUMD DKI Jakarta.

The Operational Director of PT Jamkrida Jabar accompanied the Special Committee V of the Draft Regional Regulation of the West Java Province Regional People's Representative Council on a working visit to the DKI Jakarta BUMD Advisory Board.



03 Oktober 2023
October 03, 2023

Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar menghadiri Rapat Kerja dengan Pansus V Raperda DPRD Provinsi Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Badan Musyawarah.

The Operational Director of PT Jamkrida Jabar attended the Working Meeting with Special Committee V of the Draft Regional Regulation of the West Java Province Regional People's Representative Council, at the Deliberative Body Meeting Room.



04 Agustus 2023
August 04, 2023

Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Jamkrida Jabar melakukan kunjungan kerja ke PT Jamkrida Jateng dalam rangka sharing session dan study comparative.

The President Commissioner and President Director of PT Jamkrida Jabar paid a working visit to PT Jamkrida Jateng in the context of a sharing session and comparative study..



26 Juni 2023
June 26, 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun Buku 2022, bertempat di Grand Hotel Preanger Bandung.

Annual General Meeting of Shareholders of PT Jamkrida Jabar for Fiscal Year 2022, at the Grand Hotel Preanger Bandung.



26 Mei 2023
May 26, 2023

Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Jabar menghadiri Kegiatan Kickoff Meeting GCG Campaign BUMD Provinsi Jawa Barat.

The Commissioners and Directors of PT Jamkrida Jabar attended the West Java Province BUMD GCG Campaign Kickoff Meeting.



23 Mei 2022
May 23, 2022

Kegiatan In House Training dalam rangka mneingkatkan literasi hukum bagi karyawan dengan Tema "Mengenal Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Penjaminan."

In House Training activities in order to increase legal literacy for employees with the theme "Getting to Know Civil and State Administration from a Guarantee Perspective."



02 Maret 2023
March 02, 2023

Pertemuan dengan Policy & Procedure Group Bank Syariah Indonesia.

Courtesy Meeting with Bank Syariah Indonesia Policy & Procedure Group.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Financial Soundness Level

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, berikut hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2023:

Based on Circular Letter of Financial Service Authority (SEOJK) No. 18/SEOJK.05/2018 about Guarantee Agency's Soundness Level, the following are the results of the assessment of the Financial Soundness Level of PT Jamkrida Jabar as of December 31, 2023:

INDIKATOR INDICATOR	STANDAR STANDARD	RKAP 2023 BP 2023	REALISASI 2023 REALIZATION 2023
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	130% s/d < 800%	600.99%	273.07%
Gearing Ratio	4 s/d < 28	25.86 kali	28.16 kali
Rasio Rentabilitas Rentability Ratio			
a. Return On Asset	≥ 5%	2.31%	2.36%
b. BOPO Operational Costs on Operational Revenues	< 85%	92.10%	90.43%
c. Rasio Klaim Terhadap Pendapatan IJP Ratio of Claim to Guarantee Fee Revenue	< 70%	71.19%	74.65%
Self Assessment GCG	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good
TOTAL NILAI KOMPOSIT COMPOSIT VALUE TOTAL	1 s/d 1,80	1.70	2.05
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN FINANCIAL SOUNDNESS LEVEL	Sangat Sehat Very Healthy	Sangat Sehat Very Healthy	Sangat Sehat Very Healthy
BOPO (Tanpa Beban Klaim) Operational Costs on Operational Revenues (No Claim Burden)		30.05%	26.06%



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners Report



Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada kita semua.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar ("Perseroan") menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sebagai pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris bersama Komite dibawah Dewan Komisaris secara periodik, telah menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi untuk tetap berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas internal control dalam setiap aktivitas Perseroan, termasuk pada konsistensi pencapaian target RKAP Tahun 2023, implementasi strategi Perseroan, dan prospek usaha yang disusun Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Direksi dalam mengelola tantangan yang ada hingga akhirnya mampu membukukan kinerja Perusahaan yang baik.

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi didasarkan atas kinerja operasional dan keuangan serta tingkat kesehatan Perseroan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil yang dapat berdampak secara langsung pada kegiatan usaha Perseroan.

Dear shareholders and stakeholders,

First of all, let us praise and thank God Almighty for the abundance of blessings and gifts He has bestowed upon us all.

On this occasion, please allow us as the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (the "Company") to submit a report on the supervision of the Board of Commissioners on the management of the Company for the financial year ending on December 31, 2023, as the responsibility of the Board of Commissioners for the mandate given by Shareholders and other Stakeholders.

The Board of Commissioners together with the Committees under the Board of Commissioners have periodically conveyed directions and advice to the Board of Directors to remain committed to implementing Good Corporate Governance, complying with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, as well as improving the quality of internal control in each of the Company's activities, including the consistency of achieving the Business Plan (BP) 2023 targets, implementation of the Company's strategy, and business prospects prepared by the Directors.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the success of the Board of Directors in managing the existing challenges so that they are finally able to record good Company performance.

The Board of Commissioner's assessment of the performance of the Board of Directors is based on operational and financial performance as well as the soundness of the Company amidst unstable economic conditions which can have a direct impact on the Company's business activities.

Dewan Komisaris tentunya menyadari dalam kondisi demikian target RKAP tahun 2023 tidaklah mudah untuk diraih. Namun demikian terdapat beberapa indikator operasional masih menunjukkan hasil yang baik.

The Board of Commissioners certainly realizes that in such conditions the BP 2023 target is not easy to achieve. However, several operational indicators still show good results.

ASPEK PENGELOLAAN KINERJA PERSEROAN

ASPECTS OF COMPANY PERFORMANCE MANAGEMENT

Di tahun 2023, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp10,16 miliar. Realisasi tersebut mencapai 124,00% dari target RKAP dan didukung oleh pencapaian pendapatan penjaminan 104,19% dari RKAP dan efisiensi beban usaha sebesar 91,33% dari RKAP. Sedangkan pencapaian pendapatan investasi dan pencapaian subrogasi, masing masing tercapai 97,48% dan 82,00%. Selain itu realisasi beban klaim neto mencapai 109,26% dari target RKAP.

In 2023, the Company will record a net profit of IDR 10.16 billion. This realization reached 124.00% of the BP target and was supported by the achievement of guarantee income of 104.19% of the RKAP and operating expense efficiency of 91.33% of the BP. Meanwhile, the achievement of investment income and subrogation achievement were respectively achieved at 97.48% and 82.00%. Apart from that, the realization of net claims expenses reached 109.26% of the BP target.

Dibandingkan dengan tahun 2022, pencapaian laba bersih Perseroan turun sebesar 33,20%. Penurunan Laba tersebut disebabkan karena meningkatnya Beban Klaim, yaitu sebesar 67,87% dari tahun sebelumnya. Di sisi Pendapatan, Perseroan dapat meningkatkan Pendapatan Penjaminan sebesar 35,93%, Pendapatan Investasi sebesar 37,82%, dan Pendapatan Subrogasi sebesar 30,93%, dari tahun sebelumnya.

Compared to 2022, the Company's net profit achievement decreased by 33.20%. The decrease in Profit was caused by an increase in Claim Expenses, which amounted to 67.87% from the previous year. On the Revenue side, the Company was able to increase Guarantee Income by 35.93%, Investment Income by 37.82%, and Subrogation Income by 30.93%, from the previous year.

Total Aset Perseroan meningkat sebesar 34,06% dibanding tahun 2022, menjadi Rp677,69 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Piutang Re/Cogaransi dan adanya penambahan setoran modal. Sedangkan komposisi Total Aset pada bulan Desember 2023 ini adalah 82,77% Aset Lancar dan 17,23% Aset Tidak Lancar. Perusahaan dalam kondisi yang sangat likuid. Namun demikian, Perusahaan masih memiliki piutang Re/Cogaransi yang cukup besar, yaitu mencapai 24,05% dari Aset Lancar.

The Company's total assets increased by 34.06% compared to 2022, to IDR 677.69 billion. This increase was mainly due to an increase in Re/Coguarantee receivables and additional capital payments. Meanwhile, the composition of Total Assets in December 2023 is 82.77% Current Assets and 17.23% Non-Current Assets. The company is in very liquid condition. However, the Company still has quite large Re/Coguarantee receivables, reaching 24.05% of Current Assets.

ASPEK PENGEMBANGAN USAHA

ASPECTS OF BUSINESS DEVELOPMENT

Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah penjaminan kredit

The Board of Directors has made efforts to increase the number of Productive credit

Produktif, menambah jumlah kerja sama dengan mitra-mitra baru, serta mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi.

guarantees, increase the number of collaborations with new partners, and develop information technology-based services.

ASPEK PENGEMBANGAN SDM

Dewan Komisaris menilai Perseroan secara konsisten terus berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan karyawannya melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sertifikasi sehingga kinerja karyawan dan organisasi dapat terus ditingkatkan.

ASPECTS OF HR DEVELOPMENT

The Board of Commissioners assesses that the Company is consistently committed to improving the skills of its employees through various training and certification activities so that employee and organizational performance can continue to be improved.

ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Dewan Komisaris mengapresiasi inisiatif Perseroan dalam menyalurkan bantuan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitar Perseroan. Tanggung jawab sosial tahun ini berfokus pada bidang pendidikan, kerohanian, sosial dan kesehatan.

ASPECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Board of Commissioners appreciates the Company's initiative in distributing aid and participating in various activities as a form of social responsibility towards the environment around the Company. This year's social responsibility focuses on the fields of education, spirituality, social and health.

ASPEK SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Dewan Komisaris menilai Perseroan perlu meningkatkan sistem pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) dan melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sistem pengendalian sehingga dapat terus menjaga efektivitas operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.

ASPECTS OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT (ISU)

The Board of Commissioners assesses that the Company needs to improve its internal control system through the Internal Supervisory Unit (ISU) and make improvements to several control systems so that it can continue to maintain the Company's operational effectiveness in accordance with statutory regulations and Company policies.

TATA KELOLA PERSEROAN

Tata kelola Perseroan menjadi salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola di Perseroan memiliki standar yang tinggi sesuai dengan prinsip dan praktik Good Corporate Governance (GCG). Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran dan

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance is one of the focuses of supervision by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is committed to ensuring that the implementation of governance in the Company has a high standard in accordance with the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG). The Board of Commissioners actively supervises and provides suggestions and

rekomendasi untuk berbagai aspek tata kelola serta manajemen risiko seiring semakin berkembangnya bisnis Perseroan. Dewan Komisaris senantiasa mengarahkan dan mengingatkan Direksi untuk menjalankan pengelolaan Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai yang dipersyaratkan OJK demi keberlanjutan Perseroan dalam jangka panjang.

recommendations for various aspects of governance and risk management as the Company's business continues to develop. The Board of Commissioners always directs and reminds the Board of Directors to carry out management of the Company using the principle of prudence in accordance with OJK requirements for the long-term sustainability of the Company.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

SUPERVISION AND GIVING OF ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

Dewan Komisaris memantau, mencermati, membahas, dan menyampaikan pandangan serta saran terhadap langkah-langkah pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi ataupun data yang diperoleh Dewan Komisaris melalui permintaan kepada Direksi. Forumnya dalam pertemuan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan atau permintaan Dewan Komisaris atau Direksi.

The Board of Commissioners monitors, examines, discusses, and conveys views and suggestions on the steps in managing the Company carried out by the Board of Directors. These activities are carried out based on reports submitted by the Board of Directors or data obtained by the Board of Commissioners through requests to the Board of Directors. The forum is in the monthly meetings of the Board of Commissioners and Directors or at certain times according to the needs or requests of the Board of Commissioners or Directors.

Selanjutnya, secara berkala Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasannya kepada pemegang saham melalui Laporan Triwulanan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Furthermore, periodically the Board of Commissioners reports its supervisory duties to shareholders through the Quarterly Report and Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties.

Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan telah memberikan kerja sama yang baik dan tidak ditemukan hal-hal yang menghambat Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

The Board of Directors and the Management of the Company have provided good cooperation and nothing has been found to hinder the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris akan terus membangun hubungan kerja yang efektif dan harmonis bersama Direksi agar pengelolaan Perseroan senantiasa berjalan sesuai harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners will continue to build an effective and harmonious working relationship with the Board of Directors so that the management of the Company continues to meet the expectations of shareholders and stakeholders.

**SARAN DAN REKOMENDASI DEWAN
KOMISARIS SELAMA TAHUN 2023**

**SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS DURING
2023**

1. Manajemen harus menyusun langkah-langkah strategis dan terperinci untuk dapat memperoleh renewal treaty reasuransi;
 2. Manajemen perlu menjajaki alternatif-alternatif kerja sama dengan Broker Reasuransi lainnya dan Perusahaan Reasuransi lainnya untuk mengurangi risiko tingginya beban klaim yang harus ditanggung Perusahaan;
 3. Dengan kondisi jumlah klaim yang cukup tinggi, Manajemen perlu memperhatikan produk-produk penjaminan yang memiliki rasio klaim relatif rendah dan memperkuat analisa penerimaan penjaminan;
 4. Manajemen harus menyusun langkah-langkah strategis dan terperinci untuk dapat meningkatkan pendapatan investasi dan subrogasi;
 5. Manajemen perlu memperhatikan pengelolaan Utang dan Piutang Re/Cogaransi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penagihan Piutang Re/Cogaransi;
 6. Perusahaan perlu terus menjaga dan meningkatkan komposisi penjaminan kredit produktif ini agar sesuai dengan Peraturan OJK;
 7. Melakukan seluruh pencatatan atau pengakuan dalam pembukuan keuangan dengan dilengkapi dokumen atau evidence yang sah;
 8. Memastikan pembayaran dan pengakuan beban klaim sesuai dengan waktunya (Service Level Agreement - SLA), dan tidak dilakukan penundaan;
 9. Mempercepat pemenuhan posisi jabatan kosong dalam Struktur Organisasi agar tidak mengganggu operasional bisnis PT Jamkrida Jabar;
 10. Manajemen harus segera menyusun KPI Unit dan KPI Karyawan agar parameter kinerja menjadi lebih terukur;
 11. Manajemen harus melengkapi dan melakukan pemutakhiran SOP di seluruh aktivitas bisnis Perseroan.
1. Management must develop strategic and detailed steps to obtain reinsurance treaty renewal;
 2. Management needs to explore alternatives for collaboration with other Reinsurance Brokers and other Reinsurance Companies to reduce the risk of high claims burdens that must be borne by the Company;
 3. With the condition of the number of claims being quite high, Management needs to pay attention to guarantee products that have a relatively low claim ratio and strengthen the analysis of guarantee receipts;
 4. Management must develop strategic and detailed steps to increase investment and subrogation income;
 5. Management needs to pay attention to the management of Re/Coguarantee debt and Receivables and take strategic steps to speed up the collection of Re/Coguaranteed Receivables;
 6. Companies need to continue to maintain and improve the composition of productive credit guarantees so that they comply with OJK regulations;
 7. Carry out all recordings or acknowledgments in financial books accompanied by valid documents or evidence;
 8. Ensure payment and recognition of claim expenses in accordance with the time (Service Level Agreement - SLA), and there are no delays;
 9. Accelerate the fulfillment of vacant positions in the Organizational Structure so as not to disrupt PT Jamkrida West Java's business operations;
 10. Management must immediately develop Unit KPIs and Employee KPIs so that performance parameters become more measurable;
 11. Management must complete and update SOPs for all of the Company's business activities.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana Komisaris Independen berakhir masa jabatannya tanggal 26 November 2023.

APRESIASI

Capaian kinerja PT Jamkrida Jabar tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi banyak pihak. Oleh karenanya, perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris, menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb sebagai pemegang saham, dan mitra-mitra usaha kami, atas kepercayaan yang diberikan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi, integritas, dan kerja kerasnya untuk menjadikan PT Jamkrida Jabar tetap pada jalurnya menuju pencapaian visi dan misi Perseroan di tahun 2023 dengan segala tantangannya.

Kami berharap agar hubungan yang terjalin dengan baik selama ini akan terus terawat di masa mendatang. Dengan kerja sama yang baik dan kerja keras, kami optimis dapat terus membantu dan mengembangkan pelaku KUMKM dalam meningkatkan usahanya demi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan pada gilirannya juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2023 there will be changes to the composition of the Board of Commissioners, where the Independent Commissioner's term of office ends on November, 26, 2023.

APPRECIATION

PT Jamkrida Jabar's performance achievements cannot be separated from the support and collaboration of many parties. Therefore, allow us on behalf of the Board of Commissioners to express our gratitude to all stakeholders, namely the West Java Provincial Government and Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb as shareholders, and our business partners, for the trust given.

The Board of Commissioners also expresses its highest appreciation to the Board of Directors and all employees for their dedication, integrity, and hard work to keep PT Jamkrida Jabar on track toward achieving the Company's vision and mission in 2023 with all its challenges.

We hope that the relationship that has been well established so far will continue to be maintained in the future. With good cooperation and hard work, we are optimistic that we can continue to help and develop CMSMEs actors in increasing their business for economic growth in West Java Province in particular and in turn also contributing to national economic growth.

Semoga kita semua selalu dalam bimbingan, May we all always be under the guidance, perlindungan, serta kasih sayang Tuhan Yang Maha protection, and love of God Almighty. Kuasa.

Bandung, Mei 2024
Bandung, May 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners
PT Jamkrida Jabar

Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Board of Sharia Supervisory Report



Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Board of Sharia
Supervisory

Khozin Abu Faqih
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Board of Sharia
Supervisory

***Assalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh***

***Pemegang saham dan pemangku
kepentingan yang terhormat,***

Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW, serta mudah-mudahan Allah SWT juga senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Perkenankanlah kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar menyampaikan bahwa DPS merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. DPS berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah/UUS) seperti PT Jamkrida Jabar.

Sesuai tugas dan fungsinya, DPS telah mengawasi operasional Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah.

PENGAWASAN DI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakaatuh***

Dear shareholders and stakeholders,

First and foremost, let us give thanks to the presence of Allah SWT, blessings and greetings may always be abundantly bestowed on the Messenger of Allah, Muhammad SAW, and hopefully Allah SWT will also always bestow His grace, prosperity, and guidance to all of us.

Please allow us, as the Board of Sharia Supervisory (BSS) of PT Jamkrida Jabar's Sharia Business Unit to convey that the BSS is an extension of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in realizing the fatwas that have been decided by DSN-MUI, including: DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning Kafalah and DSN-MUI Fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2009 concerning Sharia Guarantee. The BSS acts as a supervisor in a Sharia Guarantee Company or a Guarantee Company that conducts part of the Guarantee business based on Sharia Principles (Sharia Business Unit/SBU) such as PT Jamkrida Jabar.

By its duties and functions, BSS has overseen the operations of PT Jamkrida Jabar's Sharia Business Unit so that it conforms to Sharia values and the principles of good corporate governance. DPS has also provided advice and suggestions to Management regarding Sharia principles.

SUPERVISION IN 2023

During 2023, BSS has carried out its duties and responsibilities properly by the principles of Good Corporate Governance. To carry out these duties and responsibilities, BSS is involved in a series of meeting activities both internal meetings, meetings with the Board of Directors or with the ranks under the Board of Directors, or meetings with the Board of Commissioners.

DPS juga telah melakukan review atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan review atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar selama tahun 2023 antara lain mencakup:

- 1. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.*
- 2. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.*
- 3. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.*
- 4. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.*
- 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.*
- 6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris*
- 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.*

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2022, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional UUS PT Jamkrida Jabar telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada

BSS has also reviewed a policy or SOP that has been/will be stipulated by providing opinions or recommendations based on Sharia provisions as well as reviewing the implementation of Sharia guarantee products and services provided to partners by taking a sample transaction test as an assessment material and providing recommendations based on sharia provisions.

Oversight activities carried out by BSS PT Jamkrida Jabar during 2023 include:

- 1. Representing and or accompanying the Company for meetings, discussions, and consultations with external parties related to compliance with Sharia principles.*
- 2. Meetings and discussions with internal parties related to compliance with Sharia principles.*
- 3. Assess periodically the fulfillment of Sharia principles for the implementation of Sharia guarantees.*
- 4. Supervise the process of developing new products or product features as outlined in internal provisions or SOPs so that they comply with the DSN-MUI fatwas.*
- 5. Request data and information related to sharia aspects from the Company's Internal Supervisory Unit (ISU) in carrying out their duties.*
- 6. Evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of risk management policies related to compliance with Sharia principles and submit the results of the evaluation to the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- 7. Report the results of the implementation of BSS duties and responsibilities to the Board of Directors and Board of Commissioners, the Financial Services Authority (OJK), and DSN-MUI in the form of BSS Supervision Reports.*

Based on the results of supervision for 2022, BSS said that in general the operations of SBU PT Jamkrida Jabar were by sharia principles, DSN-MUI fatwa, and BSS opinion. Errors or defects that occur in operational activities are due to

kegiatan operasional dikarenakan perbedaan pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, dan juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. Insya Allah dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar, semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar.

Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar. Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

differences in individual understanding of a product, and SBU guarantees operational guidelines. For these error or lack, BSS recommends that improvements be made immediately after the error or lack are known. If there is an intentional element so that there are Sharia principles that are not fulfilled, then there must be consequences for these intentional mistakes or deficiencies.

Fulfilling Sharia principles is not easy, nor should it be considered simple. This is related to whether the income earned is legal or not and the guarantees given to the community, especially CMSMEs in West Java Province.

Therefore, all SBU operational activities must be ensured to run according to and comply with Sharia principles and provisions that apply to SBU. God willing, with strong awareness and commitment, the quality of SBU PT Jamkrida Jabar will get better in the years to come.

With good cooperation from the Board of Directors and all employees of PT Jamkrida Jabar, all activities from the aspect of new product development to guarantee operational activities can be run by the GCG principles that apply at SBU PT Jamkrida Jabar.

As is known, BSS carries out its duties and responsibilities to oversee the implementation and development of guarantee products owned by SBU PT Jamkrida Jabar. Studies have been carried out on the fulfillment of Sharia principles, especially in terms of conformity or non-compliance and whether or not there is a fatwa reference. All BSS activities have also been documented and reported to OJK and DSN-MUI in the form of BSS Supervision Reports.

HARAPAN DI TAHUN 2023

DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar di tahun 2023 dapat terus meningkatkan kinerja dan tata kelola dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional penjaminannya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik.

Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional penjaminan syariah UUS PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2023 tidak terdapat perubahan komposisi DPS.

APRESIASI

DPS memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar khususnya UUS dengan kinerja yang baik.

Dalam kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar, khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar, agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat turut mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan

HOPE IN 2023

BSS hopes that SBU PT Jamkrida Jabar 2023 can continue to improve performance and governance while maintaining compliance with prudential and Sharia principles in carrying out its guarantee operations. BSS is grateful that communication with the Board of Commissioners, Directors, and Divisions is maintained properly.

The synergies that have been built through meetings with the Board of Commissioners, Directors, and Divisions are always maintained and continuously improved to maintain the quality of SBU PT Jamkrida Jabar's Sharia guarantee operations so that they comply with applicable regulations and do not violate Sharia principles.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

During 2023 there was no change in the composition of BSS.

APPRECIATION

BSS appreciates the hard work and achievements of the management and all employees of PT Jamkrida Jabar, especially SBU with good performance.

On this occasion BSS also constantly reminds the management of PT Jamkrida Jabar, especially PT Jamkrida Jabar's Sharia Business Unit, to remain committed to maintaining compliance with Sharia principles and compliance with applicable laws and regulations.

Finally, BSS hopes that SBU PT Jamkrida Jabar can help realize PT Jamkrida Jabar's vision of becoming a trusted credit guarantee company that contributes to regional economic growth,

Laporan Manajemen
Management Report

ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan pembiayaan/pinjaman syariah.

especially in terms of guaranteeing sharia financing or loans.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bandung, Mei 2024
Bandung, May 2024

Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisory
PT Jamkrida Jabar
Unit Usaha Syariah
Sharia Business Unit

Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Board of Sharia Supervisory

Khozin Abu Faqih
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Board of Sharia Supervisory

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report



Agus Subrata
Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama)
Finance Director (Acting President Director)

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan kasih sayang-Nya PT Jamkrida Jabar ("Perseroan") mampu melewati tahun 2023 dengan kinerja yang cukup baik, di tengah ketatnya persaingan bisnis pada industri penjaminan.

Setelah masa-masa ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia mengalami pemulihan yang bertahap. Sejumlah langkah pemulihan ekonomi telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia.

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program stimulus fiskal untuk mendukung perekonomian.

Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan moneter untuk mendukung likuiditas pasar dan mendorong kredit yang lebih mudah tersedia bagi sektor-sektor yang membutuhkan.

Pemerintah juga meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi, termasuk bantuan bagi UMKM.

Bank Indonesia juga telah berfokus pada penguatan sektor keuangan, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

Sepanjang tahun 2023, industri penjaminan kredit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, antara lain:

- a. *Ketidakpastian Ekonomi Global*
Gejolak ekonomi global, seperti inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan gangguan rantai pasok, mempengaruhi kondisi ekonomi domestik. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko gagal bayar pada portofolio kredit yang dijamin..

Dear shareholders and stakeholders,

Praise and gratitude to the presence of God Almighty, because of all His affection PT Jamkrida Jabar (the "Company") was able to get through 2023 with quite a good performance, amidst intense business competition in the guarantee industry.

After a period of uncertainty due to the Covid-19 pandemic, the Indonesian economy is experiencing gradual recovery. A number of economic recovery steps have been taken by both the government and Bank Indonesia.

The government has implemented various fiscal stimulus programs to support the economy.

Bank Indonesia has taken monetary policy steps to support market liquidity and encourage credit that is more easily available to sectors in need.

The government has also launched various economic recovery programs aimed at supporting sectors directly affected by the pandemic, including assistance for MSMEs.

Bank Indonesia has also focused on strengthening the financial sector, including banking and non-bank financial institutions..

Throughout 2023, the credit guarantee industry in Indonesia will face various significant challenges, including:

- a. *Global Economic Uncertainty*
Global economic turmoil, such as high inflation, geopolitical tensions, and supply chain disruptions, affect domestic economic conditions. This uncertainty increases the risk of default on the secured credit portfolio.

b. Kenaikan Suku Bunga

Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Peningkatan suku bunga membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) dan menurunkan permintaan kredit dari sektor usaha.

c. Digitalisasi dan Teknologi

Perusahaan penjaminan kredit perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional. Namun, investasi dalam teknologi ini bisa sangat mahal, dan ada risiko keamanan siber yang perlu diantisipasi.

d. Kualitas Aset dan NPL

Meningkatnya tingkat NPL menjadi tantangan utama. Perusahaan penjaminan kredit harus memastikan kualitas aset tetap terjaga dengan manajemen risiko yang baik untuk mengurangi kemungkinan kredit macet. Pertumbuhan NPL dapat mengganggu likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan.

e. Penyediaan Likuiditas

Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan ketersediaan likuiditas merupakan tantangan tersendiri. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menjaga likuiditas yang cukup.

b. Increase in Interest Rates

Bank Indonesia raised interest rates to control inflation. An increase in interest rates makes loans more expensive, thereby increasing the risk of non-performing loans (NPL) and reducing demand for credit from the business sector.

c. Digitalization and Technology

Credit guarantee companies need to adapt to advances in technology and digitalization to increase operational efficiency and security. However, investing in this technology can be very expensive, and there are cybersecurity risks that need to be anticipated.

d. Asset Quality and NPL

The increasing level of NPLs is a major challenge. Credit guarantee companies must ensure that asset quality is maintained with good risk management to reduce the possibility of bad credit. NPL growth can disrupt a company's liquidity and financial stability.

e. Liquidity Provision

Maintaining a balance between financing growth and liquidity availability is a challenge in itself. A high Loan to Deposit Ratio (LDR) indicates that banks must remain careful in distributing credit to maintain sufficient liquidity.

Menjadi suatu kehormatan bagi Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023. Perseroan secara fundamental di tahun 2023 masih menunjukkan tren kinerja positif baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

It is an honor for the Board of Directors to submit the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023. Fundamentally, the Company in 2023 will still show positive performance trends from both financial and non-financial aspects.

KONDISI EKONOMI

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pada Triwulan IV-2023, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang solid sebesar 5,04% secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,94% (yoy). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 5,05%.

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,15% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Triwulan IV-2022. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), pertumbuhan ekonomi mencapai 1,93%.

Dari sisi pertumbuhan kredit nasional Indonesia, pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga November 2023, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 6.965,90 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 9,74% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2023 menunjukkan pertumbuhan positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 96,1%, yang meningkat dari 95,4% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama terjadi pada kredit investasi dan kredit modal kerja.

Pada tahun 2023, pertumbuhan kredit di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang positif. Hingga September 2023, penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat tercatat tumbuh sebesar 6,85% (year-on-year). Sementara itu, kredit modal kerja mengalami pertumbuhan melambat sebesar 1,31%, yang terutama disalurkan ke sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit dan pembiayaan di Jawa Barat pada tahun 2023 didukung oleh pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, serta upaya pemerintah dan perbankan dalam meningkatkan inklusivitas

ECONOMIC CONDITIONS

Based on BPS data, it shows that in Quarter IV-2023, the Indonesian economy recorded solid growth of 5.04% on an annual basis (year-on-year). This growth increased slightly compared to the previous quarter which reached 4.94% (yoy). Overall, Indonesia's economic growth throughout 2023 will reach 5.05%.

BPS also noted that West Java's economic growth in Quarter IV-2023 grew by 5.15% on an annual basis (year-on-year) compared to Quarter IV-2022. When compared with the previous quarter (q-to-q), economic growth reached 1.93%.

In terms of Indonesia's national credit growth, in 2023 it will show quite a significant increase. The Financial Services Authority (OJK) noted that until November 2023, banking credit distribution reached IDR 6,965.90 trillion, which is an increase of 9.74% on an annual basis (year-on-year) compared to the same period the previous year.

Bank Indonesia also noted that new credit distribution in the fourth quarter of 2023 showed positive growth with a Weighted Net Balance (WNB) of 96.1%, which increased from 95.4% in the previous quarter. This growth mainly occurred in investment credit and working capital credit.

In 2023, credit growth in West Java will show positive performance. Until September 2023, banking credit distribution in West Java was recorded as growing by 6.85% (year-on-year). Meanwhile, working capital credit experienced slowing growth of 1.31%, which was mainly channeled to the processing industry and trade sectors.

Overall, credit and financing growth in West Java in 2023 is supported by sustainable economic recovery, as well as government and banking efforts to increase financing inclusiveness and financial access for MSMEs..

pembiayaan dan akses keuangan bagi UMKM.

KINERJA PERSEROAN

Melalui dukungan dan kerja sama yang kuat dari dengan para pemangku kepentingan, kami dapat mewujudkan komitmen untuk menciptakan kinerja yang positif serta tumbuh secara kompetitif.

Kinerja Perseroan (Konsolidasi) tahun 2023 menunjukkan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2023 Perseroan membukukan Laba Bersih senilai Rp10,16 miliar atau sebesar 124% dari RKAP 2023 yang ditargetkan senilai Rp8,19 miliar, namun mengalami penurunan sebesar 19,16% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.
- b. Total Aset Perseroan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp677,69 miliar atau sebesar 117,40% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 34,06% jika dibandingkan tahun 2022.
- c. Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp320,70 miliar atau sebesar 89,97% dari RKAP 2023 yang ditargetkan senilai Rp356,07 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 22,47% jika dibandingkan tahun 2022.
- d. Volume Kredit tahun 2023 adalah senilai Rp14,52 triliun atau terealisasi sebesar 119,80% dari RKAP 2023, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp8,60 triliun (teralisasi 140,41%) dan Non Produktif senilai Rp5,91 triliun (teralisasi 98,72%). Volume Kredit tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 81,98% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- e. Volume Penjaminan tahun 2023 adalah senilai Rp10,85 triliun atau terealisasi sebesar 106,58% dari RKAP 2023, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp5,16 triliun (teralisasi 101,31%) dan Non Produktif senilai Rp5,08 triliun (teralisasi 111,85%). Volume Penjaminan

COMPANY PERFORMANCE

Through strong support and cooperation from stakeholders, we can realize our commitment to creating positive performance and growing competitively.

The Company's performance (Consolidated) in 2023 shows the following achievements:

- a. In 2023, the Company posted a Net Profit of IDR 10.16 billion or 124% of the BP 2023 which was targeted at IDR 8.19 billion, but decreased by 19.16% compared to the 2022 results.
- b. The Company's Total Assets as of 31 December, 31, 2023 were IDR 677.69 billion or 117.40% of the BP 2023 and grew by 34.06% compared to 2022.
- c. The Company's Total Equity as of December, 31, 2023 was IDR 320.70 billion or 89.97% of the BP 2023 which was targeted at IDR 356.07 billion and grew by 22.47% compared to 2022.
- d. The Credit Volume in 2023 was IDR 14.52 trillion or realized 119.80% of the BP 2023, of which Productive Credit Volume was worth IDR 8.60 trillion (realized 140.41%) and Non-Productive was IDR 5.91 trillion (realized 98.72%). The Credit Volume in 2023 grew by 81.98% compared to the realization in 2022.
- e. The Guarantee Volume in 2023 is IDR 10.85 trillion or 106.58% realized from the BP 2023, where the Productive Guarantee Volume is IDR 5.16 trillion (101.31% realized) and the Non-Productive Guarantee Volume is IDR 5.08 trillion (111.85 realized %). Guarantee Volume in

tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 59,75% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

2023 grew by 59.75% compared to the realization in 2022.

- | | |
|---|---|
| <p>f. Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2023 adalah senilai Rp275,98 miliar atau terealisasi sebesar 126,31% dari RKAP 2023, dimana IJP Produktif senilai Rp82,74 miliar (teralisasi 124,88%) dan Non Produktif senilai Rp193,24 miliar (teralisasi 126,93%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 39,35% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.</p> <p>g. Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp230,93 miliar atau terealisasi sebesar 108,24% dari RKAP 2023, dimana volume IJP Produktif senilai Rp61,37 miliar (teralisasi 91,27%) dan Non Produktif senilai Rp169,56 miliar (teralisasi 116,05%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 42,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.</p> <p>h. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 adalah sebanyak 1.014.293 unit atau terealisasi sebesar 835,98% dari RKAP 2023. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1.246,02% jika dibandingkan tahun 2022.</p> <p>i. Pada Tahun 2023 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp114,01 miliar atau mencapai 104,19% dari RKAP 2023 dan tumbuh sebesar 36,77% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.</p> <p>j. Pada Tahun 2023 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp18,30 miliar atau mencapai 97,48% dari RKAP 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 37,82% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.</p> <p>k. Pada Tahun 2023 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp2,52 miliar atau mencapai 82% dari RKAP 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 30,93% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.</p> | <p>f. Cash Basis Guarantee Service Fee Income in 2023 was IDR 275.98 billion or realized 126.31% of the BP 2023, where the Productive Guarantee Service Fee was IDR 82.74 billion (realized 124.88%) and Non-Productive Guarantee Service Fee was IDR 193.24 billion (realized 126.93%). Cash Basis Guarantee Service Fee income in 2023 grew by 39.35% compared to the realization in 2022.</p> <p>g. Accrual Basis Guarantee Service Fee Income in 2023 is IDR 230.93 billion or realized at 108.24% of the BP 2023, where the Productive Guarantee Service Fee volume is IDR 61.37 billion (realized 91.27%) and Non-Productive Guarantee Service Fee is IDR 169.56 billion (realized 116.05%). Accrual Basis Guarantee Service Fee Income in 2023 increased by 42.63% compared to the realization in 2022.</p> <p>h. The number of Guaranteed CMSMEs in 2023 is 1,014,293 units or realized at 835.98% of the BP 2023. The number of Guaranteed CMSMEs in 2023 grew by 1,246.02% compared to 2022.</p> <p>i. In 2023, the Company recorded Guarantee Income worth IDR 114.01 billion or reached 104.19% of the BP 2023 and grew by 36.77% compared to 2022 results.</p> <p>j. In 2023 the Company obtained Investment Income worth IDR 18.30 billion or reached 97.48% of the BP 2023 and increased by 37.82% compared to 2022 results.</p> <p>k. In 2023, the Company obtained Subrogation Income worth IDR 2.52 billion or reached 82% of the BP 2023 and increased by 30.93% compared to 2022 results.</p> |
|---|---|

l. Pada Tahun 2023 Perseroan mengakui Beban Lain-Lain senilai Rp2 miliar, sedangkan pada tahun 2022 mencatat Pendapatan Lain-lain senilai Rp1,54 miliar. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 230,10%.

m. Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2023 adalah senilai Rp82,75 miliar atau mencapai 108,85% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 62,97% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

n. Beban Usaha Perseroan di Tahun 2023 adalah senilai Rp34,46 miliar atau mencapai 91,33% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 16,90% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun Kinerja Unit Usaha Syariah menunjukkan capaian sebagai berikut:

a. Laba Bersih Tahun Berjalan UUS Tahun 2023 adalah sebesar Rp7,82 miliar atau terealisasi sebesar 171,76% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 83,39% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

b. Total Aset UUS tahun 2023 adalah senilai Rp99,68 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 189,12% dibandingkan realisasi tahun 2022 senilai Rp49,57 miliar.

c. Volume Kafalah tahun 2023 adalah senilai Rp3,15 triliun atau terealisasi sebesar 274,91% dari RKAP 2023, dimana Volume Kafalah Produktif senilai Rp2,55 triliun (tercapai 634,79%) dan Non Produktif senilai Rp607,25 miliar (tercapai 81,41%). Volume Kafalah tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 263,65% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

d. Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2023 adalah senilai Rp44,82 miliar atau terealisasi sebesar 258,92% dari RKAP 2023, dimana Pendapatan IJK Produktif

l. In 2023 the Company recognized Other Expenses worth IDR 2 billion, while in 2022 it recorded Other Income worth IDR 1.54 billion. This means decreased by 230.10%.

m. The Total Net Claims paid by the Company in 2023 are IDR 82.75 billion or 108.85% of the BP 2023 and increased by 62.97% compared to the realization in 2022.

n. The Company's Operating Expenses in 2023 were IDR 34.46 billion or reached 91.33% of the BP 2023 and increased by 16.90% compared to the realization in 2022.

The performance of the Sharia Business Unit shows the following achievements:

a. SBU's Current Year Earnings After Tax in 2023 was IDR 7.82 billion or realized by 171.76% of the BP 2023 and grew by 83.39% compared to the realization in 2022.

b. Total Assets of SBU in 2023 were worth IDR 99.68 billion or grew by 189.12% compared to the realization in 2022 was worth IDR 49.57 billion.

c. The Kafalah Volume in 2023 was IDR 3.15 trillion or realized by 274.91% of the BP 2023, of which the Productive Kafalah Volume was worth IDR 2.55 trillion (reached 634.79%) and Non-Productive was worth IDR 607.25 billion (reached 81.41%). The Kafalah Volume in 2023 grew by 263.65% compared to the realization in 2022.

d. The Kafalah Service Fee Cash Basis revenue in 2023 was IDR 44.82 billion or realized by 258.92% of the BP 2023, where the Productive Kafalah Service Fee Revenue

senilai Rp29,91 miliar (tercapai 508,30%) dan Non Produktif senilai Rp14,91 miliar (tercapai 130,47%). Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 188,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

was worth IDR 29.91 billion (reached 508.30%) and Non-Productive was worth IDR 14.91 billion (reached 130.47%). The Kafalah Service Fee Cash Basis revenue in 2023 grew by 188.91% compared to the realization in 2022.

- e. Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp35,98 miliar atau terealisasi sebesar 205,86% dari RKAP 2023, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp21,43 miliar (tercapai 325.33%) dan Non Produktif senilai Rp14.55 miliar (tercapai 133,62%). Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 168,08% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- f. Pendapatan Investasi UUS tahun 2023 adalah senilai Rp2,36 miliar atau terealisasi sebesar 88,38% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,85% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- g. Beban Klaim UUS tahun 2023 adalah senilai Rp12,41 miliar atau terealisasi sebesar 539,85% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 287,09% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- h. Beban Usaha UUS tahun 2023 adalah senilai Rp4,09 miliar atau terealisasi sebesar 93,89% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 127,76% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

- e. The Kafalah Service Fee Accrual Basis revenue in 2023 was IDR 35.98 billion or realized by 205.86% of the BP 2023, where Productive Kafalah Service Fee Income was worth IDR 21.43 billion (achieved 325.33%) and Non-Productive was worth IDR 14.55 billion (achieved 133.62%). The Kafalah Service Fee Accrual Basis revenue in 2023 grew by 168.08% compared to the realization in 2022.
- f. SBU's Investment Income in 2023 was IDR 2.36 billion or realized by 88.38% of the BP 2023 and grew by 5.85% compared to the realization in 2022.
- g. SBU's Claim Expense in 2023 was IDR 12.41 billion or realized by 539.85% of the BP 2023 and grew by 287.09% compared to the realization in 2022.
- h. SBU's Operating Expenses in 2023 were IDR 4.09 billion or realized by 93.89% of the BP 2023 and grew by 127.76% compared to the realization in 2022.

TANTANGAN

Tantangan utama Perseroan sepanjang tahun 2023 adalah menjaga kinerja agar tetap tumbuh dalam kondisi meningkatnya beban klaim baik konven maupun syariah secara yoy, meningkatnya piutang reasuransi (claim recovery), dan Perusahaan kesulitan mendapatkan dukungan dari perusahaan reasuransi berupa pembaruan treaty reasuransi (di Indonesia belum ada Perusahaan Penjaminan Ulang/Regaransi).

CHALLENGE

The Company's main challenge throughout 2023 is to maintain performance so that it continues to grow in conditions of increasing claim burdens both conventional and sharia yoy, increasing reinsurance expenses (claim recovery), and the Company having difficulty getting support from reinsurance companies in the form of reinsurance treaty freshness (in Indonesia there is no Reinsurance Company/Reguarantee).

PELAKSANAAN STRATEGI PERSEROAN

Strategi Perseroan yang dijalankan di tahun 2023 dalam mengantisipasi tantangan di atas, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan IJP Cash Basis dengan fokus pada penjaminan sektor produktif.
2. Meningkatkan kualitas underwriting penjaminan (identifikasi dan seleksi risiko terhadap calon terjamin).
3. Memperbaiki syarat dan ketentuan penjaminan dalam perjanjian kerja sama dengan mitra.
4. Melakukan optimalisasi pengelolaan Piutang Reasuransi dan penagihan yang intensif kepada mitra-mitra terkait.
5. Melakukan inisiasi kerja sama dan menjaminkan ulang sebagian portofolio bisnis kepada mitra reasuransi baru.
6. Melakukan transfer risiko jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa.
7. Memperkuat kebijakan dan mekanisme pengendalian internal.
8. Meningkatkan layanan kepada mitra termasuk melalui pengembangan teknologi informasi secara berkelanjutan.

HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL

Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dari KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) terhadap Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 memberikan memberikan Opini Audit Wajar, dalam Semua Hal yang Material sesuai Laporan Audit Independen Nomor: 00146/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Berdasarkan SE-OJK No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, tahun 2023 PT Jamkrida Jabar memperoleh nilai 2,05; berada pada rentang

COMPANY STRATEGY IMPLEMENTATION

The Company's strategy to be implemented in 2023 in anticipating the above defenses includes:

1. Increase Cash Basis Guarantee Service Fee income by focusing on guaranteeing the productive sector.
2. Improving the quality of underwriting guarantees (risk identification and selection of guaranteed candidates).
3. Improve the terms and conditions of guarantees in cooperation agreements with partners.
4. Optimizing the management of Reinsurance Receivables and intensive collection from related partners.
5. Initiate cooperation and reguarantee part of the business portfolio to new reinsurance partners.
6. Transfer life risks to life insurance companies.
7. Strengthen internal policies and controls.
8. Improve services to partners, including through continuous development of information technology.

RESULTS OF EXTERNAL AUDITOR EXAMINATION

The results of the External Auditor's Examination from KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) on the Financial Statements of PT Jamkrida Jabar for the Year Ended December 31, 2023 provide a Fair Audit Opinion, in All Material Respects according to the Independent Audit Report Number: 00146/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 date on April, 29, 2024.

FINANCIAL SOUNDNESS LEVEL

Based on SE-OJK No. 18/SEOJK.05/2018 concerning Guarantee Agency's Soundness Level, in 2022 PT Jamkrida Jabar obtained a value of 2.05; is in the range of $1.8 < TTK < 2.6$ by indicating a HEALTHY financial category.

1,8 < TKK < 2,6 dengan menunjukkan kategori keuangan yang SEHAT.

RATING PEMERINGKATAN

PT Jamkrida Jabar memperoleh peringkat idBBB (Triple B; Stable Outlook) dari Lembaga Pemeringkat PT PEFINDO untuk periode 21 November 2023 sampai dengan 01 November 2024, artinya Perseroan sebagai Perusahaan Penjaminan dinilai memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai dibandingkan Perusahaan lainnya di Indonesia untuk memenuhi komitmen keuangannya. Dengan hasil tersebut, Perseroan telah melampaui standar minimal untuk dapat bekerja sama dengan bank-bank umum.

RATING PEMERINGKATAN

PT Jamkrida Jabar obtained idBBB rating (Triple B; Stable Outlook) from PT PEFINDO Rating Agency for the period November 21, 2023 to November 01, 2024, meaning that the Company as a Guarantee Company is considered to have adequate financial security characteristics compared to other companies in Indonesia to meet its financial commitments. With these results, the Company has exceeded the minimum standards to be able to cooperate with commercial banks.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai Perusahaan Penjaminan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, Perseroan menyadari bahwa dalam mengelola dana masyarakat adalah penting untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sekaligus juga menjadi bagian dari tuntutan kebutuhan di lingkungan industri keuangan Indonesia.

Perseroan telah memiliki berbagai pedoman pelaksanaan GCG, antara lain sebagai berikut:

1. Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)
2. Board of Manual (Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi)
3. Code of Conduct (Etika Kerja dan Etika Usaha)
4. Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit)
5. Committee Audit Charter (Piagam Komite Audit)
6. Code of Whistleblowing Systems (Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran)
7. Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2023 adalah tahun ketujuh Perseroan melakukan penilaian sendiri (self assessment)

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

As a Guarantee Company with the status of a Regional Owned Enterprise (BUMD) of West Java Province, the Company realizes that in managing public funds it is important to implement Good Corporate Governance (GCG). This is in accordance with the direction of the Financial Services Authority (OJK) which is also part of the demands of needs in the Indonesian financial industry.

The Company has various guidelines for implementing GCG, including the following:

1. Code of Corporate Governance
2. Board of Manual (Board of Commissioners and Directors Guidelines)
3. Code of Conduct (Work Ethics and Business Ethics)
4. Internal Audit Charter
5. Audit Committee Charter
6. Code of Whistleblowing Systems
7. Public Information Disclosure Guidelines

2023 is the seventh year that the Company has conducted a self-assessment based on the

berdasarkan pada format yang telah ditetapkan oleh OJK. Adapun skor self assessment tahun 2023 adalah 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) dengan predikat "Sangat Baik". Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola yang baik.

format set by OJK. The self-assessment score in 2023 is 90.01 (ninety point zero one) with the predicate "Very Good". The Company continues to be committed to making efforts to improve and improve good governance.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2023 terdapat perubahan komposisi Direksi, yaitu pengunduran diri Direktur Utama Perseroan, pergeseran jabatan Direktur Operasional menjadi Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Utama, dan pengangkatan Direktur Operasional yang baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Oktober 2023.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

During 2023 there will be changes in the composition of the Board of Directors, namely the resignation of the Company's President Director, the shift in the position of Operational Director to Finance Director concurrently Acting. President Director, and appointment of a new Operational Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 10 October 2023.

APRESIASI

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan PT Jamkrida Jabar atas dukungan dan kerja sama yang diberikan, khususnya kepada pemegang saham dan mitra kerja Perseroan.

APPRECIATION

The Board of Directors would like to thank all stakeholders of PT Jamkrida Jabar for the support and cooperation provided, especially to the shareholders and partners of the Company.

Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan.

The Board of Directors also gives the highest appreciation to the Board of Commissioners for the supervision and advice given to the Board of Directors in order to carry out the management of the Company.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga PT Jamkrida Jabar mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2023.

Appreciation is also given to all employees for their dedication and hard work so that PT Jamkrida Jabar is able to show good performance in 2023.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Direksi memiliki optimisme bahwa PT Jamkrida Jabar akan terus tumbuh, adaptif, memiliki daya saing, dan berkesinambungan, serta memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Company is committed to consistently realizing GCG principles. The Board of Directors has optimism that PT Jamkrida Jabar will continue to grow, adaptive, competitive, and sustainable, as well as provide optimal benefits for shareholders and other stakeholders.

Demikian laporan Direksi atas kegiatan kepengurusan PT Jamkrida Jabar selama tahun 2023.

This is the report of the Board of Directors on the management activities of PT Jamkrida West Java during 2023.

Bandung, Mei 2024
Bandung, May 2024

Direksi
Board Of Directors
PT Jamkrida Jabar

Agus Subrata
Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama)
Finance Director (Acting President Director)

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

Responsibility For The 2023 Annual Report

Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun 2023 berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait dibuat dengan keadaan sebenarnya oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

The 2023 Annual Report of PT Jamkrida Jabar along with the Financial Statements and other related information was prepared according to the actual situation by the Board of Directors which has been reviewed by the Board of Commissioners by affixing the signature below.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
PT Jamkrida Jabar

Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama
President Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
PT Jamkrida Jabar

Agus Subrata
Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama)
Finance Director (Acting President Director)



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

SEKILAS JAMKRIDA JABAR

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar adalah:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada KUMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

LEGALITAS USAHA

Perseroan telah memiliki izin dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tercantum dibawah ini:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang

ABOUT JAMKRIDA JABAR

PT Jamkrida Jabar is a Business Entity Owned by the Regional Government of West Java Province (BUMD), established based on Regional Regulation of West Java Province Number 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies.

The purpose of forming a company is to increase funding capacity and facilitate economic activities, especially Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs) to increase economic growth and people's welfare.

The objectives of establishing PT Jamkrida Jabar are:

- a. provide credit guarantee services to CMSMEs;
- b. increasing regional economic activity; and
- c. contributing to Regional Original Revenue.

BUSINESS LEGALITY

The company already has permits and legality in carrying out its business activities, as listed below:

1. Regional Regulation of West Java Province Number: 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies.
2. Regulation of the Governor of West Java Number: 19 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Regional Regulations of West Java Province Number: 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies.
3. Regional Regulation of West Java Province Number: 17 of 2012 concerning Investment

- Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar.
4. Akta Pendirian PT Jamkrida Jabar Nomor: 03 Tahun 2012, tanggal 03 Oktober 2012, beserta Akta perubahan-perubahannya.
 5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56159.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 01 November 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, beserta keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan-perubahannya.
 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
 7. Izin Gangguan Nomor: 503/IG/DJ03/BPPT tanggal 20 April 2015.
 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 101116418463 tanggal 12 September 2018.
 9. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304971535 tanggal 13 September 2019.
 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 31.625.184.2-422.000.
 11. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.05/D.05/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 30 Januari 2013.
 12. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.
 13. Surat Izin Operasi Tingkat Nasional dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-3912/NB.111/2015 tanggal 14 Juli 2015.
- of the West Java Provincial Government in PT Jamkrida Jabar.
4. Deed of Establishment of PT Jamkrida Jabar Number: 03 of 2012, October 03, 2012, along with the Deed of its amendments.
 5. Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-56159.AH.01.01 of 2012, dated November 1, 2012, concerning Ratification of Company Legal Entities, along with the decision of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding its amendments.
 6. Company Domicile Certificate Number: 503/014/DP-SKJ/II/2015 dated February 17, 2015.
 7. Nuisance Permit Number: 503/IG/DJ03/BPPT dated April 20, 2015.
 8. Company Registration Certificate (TDP) Number: 101116418463 dated September 12, 2018.
 9. Business Identification Number (NIB) Number: 9120304971535 dated September 13, 2019.
 10. Taxpayer Identification Number (NPWP) Number: 31.625.184.2-422.000.
 11. Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP.05/D.05/2013 concerning the Granting of a Credit Guarantee Company Business License to PT Jamkrida Jabar dated January 30, 2013.
 12. Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-04/NB.223/2015 concerning the Granting of a Permit to Establish a Sharia Business Unit for a Credit Guarantee Company to PT Jamkrida Jabar dated February 03, 2015.
 13. National Level Operating Permit from the Director of Institutional and Product Non-Bank Financial Industry (IKNB) Financial Services Authority Number: S-3912/NB.111/2015 dated July 14, 2015.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEMBAGA PENJAMIN**

1. UU Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. POJK Nomor: 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
3. POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
4. POJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
5. POJK Nomor: 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

GUARANTEE INSTITUTION REGULATION

1. Law Number: 1 of 2016 concerning Guarantees.
2. OJK Regulation Number: 1/POJK.05/2017 concerning Business Licensing and Institutional Guarantee Institutions.
3. OJK Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning Business Implementation of Guarantee Institutions.
4. OJK Regulation Number: 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
5. OJK Regulation Number: 30/POJK.05/2018 concerning Amendments to OJK Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning Business Implementation of Guarantee Institutions.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

1. UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP Nomor: 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
4. Pergub. Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola BUMD Provinsi Jawa Barat.

**GOVERNANCE
REGULATIONS**

IMPLEMENTATION

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law Number: 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number: 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number: 23 of 2014 concerning Regional Government.
3. Government Regulation Number: 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises (BUMD).
4. Regulation of the Governor of West Java Number: 105 of 2020 concerning Regulations for the Regional Owned Enterprises Governance Implementation in West Java Province.

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

VISI VISSION



**Menjadi Perusahaan Penjaminan Kredit
Terpercaya yang Berkontribusi pada
Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

**Becoming a Trusted Credit Guarantee
Company that Contributes to Regional
Economic Growth**

MISI MISSION

**Meningkatkan Kegiatan Ekonomi KUMKM
dan Memberikan Manfaat bagi Pemangku
Kepentingan melalui Penjaminan Kredit
yang Efisien, Profesional, dan
Berintegritas**

**Increasing CMSME's Economic Activities
and Providing Benefits to Stakeholders
through Efficient, Professional and
Integrity Credit Guarantee.**



NILAI-NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUES

PT Jamkrida Jabar memiliki nilai-nilai BISA sebagai budaya kerja dalam Perusahaan yang mendorong peningkatan kinerja dan mempertegas okupasi pasar terhadap layanan atau produk perusahaan.

PT Jamkrida Jabar has the BISA values as a work culture that encourages performance improvement and reinforces market occupation of the company's services or products.



PRODUK DAN LAYANAN

PRODUCTS AND SERVICES

PRODUK DAN LAYANAN PENJAMINAN*

1. Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya.
3. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
4. Penjaminan atas surat utang;
5. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
6. Penjaminan transaksi dagang;
7. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
8. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
9. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
10. Penjaminan *letter of credit*;
11. Penjaminan kepabeanan (customs bond);
12. Penjaminan cukai;
13. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
14. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

*Berdasarkan POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

PRODUCTS AND SERVICES GUARANTEE*

1. Credit Guarantees, Financing, or Financing Based on Sharia Principles provided by Financial Institutions.
2. Loan guarantees distributed by savings and loan cooperatives or cooperatives with savings and loan business units to their members.
3. Credit guarantees and/or partnership program loans disbursed by state-owned enterprises within the partnership and community development program framework.
4. Guarantee for bonds;
5. Guarantee for the purchase of goods in installments;
6. Guarantee of trade transactions;
7. Guarantee for the procurement of goods and or services (the surety bond);
8. Contra bank guarantee;
9. Guarantee of domestic documents of credit;
10. Letter of credit guarantee;
11. Customs bond;
12. Excise guarantee;
13. Provision of management consulting services related to Guaranteeing business activities; and
14. Other business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority.

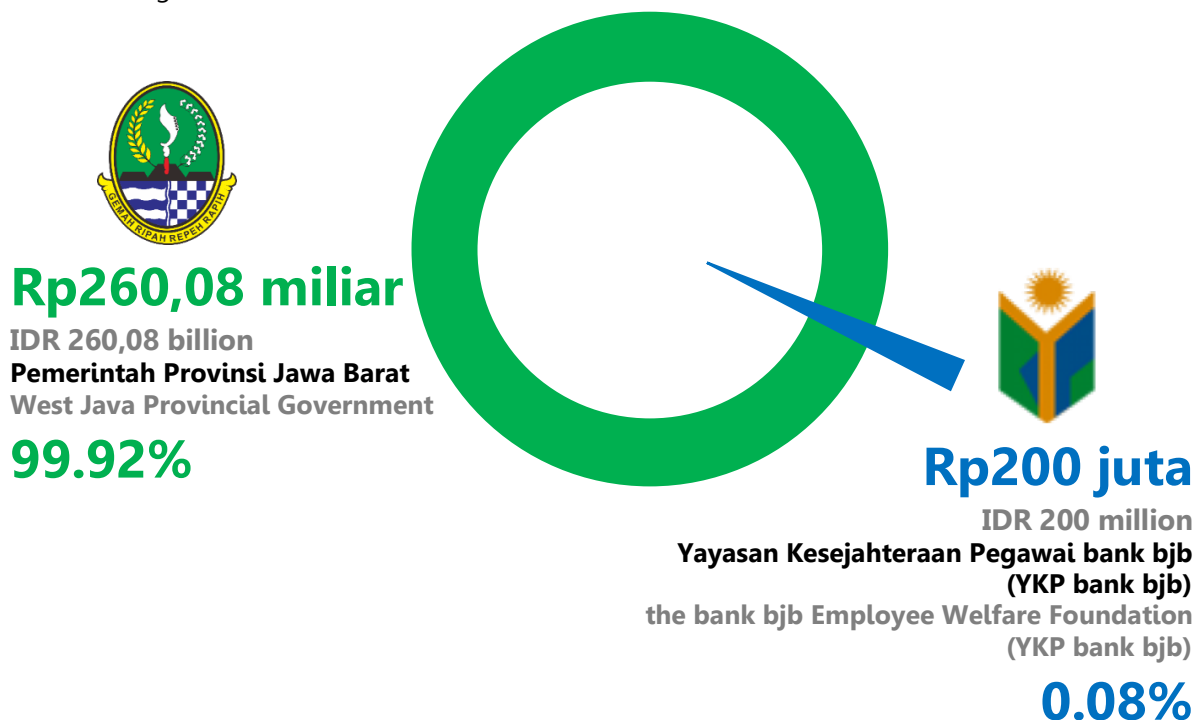
*Based on OJK Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Guarantee Institutions Business, Article 2 Paragraph (1) and (2).

INFORMASI MODAL DAN PEMEGANG SAHAM

INFORMATION ABOUT CAPITAL AND SHAREHOLDERS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)". Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp260,28 miliar dengan rincian sebagai berikut:

By West Java Province Regional Regulation Number: 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies Chapter V Article 5 Paragraph (1) states that "The company's authorized capital is Rp. 300,000,000,000.- (three hundred billion rupiahs)". As of December 31, 2022, the capital that has been paid up to PT Jamkrida Jabar is IDR 260.28 billion with the following details:



Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyetorkan saham pada PT Jamkrida Jabar sebesar Rp260.080.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah), sedangkan pemegang saham lain yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb (YKP bank bjb) telah menyetorkan saham senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, sisa saham PT Jamkrida Jabar yang masih dalam simpanan (portepel) adalah senilai Rp39.720.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atau 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham.

The West Java Provincial Government has deposited shares in PT Jamkrida Jabar in the amount of IDR Rp260.080.000.000,- (two hundred and sixty billion eighty million rupiahs), while other shareholders, namely the bank bjb Employee Welfare Foundation (YKP bank bjb) have deposited shares of IDR 200,000,000, - (two hundred million rupiahs). Therefore, the remaining shares of PT Jamkrida Jabar which are still in the portfolio are worth IDR 39.720.000.000,- (thirty-nine billion seven hundred and twenty million rupiahs) or 3,972 (three thousand nine hundred and seventy two) shares.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONER PROFILE



MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Komisaris Utama
President Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Probolinggo, 21 April 1967.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Probolinggo, on April 21, 1967.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Kebijakan Publik di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S2 Public Administration di University of Birmingham tahun 1995.
- S1 Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung tahun 1990.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 Desember 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 07, tanggal 21 Desember 2021.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as President Commissioner of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the GMS Decision on December 21, 2021, according to the Deed of Statement of Resolutions of Shareholders outside the EGMS of PT Jamkrida Jabar Number: 07, December 21, 2021.

PERIODE MENJABAT

21 Desember 2021 - 21 Desember 2025.

PERIOD OF SERVICE

December 21, 2021 - December 21, 2025.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat (2020-sekarang).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2019-2020).
- Penjabat Bupati Purwakarta (2018).
- Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (2018).
- Kepala Biro Pemerintahan Dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Barat (2016-2017).

EMPLOYMENT HISTORY

- Assistant for the Economy and Development of the Regional Secretariat of West Java Province (2020-present).

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctor of Public Policy at Padjadjaran University in 2012.
- Master of Public Administration at the University of Birmingham in 1995.
- Bachelor of Engineering Planology at the Bandung Institute of Technology in 1990.

- Head of the Regional Development Planning Agency of West Java Province (2019-2020).
- Acting Regent of Purwakarta (2018).
- Head of the Regional Library and Archives Service of West Java Province (2018).
- Head of Government and Cooperation Bureau of Regional Secretariat of West Java Province (2016-2017).

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Muhammad Taufiq Budi Santoso has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso does not own the Company's shares.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BOARD OF SHARIA SUPERVISORY PROFILE



ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 31 Januari 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bandung, on January 31, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 38, tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Chairman of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat (Periode 2010-2015)
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (2002-2003).
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

EMPLOYMENT HISTORY

- Lecturer at the Faculty of Syari'ah at the Islamic University of Bandung (UNISBA) until now.

- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctoral degree at Sunan Gunung Djati State Islamic University in 2022.
- Master of Islamic Studies/Islamic Economics at State Islamic University/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2008.
- Bachelor of Sharia/Muamalah Faculty at the State Islamic Institute/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung in 1999.

- Member of the PW Tarjih and Tajdid Council. Muhammadiyah West Java (Period 2010-2015)
- Chairman of the Jakarta Syari'ah Economic Forum (2002-2003).
- Author of scientific works on Islamic Economics/Sharia Economics.

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Zaini Abdul Malik has no affiliation with other members of the Board of Sharia Supervisory, nor the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik does not own the Company's shares.



KHOZIN ABU FAQIH

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Gresik, 08 September 1969.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Gresik, on September 08, 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta) tahun 1996.

EDUCATIONAL BACKGROUND
Graduated from Sharia Faculty at the Institute of Islamic and Arabic Sciences (LIPIA/Imam Muhammad bin Saud Riyadh Islamic University Jakarta Branch) in 1996.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Member of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pimpinan Pesantren Qur'an Atarbiyah Pusat Layanan Pendidikan (PULPEN).
- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang).
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012).
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun (2000-2009).
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996).
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam

EMPLOYMENT HISTORY

- Leaders of the Pesantren Qur'an Atarbiyah Education Service Center (PULPEN).
- Caretaker of Al-Ibda' Innovative Islamic Boarding School and Al-Ilham Islamic Boarding School/Sharia Banking Vocational School (2013-present).

Profil Perusahaan Company Profile

- MQFM Islamic Insights Study Filler (2010-2012).
- Lecturer at Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009).
- Lecturer in Ma'had Salahuddin Bogor (1994-1996).
- Author and translator of Islamic books.

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Khozin Abu Faqih has no affiliation with either the other Members of the Board of Sharia Supervisory or the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih does not own the Company's shares.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR PROFILE



AGUS SUBRATA

Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama)
Finance Director (Acting President Director)

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 01 Juni 1968.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on June 1, 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul tahun 2014.
- S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 1993.

EDUCATIONAL BACKGROUND

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar Nomor: 74 tanggal 13 September 2021. Diangkat menjadi Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 10 Oktober 2023 sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as the Finance Director of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the EGMS Decision on September 13, 2021, according to the PT Jamkrida Jabar Shareholders Decision Statement Deed (Sirkuler) Number: 74 of September 13, 2021. Appointed as Finance Director concurrently Acting President Director based on the EGMS Decision dated 10 October 2023 in accordance with the Deed of Minutes of the EGMS of PT Jamkrida Jabar Number: 02 dated 10 October 2023.

PERIODE MENJABAT

13 September 2021 - 31 Agustus 2026.

PERIOD OF SERVICE

September 13, 2021 - August 31, 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar (Sep 2021-Okt 2023).
- Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-sekarang).

Profil Perusahaan Company Profile

- Master of Management at Esa Unggul University in 2014.
- Bachelor of Government Science from Padjadjaran University in 1993.
- Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-2021).
- Komisaris Independen PT Sahabat Insurance d/h PT Bess Central Insurance (2018-2021).
- Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Asisten Direktur Teknik dan R&D PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Direktur PT Tala Re International Reinsurance Broker Direktur (2010-2013).

EMPLOYMENT HISTORY

- Operational Director PT Jamkrida Jabar (Sep 2021-Oct 2023).
- Lecturer at the Trisakti Insurance Management College (2020- present).
- Vice Chair II at the Trisakti Insurance Management College (2020-2021).
- Independent Commissioner of PT Sahabat Insurance formerly PT Bess Central Insurance (2018-2021).
- President Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Assistant to the Technical and R&D Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Director of PT Tala Re International Reinsurance Broker Director (2010-2013).

HUBUNGAN AFILIASI

Agus Subrata tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Agus Subrata has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Agus Subrata tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

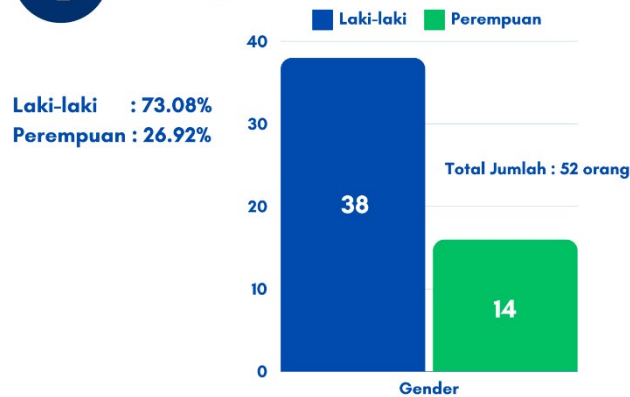
Agus Subrata does not own the Company's shares.

DATA DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES DEMOGRAPHIC DATA

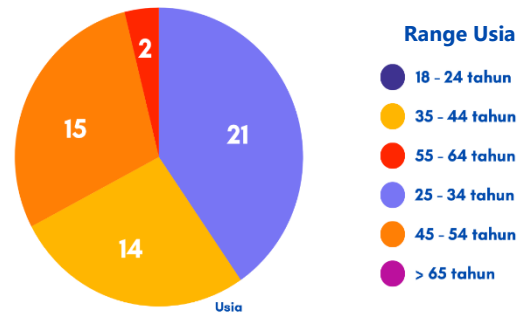
1 Distribusi Gender

(dalam orang)



2 Distribusi Usia

(dalam orang)

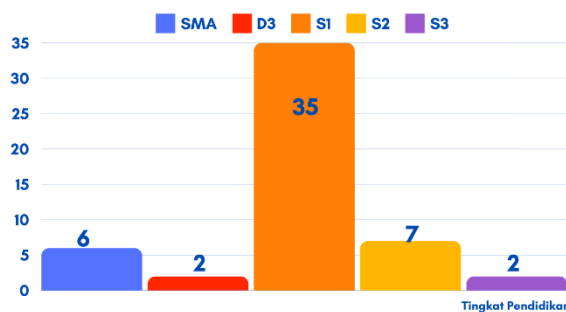


Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Gender dan Usia

Employee Classification Based on Gender and Age

3 Tingkat Pendidikan

(dalam orang)



4 Distribusi Pegawai

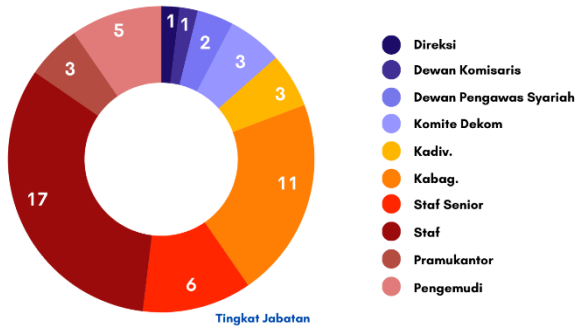
(dalam orang)



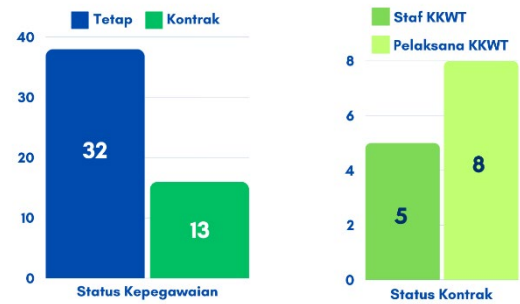
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Distribusi Pegawai

Employee Classification Based on Education Level and Employee Distribution

5 Tingkat Jabatan (dalam orang)



6 Status Kepegawaian (dalam orang)



Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Status Kepegawaian Employee Classification Based on Position Level and Employment Status

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

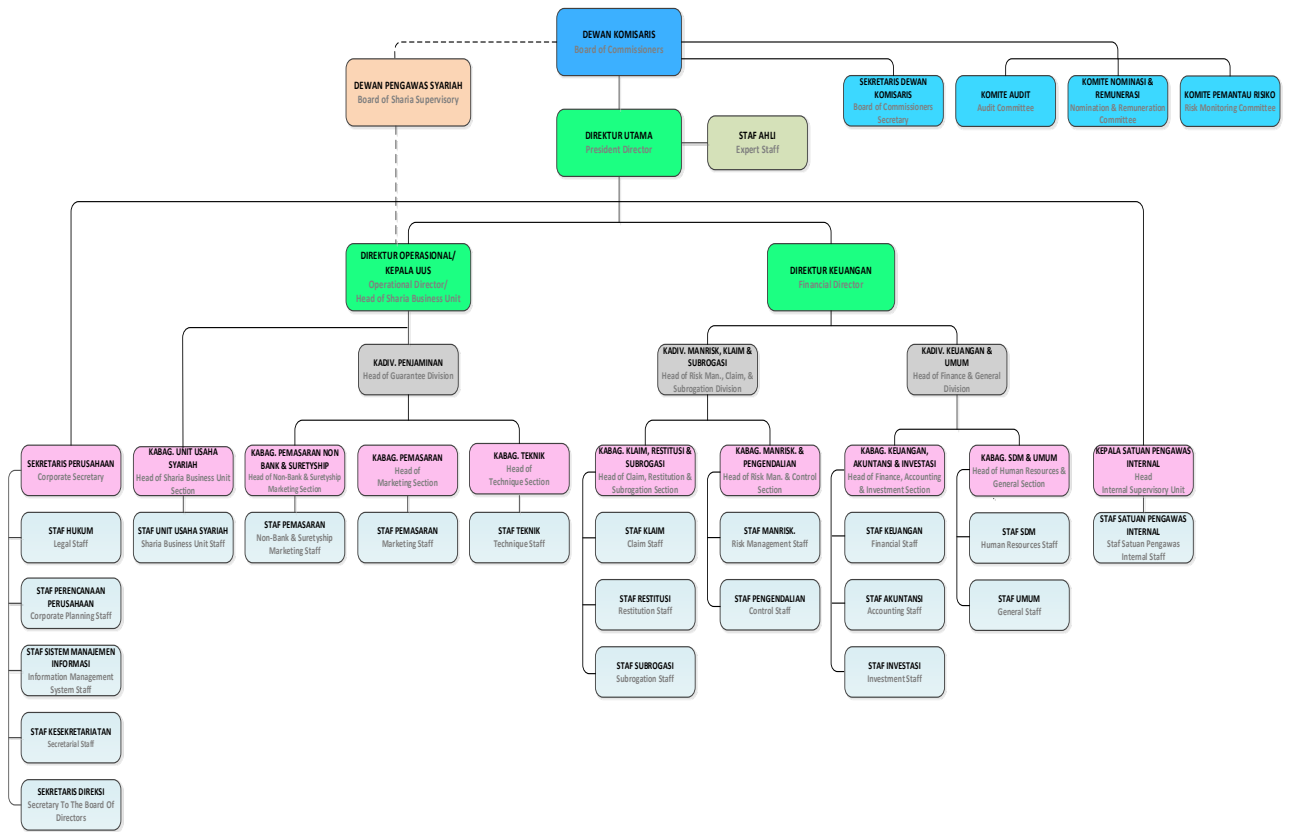
Dalam menjalankan operasional usahanya, PT Jamkrida Jabar memiliki struktur organisasi yang memuat fungsi-fungsi antara lain dan tidak terbatas pada:

1. Fungsi Penjaminan Bank dan Non-Bank;
2. Fungsi Penjaminan Syariah;
3. Fungsi Manajemen Risiko, Klaim, dan Subrogasi;
4. Fungsi Keuangan, SDM, dan Umum;
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan, Hukum, dan Teknologi Informasi.
6. Fungsi Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

In carrying out its business operations, PT Jamkrida Jabar has an organizational structure that includes functions including but not limited to:

1. Bank and Non-Bank Guarantee Functions;
2. Sharia Guarantee Function;
3. Risk Management, Claims, and Subrogation Functions;
4. Finance, Human Resources, and General Functions;
5. Functions of Corporate Secretary, Legal, and Information Technology;
6. Functions of the Internal Supervisory Unit and Obedience.

Profil Perusahaan Company Profile





KINERJA PERSEROAN

COMPANY PERFORMANCE

TINJAUAN EKONOMI

Economic Review

Lembaga Penjamin atau Perusahaan Penjaminan merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada KUMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan KUMKM baik daerah maupun nasional.

Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar KUMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada KUMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang unbankable tetapi eligible akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta

Guarantee Institutions or Guarantee Companies are special financial institutions that play a role in encouraging business independence and empowering the business world as well as increasing access for the business world, especially Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs), and other prospective businesses to sources of financing.

The existence of a Guarantee Institution is urgently needed to foster the confidence of the banking industry in extending credit to CMSMEs. The role of the Guarantee Institution is currently very important, to oversee the growth and development of CMSMEs both regionally and nationally.

One of the inherent characteristics of most CMSMEs and at the same time being the source of the problem is the weak capital structure and lack of access to sources of financing (both banking and non-banking financial institutions) caused by limited collateral.

Credit guarantees are usually given to CMSMEs that do not meet banking requirements in lending (*unbankable*) but have good business prospects (*eligible*), among others, because their products are ordered or demanded by the market. With credit guarantees, MSMEs that are unbankable but eligible will find it easier to get injections of funds from banks with guarantees provided by the Guarantee Agency.

West Java Province as one of the most advanced provinces in Indonesia with a high level of economic growth and with a maintained level of

dengan tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah KUMKM.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah KUMKM di Jawa Barat, serta ketersediaan fasilitas penjaminan kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri penjaminan kredit khususnya di Jawa Barat untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dengan menjalankan "vision & mission statement" sesuai dengan niat awal pembentukan Perseroan sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dalam jangka panjang Perseroan akan menjadi "Perusahaan Penjaminan Kredit Pilihan Masyarakat Jawa Barat" tentunya, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Maka Produk Penjaminan Kredit dan jasa konsultasi pengembangan UMKM dalam mengakses perbankan menjadi jasa utama perusahaan.

macroeconomic stability, will encourage growth in the number of CMSMEs.

Along with economic growth and the number of CMSMEs in West Java, as well as the availability of credit guarantee facilities, this will have an impact on increasing demand for credit and will provide opportunities for the credit guarantee industry, especially in West Java, to grow sustainably in the future.

By carrying out the "vision & mission statement" with the initial intention of establishing the Company as a Regional Credit Guarantee Institution, in the long term the Company will become the "Credit Guarantee Company of Choice for the West Java Community", of course, it will indirectly contribute to the economy of West Java. So Credit Guarantee Products and MSMEs development consulting services in accessing banking are the company's main services.

TINJAUAN PROSPEK MASA DEPAN

Future Business Prospect

Penyaluran kredit (baik *cash loan* maupun *non cash loan*) dari perbankan cenderung masih konservatif di era *new normal*, meskipun demikian industri penjaminan nyatanya tumbuh signifikan, terutama didorong amanat pemerintah agar pelaku industri penjaminan memperbesar penjaminan bagi para pelaku usaha (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Jumlah Perusahaan Penjaminan yang tercatat di OJK adalah sebanyak 22 Perusahaan, yaitu:

- 20 Perusahaan Penjaminan Konven (1 BUMN, 18 BUMD, 1 BUMS)
- 2 Perusahaan Penjaminan Syariah (2 Anak Usaha BUMN)

Berdasarkan Data OJK, menunjukkan bahwa Total Aset Perusahaan Penjaminan posisi Desember 2023 mencapai Rp46,41 triliun (Konven Rp40,88 triliun dan Syariah Rp 5,53 triliun) atau tumbuh sebesar 36,38% dibandingkan posisi Desember 2022 senilai Rp39.12 triliun (Konven Rp34.03 triliun dan Syariah Rp5.09 triliun).

Perusahaan Penjaminan/Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya UMKM dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal

Credit disbursement (both cash loans and non-cash loans) from banks tends to remain conservative in the new normal era, however, the guarantee industry has actually grown significantly, mainly driven by the government's mandate for guarantee industry players to increase guarantees for business actors (MSMEs) in the context of national economic recovery.

The number of guarantee companies registered with OJK is 22 companies, namely:

- 20 Convention Guarantee Companies (1 State Owned Enterprise/SOE, 18 Regional Owned Enterprise/ROE, 1 Private Owned Enterprise/POE)
- 2 Sharia Guarantee Companies (2 SOE Subsidiaries)

Based on OJK data, it shows that the Total Assets of Guarantee Companies as of December 2023 reached IDR 46.41 trillion (Convention IDR 40.88 trillion and Sharia IDR 5.53 trillion) or grew by 36.38% compared to the position in December 2022 of IDR 39.12 trillion (Convention IDR 34.03 trillion and Sharia IDR 5.09 trillion).

Guarantee Companies / Guarantee Institutions are special financial institutions that play a role in encouraging business independence and empowering the business world and increasing access for the business world, especially MSMEs and other prospective businesses to sources of financing.

The existence of the Guarantee Institution is needed to foster the confidence of the banking industry in channeling credit to MSMEs. The role of the Insurance Agency is currently very important to oversee the growth and

pertumbuhan dan perkembangan UMKM baik daerah maupun nasional.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (unbankable) namun memiliki prospek bisnis yang baik (eligible) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang unbankable tetapi eligible akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Dalam mendorong pengembangan usaha penjaminan kredit, Perseroan akan terus berupaya memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perseroan menggunakan konsep market driven dalam memetakan pasar-pasar yang potensial (baik wilayah maupun mitra kerja), mengidentifikasi kebutuhan pasar (mitra kerja), mengumpulkan dan meng-update kondisi pasar termasuk pesaing. Hal-hal tersebut akan menunjang kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam membuat profil risiko dan kebijakan yang akan diambil.

Perseroan secara periodik akan melakukan review, memperbarui, dan melengkapi *Standard Operating Procedure* (SOP) di seluruh bagian (unit kerja) dan juga melakukan review atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan organisasi secara menyeluruh sekalipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Perseroan juga secara periodik akan melakukan *review* atas Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kondisi pasar, evaluasi kerja sama resiprokal, membuka peluang kerja sama penjaminan bersama (co-guarantee) dengan perusahaan penjaminan lain, membuka peluang kerja sama produk (co-branding) dengan perusahaan asuransi (jiwa dan umum), melakukan *gathering, sharing session*, dan sosialisasi bisnis penjaminan, dan

development of MSMEs both regionally and nationally.

Credit guarantees are usually given to MSMEs that have not met banking requirements in lending credit (unbankable) but have good business prospects (eligible), among others because their products are widely ordered or demanded by the market. With credit guarantees, unbankable but eligible MSMEs will more easily get an injection of funds from banks with guarantees provided by the Insurance Corporation.

In encouraging the development of the credit guarantee business, the Company will continue to strive to expand its marketing network and partnerships while still adhering to the principles of prudence and risk management. The Company uses the market driven concept in mapping potential markets (both regions and partners), identifying market needs (partners), collecting and updating market conditions including competitors. These things will support the completeness and accuracy of the data needed in making risk profiles and policies to be taken.

The Company will periodically review, update, and complete Standard Operating Procedures (SOP) in all sections (work units) and also review the Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) so that it is expected to accommodate the needs of the organization as a whole even though the implementation is carried out gradually.

In addition, the Company will also periodically review Cooperation Agreements adjusted to market conditions, evaluate reciprocal cooperation, open opportunities for co-guarantee cooperation with other guarantee companies, open opportunities for product cooperation (co-branding) with insurance companies (life and general), conduct gatherings, sharing sessions, and socialization of guarantee business, and development of information technology-based services.

pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut berlaku efektif pada 31 Agustus 2021. Ketentuan ini mengatur rasio penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang semula paling sedikit 20% menjadi paling sedikit sebesar 30% pada tahun 2024.

Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya. Disisi lain hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan sektor produktif sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

In line with the issuance of Bank Indonesia Regulation (PBI) Number: 23/13/PBI/2021 concerning the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. The regulation became effective on August 31, 2021. This regulation regulates the ratio of bank lending to the MSME sector from at least 20% to at least 30% in 2024.

This policy provides broader options for banks to participate in financing MSMEs, low-income communities, and other inclusive financing. On the other hand, this is an opportunity for the Company to continue to increase its participation in the development of the productive sector in accordance with the mandate given by the West Java Provincial Government.

TINJAUAN BISNIS

Business Review

Kinerja bisnis penjaminan PT Jamkrida Jabar pada 2023 dinilai telah mengalami peningkatan, dan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Volume Kredit tahun 2023 adalah senilai Rp14,52 triliun atau terealisasi sebesar 119,80% dari RKAP 2023, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp8,60 triliun (terealisasi 140,41%) dan Non Produktif senilai Rp5,91 triliun (terealisasi 98,72%). Volume Kredit tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 81,98% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun Volume Pembiayaan Unit Usaha Syariah tahun 2023 terealisasi senilai Rp5,71 triliun atau terealisasi sebesar 382,14% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 320,72% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

- b. Volume Penjaminan tahun 2023 adalah senilai Rp10,85 triliun atau terealisasi sebesar 106,58% dari RKAP 2023, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp5,16 triliun (terealisasi 101,31%) dan Non Produktif senilai Rp5,08 triliun (terealisasi 111,85%). Volume Penjaminan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 59,75% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun Volume Kafalah Unit Usaha Syariah tahun 2023 terealisasi senilai Rp3,15 triliun atau terealisasi sebesar 274,91% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 263,65% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The performance of PT Jamkrida Jabar's guarantee business in 2023 is considered to have improved, and in general, it can be described as follows:

- a. The Credit Volume in 2023 was IDR 14.52 trillion or realized 119.80% of the BP 2023, of which Productive Credit Volume was worth IDR 8.60 trillion (realized 140.41%) and Non-Productive was IDR 5.91 trillion (realized 98.72%). The Credit Volume in 2023 grew by 81.98% compared to the realization in 2022.

The Sharia Business Unit Financing Volume in 2023 was realized at IDR 5.71 trillion or realized by 382.14% of the BP 2023 and grew by 320.72% compared to the realization in 2022.

- b. The Guarantee Volume in 2023 is IDR 10.85 trillion or 106.58% realized from the BP 2023, where the Productive Guarantee Volume is IDR 5.16 trillion (101.31% realized) and the Non-Productive Guarantee Volume is IDR 5.08 trillion (111.85 realized %). Guarantee Volume in 2023 grew by 59.75% compared to the realization in 2022.

The Kafalah Volume of Sharia Business Units in 2023 was realized at IDR 3.15 trillion or realized by 274.91% of the BP 2023 and grew by 263.65% when compared to the realization in 2022.

- c. Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2023 adalah senilai Rp275,98 miliar atau terealisasi sebesar 126,31% dari RKAP 2023, dimana volume IJP Produktif senilai Rp82,74 miliar (terealisasi 124,88%) dan Non Produktif senilai Rp193,24 miliar (terealisasi 126,93%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 39,35% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun Pendapatan IJK Cash Basis Unit Usaha Syariah tahun 2023 terealisasi senilai Rp44,82 miliar atau terealisasi sebesar 258,92% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 188,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

- d. Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp230,93 miliar atau terealisasi sebesar 108,24% dari RKAP 2023, dimana volume IJP Produktif senilai Rp61,37 miliar (terealisasi 91,27%) dan Non Produktif senilai Rp169,56 miliar (terealisasi 116,05%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 42,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun Pendapatan IJK Accrual Basis Unit Usaha Syariah tahun 2023 terealisasi senilai Rp35,98 miliar atau terealisasi sebesar 205,86% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 168,08% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

- e. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 adalah sebanyak 1.014.293 unit atau terealisasi sebesar 835,98% dari RKAP 2023. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1.246,02% jika dibandingkan tahun 2022.

- c. Cash Basis Guarantee Service Fee Income in 2023 was IDR 275.98 billion or realized 126.31% of the BP 2023, where the Productive Guarantee Service Fee volume was IDR 82.74 billion (realized 124.88%) and Non-Productive Guarantee Service Fee was IDR 193.24 billion (realized 126.93%). Cash Basis Guarantee Service Fee income in 2023 grew by 39.35% compared to the realization in 2022.

The revenue of Kafalah Service Fee Cash Basis Sharia Business Unit in 2023 was realized at IDR 44.82 billion or realized by 258.92% of the BP 2023 and grew by 188.91% compared to the realization in 2022.

- d. Accrual Basis Guarantee Service Fee Income in 2023 is IDR 230.93 billion or realized at 108.24% of the BP 2023, where the Productive Guarantee Service Fee volume is IDR 61.37 billion (realized 91.27%) and Non-Productive Guarantee Service Fee is IDR 169.56 billion (realized 116.05%). Accrual Basis Guarantee Fee Income in 2023 increased by 42.63% compared to the realization in 2022.

Meanwhile, the revenue of Kafalah Service Fee Accrual Basis Sharia Business Unit in 2023 was realized at IDR 35.98 billion or realized by 205.86% of the BP 2023 and grew by 168.08% compared to the realization in 2022.

- e. The number of Guaranteed CMSMEs in 2023 is 1,014,293 units or realized at 835.98% of the BP 2023. The number of Guaranteed CMSMEs in 2023 grew by 1,246.02% compared to 2022.

Adapun Jumlah KUMKM Terjamin Unit Usaha Syariah tahun 2023 terealisasi sebanyak 995.364 unit atau terealisasi sebesar 1.719,41% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 1.676,93% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The number of Guaranteed CMSMEs Sharia Business Units in 2023 was realized as many as 995,364 units or realized by 1,719.41% of the BP 2023 and grew by 1,676.93% compared to the realization in 2022.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2023

AS OF DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
ASET					
ASSETS					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	191,272.94	263,992.69	228,216.19	86.45%	19.31%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(878.88)	(3,486.24)	(539.94)	15.49%	-38.56%
Surat Berharga Marketable Securities	104,755.20	147,610.03	148,439.70	100.56%	41.70%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(20.86)	(426.61)	-	0.00%	-100.00%
Piutang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Receivables	83,488.98	51,501.63	134,870.10	261.88%	61.54%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(5,226.12)	(8,003.28)	(5,668.42)	70.83%	8.46%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	10,024.53	10,411.54	22,145.01	212.70%	120.91%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(213.56)	(756.35)	(213.56)	28.24%	0.00%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	23,747.69	25,278.51	30,791.30	121.81%	29.66%
Piutang Lain-Lain Other Receivables	672.90	457.29	223.79	48.94%	-66.74%
Properti Investasi Investment Property	2,495.10	2,495.10	2,626.97	105.29%	5.29%
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	410,117.93	489,074.30	560,891.13	114.68%	36.76%
ASET TIDAK LANCAR					
NON-CURRENT ASSETS					
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	75,907.55	67,470.14	99,244.91	147.09%	30.74%
Aset Tetap - Bersih Net Fixed Assets	13,361.22	12,174.55	12,694.10	104.27%	-4.99%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	5,840.94	7,564.44	3,642.07	48.15%	-37.65%
Aset Lain-Lain Other Assets	272.28	956.66	1,218.01	127.32%	347.34%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON-CURRENT ASSETS	95,381.98	88,165.79	116,799.09	132.48%	22.45%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	505,499.91	577,240.09	677,690.22	117.40%	34.06%

LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2023
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT TERM LIABILITIES					
Utang Pajak Taxes Payable	1,251.73	474.23	3,832.87	808.23%	206.20%
Utang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Payable	38,197.83	28,854.94	96,310.58	333.78%	152.14%
Utang Klaim Claim Payable	-	-	-	0.00%	0.00%
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	4,158.53	494.94	4,763.23	962.39%	14.54%
Penampungan Sementara Temporary Shelter	17,652.89	11,266.08	24,573.60	218.12%	39.20%
Utang Lancar Lainnya Other Current Payables	33.24	2,970.87	12.50	0.42%	-62.40%
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	37,521.72	37,317.50	75,910.27	203.42%	102.31%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	98,815.95	81,378.56	205,403.06	252.40%	107.86%
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES					
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	128,048.37	116,044.47	130,228.90	112.22%	1.70%
Cadangan Klaim Claim Reserve	15,062.09	20,968.35	19,265.17	91.88%	27.91%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Employee Benefits Liabilities	1,975.74	2,779.80	2,422.33	87.14%	22.60%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM LIABILITIES	145,086.20	139,792.62	151,916.40	108.67%	4.71%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	243,902.15	221,171.18	357,319.46	161.56%	46.50%
EKUITAS EQUITY					
Modal Capital Stock	203,200.00	300,000.00	260,280.00	86.76%	28.09%
Cadangan Umum General Reserve	44,817.71	48,545.95	50,195.71	103.40%	12.00%
Saldo Laba Retained Earnings	15,202.05	8,189.58	10,155.23	124.00%	-33.20%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga Difference in The Fair Value of Securities	(1,340.13)	(569.21)	22.85	-4.01%	-101.70%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Difference in Remeasurement of Post-Employee Benefits Liability	(281.87)	(97.40)	(283.03)	290.59%	0.41%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	261,597.76	356,068.92	320,370.76	89.97%	22.47%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	505,499.91	577,240.09	677,690.22	117.40%	34.06%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023

FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
PENDAPATAN PENJAMINAN GUARANTEE INCOME					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah Guarantee/Kafala Service Fee	166,944.97	213,351.91	236,550.79	110.87%	41.69%
Beban Akuisisi Acquisition Expenses	(24,228.09)	(32,057.93)	(35,601.46)	111.05%	46.94%
Restitusi IJP Restitution of Guarantee Fee	(5,039.82)	-	(5,621.01)	0.00%	11.53%
Management Fee Management Fee	19,458.76	13,004.23	27,629.98	212.47%	41.99%
Beban Regaransi Re-Guarantee Expenses	(73,770.80)	(84,867.84)	(108,944.08)	128.37%	47.68%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN TOTAL GUARANTEE INCOME	83,365.03	109,430.38	114,014.22	104.19%	36.77%
KLAIM CLAIM					
Beban Klaim Claim Expenses	(50,775.51)	(76,016.65)	(82,747.34)	108.85%	62.97%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim Recovery (Establishment) in Reserve Claim	625.62	(1,882.09)	(2,366.66)	125.75%	-478.29%
JUMLAH KLAIM TOTAL CLAIM	(50,149.90)	(77,898.74)	(85,114.00)	109.26%	69.72%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH GUARANTEE INCOME - NET	33,215.14	31,531.64	28,900.22	91.65%	-12.99%
PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME	13,279.74	18,776.25	18,302.70	97.48%	37.82%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME	1,924.57	3,072.77	2,519.76	82.00%	30.93%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)	1,543.40	(5,202.89)	(2,008.01)	38.59%	-230.10%
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES					
Beban Operasional Operating Expenses	(3,936.84)	(5,894.92)	(6,143.01)	104.21%	56.04%
Beban Sumber Daya Manusia Human Resource Expenses	(18,966.64)	(22,717.85)	(21,445.49)	94.40%	13.07%
Beban Administrasi & Umum General and Administrative Expenses	(6,574.67)	(9,117.00)	(6,870.80)	75.36%	4.50%
JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL OPERATING EXPENSES	(29,478.16)	(37,729.76)	(34,459.30)	91.33%	16.90%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK EARNINGS BEFORE TAX	20,484.68	10,448.00	13,255.36	126.87%	-35.29%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES	(5,282.63)	(2,258.42)	(3,100.13)	137.27%	-41.31%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN EARNINGS AFTER TAX	15,202.05	8,189.58	10,155.23	124.00%	-33.20%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	(955.39)	-	1,361.82	0.00%	-242.54%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	14,246.66	8,189.58	11,517.05	140.63%	-19.16%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

Berdasarkan data pada tabel Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Total Aset

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp677,69 miliar atau sebesar 117,40% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 34,06% jika dibandingkan tahun 2022.

2. Total Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp320,70 miliar atau sebesar 89,97% dari RKAP 2023 yang ditargetkan senilai Rp356,07 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 22,47% jika dibandingkan tahun 2022.

3. Laba (Rugi)

Pada Tahun 2023 Perseroan membukukan Laba Bersih senilai Rp10,16 miliar atau sebesar 124% dari RKAP 2023 yang ditargetkan senilai Rp8,19 miliar, namun mengalami penurunan sebesar 19,16% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.

4. Pendapatan Penjaminan

Pada Tahun 2023 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp114,01 miliar atau mencapai 104,19% dari RKAP 2023 dan tumbuh sebesar 36,77% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.

5. Pendapatan Investasi

Pada Tahun 2023 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp18,30 miliar atau mencapai 97,48% dari RKAP 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 37,82% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.

Based on the data in the table of Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss & Other Comprehensive Income above, it can generally be explained that:

1. Total Assets

The Company's Total Assets as of 31 December, 31, 2023 were IDR 677.69 billion or 117.40% of the BP 2023 and grew by 34.06% compared to 2022.

2. Total Equity

The Company's Total Equity as of December, 31, 2023 was IDR 320.70 billion or 89.97% of the BP 2023 which was targeted at IDR 356.07 billion and grew by 22.47% compared to 2022.

3. Profit (Loss)

In 2023, the Company posted a Net Profit of IDR 10.16 billion or 124% of the BP 2023 which was targeted at IDR 8.19 billion, but decreased by 19.16% compared to the 2022 results.

4. Guarantee Income

In 2023, the Company recorded Guarantee Income worth IDR 114.01 billion or reached 104.19% of the BP 2023 and grew by 36.77% compared to 2022 results.

5. Investment Income

In 2023 the Company obtained Investment Income worth IDR 18.30 billion or reached 97.48% of the BP 2023 and increased by 37.82% compared to 2022 results.

6. Pendapatan Subrogasi

Pada Tahun 2023 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp2,52 miliar atau mencapai 82% dari RKAP 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 30,93% jika dibandingkan perolehan tahun 2022.

7. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Pada Tahun 2023 Perseroan mengakui Beban Lain-Lain senilai Rp2 miliar, sedangkan pada tahun 2022 mencatat Pendapatan Lain-lain senilai Rp1,54 miliar. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 230,10%.

8. Total Klaim

Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2023 adalah senilai Rp82,75 miliar atau mencapai 108,85% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 62,97% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

9. Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan di Tahun 2023 adalah senilai Rp34,46 miliar atau mencapai 91,33% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 16,90% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

6. Subrogation Income

In 2023, the Company obtained Subrogation Income worth IDR 2.52 billion or reached 82% of the BP 2023 and increased by 30.93% compared to 2022 results.

7. Other Income (Expenses)

In 2023 the Company recognized Other Expenses worth IDR 2 billion, while in 2022 it recorded Other Income worth IDR 1.54 billion. This means decreased by 230.10%.

8. Total Claims

The Total Net Claims paid by the Company in 2023 are IDR 82.75 billion or 108.85% of the BP 2023 and increased by 62.97% compared to the realization in 2022.

9. Operating Expenses

The Company's Operating Expenses in 2023 were IDR 34.46 billion or reached 91.33% of the BP 2023 and increased by 16.90% compared to the realization in 2022.

TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review

A. ASPEK PENJAMINAN

Guarantee Aspect

VOLUME KREDIT
CREDIT VOLUME
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	3,502,139.48	6,128,005.30	8,604,277.25	140.41%	145.69%
b. Non Produktif Non Productive	4,474,217.77	5,988,230.27	5,911,382.49	98.72%	32.12%
JUMLAH TOTAL	7,976,357.24	12,116,235.57	14,515,659.74	119.80%	81.98%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	1,313,930.83	1,347,804.24	2,081,052.52	154.40%	58.38%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	109,577.97	122,424.59	148,111.43	120.98%	35.17%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	655,533.65	598,054.43	4,240,284.05	709.01%	546.84%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	236,521.34	288,201.16	178,435.31	61.91%	-24.56%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	719,326.24	814,992.19	1,431,750.99	175.68%	99.04%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	459,561.22	2,532,528.69	506,726.41	20.01%	10.26%
g. Surety Bond	7,688.24	424,000.00	17,916.55	4.23%	133.04%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	4,474,217.77	5,988,230.27	5,911,382.49	98.72%	32.12%
JUMLAH TOTAL	7,976,357.24	12,116,235.57	14,515,659.74	119.80%	81.98%

Volume Kredit tahun 2023 adalah senilai Rp14,52 triliun atau terealisasi sebesar 119,80% dari RKAP 2023, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp8,60 triliun (terealisasi 140,41%) dan Non Produktif senilai Rp5,91 triliun (terealisasi 98,72%). Volume Kredit tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 81,98% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The Credit Volume in 2023 was IDR 14.52 trillion or realized 119.80% of the BP 2023, of which Productive Credit Volume was IDR 8.60 trillion (realized 140.41%) and Non-Productive was IDR 5.91 trillion (realized 98.72%). The Credit Volume in 2023 grew by 81.98% compared to the realization in 2022.

VOLUME PENJAMINAN
GUARANTEE VOLUME
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	2,386,079.16	5,097,418.27	5,164,414.62	101.31%	116.44%
b. Non Produktif Non Productive	4,407,408.14	5,085,823.54	5,688,516.37	111.85%	29.07%
JUMLAH TOTAL	6,793,487.29	10,183,241.81	10,852,930.99	106.58%	59.75%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	765,835.14	825,628.68	1,171,550.16	141.90%	52.98%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	76,704.58	85,161.75	103,678.00	121.74%	35.17%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	325,054.52	334,215.90	2,173,996.83	650.48%	568.81%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	236,521.34	288,201.16	177,230.81	61.50%	-25.07%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	514,714.13	607,681.69	1,013,315.86	166.75%	96.87%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	459,561.22	2,532,529.09	506,726.41	20.01%	10.26%
g. Surety Bond	7,688.24	424,000.00	17,916.55	4.23%	133.04%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	4,407,408.14	5,085,823.54	5,688,516.37	111.85%	29.07%
JUMLAH TOTAL	6,793,487.29	10,183,241.81	10,852,930.99	106.58%	59.75%

Volume Penjaminan tahun 2023 adalah senilai Rp10,85 triliun atau terealisasi sebesar 106,58% dari RKAP 2023, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp5,16 triliun (terealisasi 101,31%) dan Non Produktif senilai Rp5,69 triliun (terealisasi 111,85%). Volume Penjaminan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 59,75% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The Guarantee Volume in 2023 is IDR 10.85 trillion or 106.58% realized from the BP 2023, where the Productive Guarantee Volume is IDR 5.16 trillion (101.31% realized) and the Non-Productive Guarantee Volume is IDR 5.69 trillion (111.85 realized %). Guarantee Volume in 2023 will increase by 59.75% compared to the realization in 2022.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MENENGAH

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Menengah tahun 2023 adalah senilai Rp1,171,55 miliar atau mencapai 141,90% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 52,98% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

MEDIUM BUSINESS CREDIT GUARANTEE

The realization of Medium Business Credit Guarantee Volume in 2023 was IDR 1,171.55 billion or reached 141.90% of the BP 2023 and experienced growth of 52.98% compared to the realization in 2022.

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Kecil tahun 2023 adalah senilai Rp103,68 miliar atau mencapai 121,74% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 35,17% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

SMALL BUSINESS CREDIT GUARANTEE

The realization of Small Business Credit Guarantee Volume in 2023 was IDR 103.68 billion or reached 121.74% of the BP 2023 and experienced growth of 35.17% compared to the realization in 2022.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Mikro tahun 2023 adalah senilai Rp2.173,99 miliar atau mencapai 650,48% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 568,81% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

MICRO BUSINESS CREDIT GUARANTEE

The realization of Micro Business Credit Guarantee Volume in 2023 was IDR 2,173.99 billion or reached 650.48% of the BP 2023 and experienced significant growth of 568.81% compared to the realization in 2022.

PENJAMINAN KREDIT KOPERASI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Koperasi tahun 2023 adalah senilai Rp177,23 miliar atau hanya mencapai 61,50% dari RKAP 2023 dan mengalami penurunan sebesar 25,07% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

COOPERATIVE CREDIT GUARANTEE

The realization of the Cooperative Credit Guarantee Volume in 2023 was IDR 177.23 billion or only reached 61.50% of the BP 2023 and experienced a decrease of 25.07% compared to the realization in 2022.

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2023 adalah senilai Rp1.013,32 miliar atau mencapai 166,75% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 96,87% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

CONSTRUCTION CREDIT GUARANTEE

The realization of Construction Credit Guarantee Volume in 2023 was IDR 1,013.32 billion or reached 166.75% of the BP 2023 and an increase of 96.87% compared to the realization in 2022.

BANK GARANSI

Realisasi Volume Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) tahun 2023 adalah senilai Rp506,73 miliar atau hanya mencapai 20,01% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 10,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

BANK GUARANTEE

The realization of Contra Bank Guarantee Volume in 2023 was IDR 506.73 billion or only reached 20.01% of the BP 2023 and experienced growth of 10.26% compared to the realization in 2022.

SURETY BOND

Realisasi Volume *Surety Bond* tahun 2023 adalah senilai Rp17,92 miliar atau hanya

SURETY BOND

The realization of Surety Bond Volume in 2023 is IDR 17.92 billion or only 4.23% of the BP 2023

mencapai 4,23% dari RKAP 2023 (memang masih ditargetkan kecil mengingat produk ini belum menjadi prioritas dan *head to head* dengan Kontra Bank Garansi) dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,23% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

(indeed, it is still targeted to be small considering that this product has not yet become a priority and is head to head with Bank Guarantee Contracts) and experienced growth of 4.23% when compared to the realization in 2022.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2023 adalah senilai Rp5,69 triliun atau mencapai 111,85% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 29,07% jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Meskipun mengalami pertumbuhan, Perseroan pada tahun 2023 tetap mengambil kebijakan untuk lebih selektif dan membatasi akseptasi Penjaminan Multiguna (Non Produktif) tidak terkecuali dari mitra utama agar rasio penjaminan usaha produktif tetap terjaga sesuai ketentuan OJK paling sedikit 25%.

MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE

The realization of the Multipurpose Credit Guarantee Volume in 2023 was IDR 5.69 trillion or reached 111.85% of the BP 2023 an increase of 29.07% compared to the realization in 2022. Despite experiencing growth, the Company in 2023 will continue to take a policy to be more selective and limit the acceptance of Multi-Purpose (Non-Productive) Guarantees including from main partners so that the productive business guarantee ratio is maintained by Financial Services Authority regulations of at least 25%.

IMBAL JASA PENJAMINAN CASH BASIS
CASH BASIS GUARANTEE SERVICE FEE
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	49,975.16	66,259.78	82,743.13	124.88%	65.57%
b. Non Produktif Non Productive	148,079.28	152,240.17	193,242.43	126.93%	30.50%
JUMLAH TOTAL	198,054.44	218,499.94	275,985.57	126.31%	39.35%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	27,844.61	26,345.06	35,252.61	133.81%	26.60%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	3,404.02	3,956.43	5,014.80	126.75%	47.32%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	5,294.88	5,626.11	22,330.45	396.91%	321.74%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	3,173.14	3,758.15	2,300.20	61.21%	-27.51%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	6,564.65	6,894.77	13,405.70	194.43%	104.21%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	3,620.28	18,754.25	4,372.11	23.31%	20.77%
g. Surety Bond	73.59	925.00	67.26	7.27%	-8.60%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	148,079.28	152,240.17	193,242.43	126.93%	30.50%
JUMLAH TOTAL	198,054.44	218,499.94	275,985.57	126.31%	39.35%

Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2023 adalah senilai Rp275,99 miliar atau terealisasi sebesar 126,31% dari RKAP 2023, dimana volume IJP Produktif senilai Rp82,74 miliar (terealisasi 124,88%) dan Non Produktif senilai Rp193,24 miliar (terealisasi 126,93%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 39,35% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Cash Basis Guarantee Service Fee income in 2023 is IDR 275.99 billion or realized 126.31% of the BP 2023, where the Productive Guarantee Service Fee volume is IDR 82.74 billion (realized 124.88%) and Non-Productive Guarantee Service Fee is IDR 193.24 billion (realized 126.93%). Cash Basis Guarantee Service Fee income in 2023 will experience a growth of 39.35% compared to the realization in 2022.

IMBAL JASA PENJAMINAN ACCRUAL BASIS*)
ACCRUAL BASIS GUARANTEE SERVICE FEE*)
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	42,219.93	67,240.98	61,372.24	91.27%	45.36%
b. Non Produktif Non Productive	119,685.22	146,110.93	169,557.54	116.05%	41.67%
JUMLAH TOTAL	161,905.16	213,351.91	230,929.79	108.24%	42.63%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	21,109.92	25,717.46	24,641.57	95.82%	16.73%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	2,707.28	4,073.11	3,244.45	79.66%	19.84%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	4,610.90	6,172.17	16,471.98	266.88%	257.24%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	2,715.42	3,927.74	2,074.33	52.81%	-23.61%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	7,424.01	8,221.00	10,811.57	131.51%	45.63%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	3,618.71	18,256.74	4,050.42	22.19%	11.93%
g. Surety Bond	33.71	872.76	77.91	8.93%	131.11%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	119,685.22	146,110.93	169,557.54	116.05%	41.67%
JUMLAH TOTAL	161,905.16	213,351.91	230,929.79	108.24%	42.63%

(*) termasuk restitusi IJP

(*) including Guarantee Service Fee restitution

Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp230,93 miliar atau terealisasi sebesar 108,24% dari RKAP 2023, dimana volume IJP Produktif senilai Rp61,37 miliar (teralisasi 91,27%) dan Non Produktif senilai Rp169,56 miliar (teralisasi 116,05%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 42,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The Accrual Basis Guarantee Service Fee income in 2023 is IDR 230.93 billion or realized 108.24% of the BP 2023, where the Productive Guarantee Service Fee volume is IDR 61.37 billion (realized 91.27%) and Non-Productive Guarantee Service Fee is IDR 169.56 billion (realized 116.05%). The Accrual Basis Guarantee Service Fee income in 2023 will increase by 42.63% compared to the realization in 2022.

JUMLAH KUMKM
NUMBER OF CMSMEs
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam satuan unit/in units

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	2,298	1,220	17,499	1434.34%	661.49%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	674	945	742	78.52%	10.09%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	61,554	66,883	987,905	1477.06%	1504.94%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	3,962	5,628	2,984	53.02%	-24.68%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	1,186	2,513	1,129	44.93%	-4.81%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	5,114	42,270	3,820	9.04%	-25.30%
g. Surety Bond	567	1,871	214	11.44%	-62.26%
JUMLAH TOTAL	75,355	121,330	1,014,293	835.98%	1246.02%

Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 adalah sebanyak 1.014.293 unit atau terealisasi sebesar 835,98% dari RKAP 2023. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 1.246,02% jika dibandingkan tahun 2022.

The number of Guaranteed CMSMEs in 2023 is 1,014,293 units or 835.98% of the BP 2023 realized. The number of Guaranteed KUMKM in 2023 experienced significant growth of 1,246.02% compared to 2022.

B. ASPEK MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Aspect

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis disetiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang ada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau *opportunity* secara lebih sistematis.

The Risk Management Process of PT Jamkrida Jabar is a process carried out to manage the risks inherent in each business process in every part and level in the company so as to provide confidence in achieving goals and reduce the uncertainty inherent in an existing business process that will eventually create opportunities or opportunities more systematically.

Secara umum, proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko

In general, the risk management process implemented consists of 4 main stages, namely:

1. Risk identification

2. Penilaian risiko (*risk assessment*)
3. Penanganan risiko (*risk response*)
4. Monitoring dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative* (risiko *moral hazard*). Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara mempersyaratkan agunan, pembentukan cadangan klaim, penjaminan ulang dan penjaminan bersama dengan Perusahaan Penjaminan sejenis ataupun Perusahaan Asuransi (*re-guarantee* dan *co-guarantee*).

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar masih bersifat periodik dan insidental. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap penjaminan per skim kredit per mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi Perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerja sama baru, penempatan deposito, pembelian obligasi dan instrumen investasi lain, dan lain sebagainya). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas dalam Rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan pun memiliki beberapa komite dibawah Direksi, yaitu Komite Penjaminan, Komite Investasi, dan Komite Klaim yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk

2. Risk assessment
3. Risk response
4. Monitoring and evaluation

In carrying out credit guarantees, companies must stick to prudential principles so that they are expected to reduce guarantee risks, claim risks, financial risks, legal risks, and other risks that have the potential to harm the company.

Guarantee companies are particularly vulnerable to risk. In general, the characteristics of assurance risk are speculative (moral hazard risk). Some of the strategies carried out by the Company in mitigating guarantee risk are by requiring collateral, forming claim reserves, re-guaranteeing and joint guarantees with similar guarantee companies or insurance companies (re-guarantee and co-guarantee).

Risk Management activities of PT Jamkrida Jabar are still periodic and incidental. Where periodically, especially in monthly and quarterly reports, the risk profile of each guarantee per credit scheme per business partner is displayed so that it can be used as a benchmark and decision making when the risk profile shows indications of losses for the Company in the future. For the implementation of incidental risk management in the form of risk management studies related to the assessment of activities to be taken by the Company (business partner studies in the framework of new cooperation, deposit placement, purchase of bonds and other investment instruments, and so on). The results of the risk analysis and assessment will be discussed in the Management Meeting of PT Jamkrida Jabar to determine the risk mitigation to be carried out.

The Company also has several committees under the Board of Directors, namely the Guarantee Committee, Investment Committee, and Claims Committee which regularly hold

membahas, membuat analisa, merumuskan, mengawasi, serta melaksanakan kebijakan yang telah atau akan diambil oleh manajemen.

Komite Penjaminan memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan, serta melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan.

Komite Investasi memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Komite Klaim memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan, melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim, serta memberikan keputusan klaim.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021, diantaranya:

1. Melakukan *review* dan perubahan perjanjian kerja sama (PKS) mitra penjaminan dengan prinsip *profitable* dan berbasis risiko.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko dengan skema reasuransi kepada NasionalRe dan IndonesiaRe (konvensional dan syariah) dan beberapa perusahaan penjaminan dengan skema kogaransi.
3. Melakukan optimalisasi pendapatan investasi berbasis resiprokal dan *profitable*

joint meetings to discuss, analyze, formulate, supervise, and implement policies that have been or will be taken by management.

The Guarantee Committee has the main task of assisting the Board of Directors in formulating guarantee operational policies, supervising and implementing established guarantee operational policies, as well as conducting feasibility analysis and risk management of each guarantee application.

The Investment Committee has the main task of assisting the Board of Directors in formulating investment policies and supervising the implementation of established investment policies.

The Claims Committee has the main task of assisting the Board of Directors in formulating claim policies and supervising the implementation of established claim policies, conducting feasibility analysis and risk management of each claim application, and providing claim decisions.

With the existence of several committees under the Board of Directors, the Company can minimize the possibility of losses to the Company in the future.

Some of the risk mitigations carried out by the Company in 2021 include:

1. Review and change the cooperation agreement (PKS) of guarantee partners with profitable and risk-based principles.
2. Disseminate risks by placing part of the risk with a reinsurance scheme to NasionalRe and IndonesiaRe (conventional and sharia) and several guarantee companies with a guarantee scheme.
3. Optimizing reciprocal and profitable-based investment income while still paying

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

attention to the principle of prudence (*prudent*).

C. ASPEK KLAIM DAN SUBROGASI

Claim and Subrogation Aspect

KLAIM DAN SUBROGASI CLAIM AND SUBROGATION PERIODE 2023 PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
BEBAN KLAIM CLAIM EXPENSES					
a. Konvensional Conventional	47,896.27	73,828.62	95,154.94	128.89%	98.67%
b. Syariah Sharia	2,879.25	2,188.03	12,407.60	567.07%	330.93%
JUMLAH TOTAL	50,775.51	76,016.65	107,562.54	141.50%	111.84%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME					
a. Konvensional Conventional	1,702.67	2,907.92	1,751.07	60.22%	2.84%
b. Syariah Sharia	221.89	164.85	768.69	466.30%	246.43%
JUMLAH TOTAL	1,924.57	3,072.77	2,519.76	82.00%	30.93%

C.1. KLAIM

Claim

Total Klaim yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2023 adalah senilai Rp107,56 miliar atau mencapai 141,50% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 111,84% jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Mayoritas klaim yang dibayarkan bersumber dari pengajuan klaim atas Penjaminan Kredit Multiguna karena risiko jiwa dan klaim lainnya disebabkan oleh debitur/terjamin melakukan wanprestasi (macet).

Berkaitan dengan pengelolaan klaim, kendala yang dihadapi Perusahaan di tahun 2023 antara

The Total Claims paid by the Company in 2023 were IDR 107.56 billion or 141.50% of the BP 2023 and grew by 111.84% compared to the realization in 2022. The majority of claims paid came from submitting claims for the Multipurpose Credit Guarantee because the risk of life and other claims are caused by the debtor/guaranteed default.

In relation to claims management, the obstacles faced by the Company in 2023 include difficulties

lain kesulitan mendapatkan dukungan dari Perusahaan Reasuransi dalam bentuk treaty maupun fakultatif dan seiring dengan peningkatan beban klaim maka atas treaty terdahulu berdampak pada peningkatan piutang reasuransi.

Hal ini dikarenakan Industri Reasuransi di Indonesia sedang mengalami kondisi pasar yang sulit, terutama menimpa pada Perusahaan-perusahaan reasuransi 'plat merah' yang menjadi mitra Perusahaan. Dampak dari kondisi ini menyebabkan pembayaran kewajiban klaim (*claim recovery*) terhambat, sehingga mengakibatkan Perseroan terlebih dahulu menalangi kewajiban klaim pihak reasuransi kepada mitra.

Sampai dengan saat ini, belum ada perusahaan penjaminan ulang atau regaransi di Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan penjaminan kredit tidak memiliki banyak pilihan dalam mentransfer sebagian risikonya kepada sejumlah perusahaan reasuransi yang ada (jumlahnya masih sedikit).

in obtaining support from Reinsurance Companies in the form of treaties and facultative, and along with the increase in claims expenses, previous treaties have an impact on increasing reinsurance receivables.

This is because the Reinsurance Industry in Indonesia is experiencing difficult market conditions, especially affecting the 'red plate' reinsurance companies that are the Company's partners. The impact of this condition causes the payment of claim obligations (claim recovery) to be hampered, resulting in the Company first covering the reinsurer's claim obligations to partners.

Until now, there are no reinsurance or guarantee companies in Indonesia, so credit guarantee companies do not have many choices in transferring some of their risks to many existing reinsurance companies (the number is still small).

C.2. SUBROGASI

Subrogation

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dan penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan.

Pada Tahun 2023 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp2,51 miliar atau mencapai 82% dari RKAP 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 30,93% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2023 berasal dari subrogasi atas klaim penjaminan kredit usaha menengah, kredit usaha kecil,

Subrogation transfers billing rights and the collateral recipient to the guarantor after the collateral recipient receives payment of claims from the guarantor. The Company as the guarantor records the proceeds from subrogation collection as the Company's income.

In 2023, the Company will receive Subrogation Income worth IDR 2.51 billion or 82% of the BP 2023 and an increase of 30.93% compared to the realization in 2022.

The subrogation income in 2023 will come from the subrogation of guarantee claims for medium business credit, small business credit,

kredit usaha mikro, kredit konstruksi, bank garansi dan kredit multiguna dengan rincian sebagai berikut :

micro business credit, construction credit, bank guarantees, and multipurpose credit with the following details:

KOMPOSISI PENDAPATAN SUBROGASI
THE COMPOSITION OF SUBROGATION INCOME
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	SUBROGASI SUBROGATION	REGARANSI RE-GUARANTEE	NETTO
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY			
a. Produktif Productive	3,291.11	1,279.87	2,011.24
b. Non Produktif Non Productive	1,082.22	587.77	494.45
JUMLAH TOTAL	4,373.34	1,867.65	2,505.69
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY			
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	527.29	263.65	263.65
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	1,378.56	659.65	718.91
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	1,116.48	315.80	800.67
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	-	-	-
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	106.98	13.25	93.73
f. Bank Garansi Bank Guarantee	161.80	27.52	134.28
g. Surety Bond	-	-	-
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	1,082.22	587.77	494.45
JUMLAH TOTAL	4,373.34	1,867.65	2,505.69

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

To further increase subrogation revenue, the Company has taken the following steps:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan <i>update</i> data subrogasi setiap bulan secara rutin.2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (bank dan non bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun <i>on the spot</i> ke lapangan.3. Melakukan penagihan kepada Terjamin (debitur) secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) secara optimal.4. Menginventarisasi data agunan Terjamin (debitur) khususnya untuk kasus tertentu dimana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerja sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (bank dan non bank).5. Melakukan kerja sama penagihan piutang subrogasi dengan pihak ketiga. | <ol style="list-style-type: none">1. Update subrogation data every month regularly.2. Reconcile subrogation data periodically with related Guarantee Recipient branch offices (bank and non-bank) at least every 3 months, either by mail or on the spot to the field.3. Collect the Guaranteed (debtor) together with the Guarantee Recipient (bank and non-bank) optimally.4. Inventory the data of Guaranteed collateral (the debtor), especially for certain cases where the payment process is considered quite difficult or the customer is no longer able to make payments, and cooperate with the Guarantee Recipient (bank and non-bank) to sell collateral either through the auction process or through institutions appointed by the Guarantee Recipient (bank and non-bank).5. Cooperate in collecting subrogation receivables with third parties. |
|---|---|

Strategi subrogasi kedepan adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan penagihan piutang subrogasi serta menerapkan pola insentif (*collecting fee*) kepada mitra yang melakukan penagihan subrogasi kepada terjamin sesuai anggaran yang telah disediakan, serta bekerja sama dengan pihak ke 3 (perusahaan profesional yang bergerak dalam usaha penagihan subrogasi) sehingga pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

The future subrogation strategy is to increase monitoring and collection activities for subrogation receivables and apply incentive patterns (collecting fees) to partners who collect subrogation to guaranteed according to the budget provided, and cooperate with 3rd parties (professional companies engaged in subrogation collection business) so that subrogation income can be increased.

D. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources Aspect

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang oleh Perseroan sebagai salah satu unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) diterapkan manajemen dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

Human Resources (HR) is seen by the Company as one of the Company's elements that is very valuable and very important in the process of business activities. Understanding the importance of the role of HR for the Company, Competency-Based Human Resources Management (CBHRM) is implemented by management in the process of recruitment, placement, and coaching.

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, pada posisi 31 Desember 2023 Perseroan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang termasuk Pengurus Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

In carrying out its operational activities, until December 31, 2023, the Company is supported by Human Resources of 52 (fifty-two) people including the Company's Management with the following composition:

Perbandingan Jumlah SDM Realisasi 2023 dan 2022
Comparison of HR Recruitment of Realization 2023 and 2022

JABATAN <i>POSITION</i>	31 Desember 2023 <i>December 31, 2023</i>	31 Desember 2022 <i>December 31, 2022</i>
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1	2
Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory	2	2
Dewan Direksi Board of Directors	1	2
Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee	3	3
Kepala Divisi Head of Division	3	3
Kepala Bagian Head of Section	11	9
Staf Staff	18	18
Karyawan Kontrak Contract Employees	13	15
JUMLAH TOTAL	52	54

Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada perusahaan sehingga mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (performance target) yang telah ditetapkan.

The Company continues to be committed to managing and developing Human Resources (HR) to create quality human beings who have skills, work abilities, and work loyalty to the company to achieve predetermined performance targets.

Salah satu program pengembangan SDM yang dilakukan Perseroan adalah melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang

One of the HR development programs carried out by the Company is through education, training, and certification related to job descriptions in

berkaitan dengan job description di setiap unit kerja, seperti skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross functional training, team training, dan creativity training.

each work unit, such as skill training, retraining or retraining, cross-functional training, team training, and creativity training.

Adapun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang telah diikuti SDM Perseroan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The education, training, and certification programs that have been attended by the Company's HR during 2023 are as follows:

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
1	Pembekalan Pelatihan Skema Bisnis Penjaminan "Analisa Penjaminan" Provision of Guarantee Business Scheme Training "Guarantee Analysis"	17-18 Januari 2023 January, 17-18, 2023	PT Bintang Jamtama Sejahtera & LSP Penjaminan	Miranti Setiani, Elok Khoirunnisa, Afina Gita, Fajar Ardiansyah, Nadya Laudita
	Skema Bisnis Penjaminan "Analisa Penjaminan" Guarantee Business Scheme "Guarantee Analysis"	19 Januari 2023 January, 19, 2023	PT Bintang Jamtama Sejahtera & LSP Penjaminan	Miranti Setiani, Elok Khoirunnisa, Afina Gita, Fajar Ardiansyah, Nadya Laudita
2	Pelatihan Legal Auditor Legal Auditor Training	24-28 Januari 2023 January, 24-28, 2023	Lembaga Jimly Asshidiqie School of Law and Government	Galih Faishal
3	Pelatihan CAT Institute Starter Programme CAT Institute Starter Program Training	24-28 Januari 2023 January, 24-28, 2023	CAT Starter	Muji Rohmad, Rian Lestari
4	Pelatihan Brevet Pajak A dan B Terpadu IAI IAI Integrated Tax Brevet A and B Training	25 Maret – 12 Agustus 2023 March, 25-August, 12, 2023	Ikatan Akuntan Indonesia	Fathur Ainur Rahman
5	Inhouse training PT Jamkrida Jabar "Mengenal Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Penjaminan" In-house training PT Jamkrida Jabar "Getting to Know Civil and State Administration from a Guarantee Perspective"	23 Mei 2023 May, 23, 2023	PT Jamkrida Jabar	Pegawai PT Jamkrida Jabar Employees of PT Jamkrida Jabar
6	Pelatihan "Memaksimalkan Kinerja Investasi Lewat Risk Scoring Analysis" Training "Maximizing Investment Performance Through Risk Scoring Analysis"	24 Mei 2023 May, 24, 2023	PT Edvisor Profina Visindo	Elok Khorinnisa, R. Mutiara Gilang P.
7	Seminar Anti Fraud Day (8 PDU) Anti Fraud Day Seminar (8 PDU)	3 Juli 2023 July, 3, 2023	GRC Management	Ria Juniati

Kinerja Perusahaan
Company Performance

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
8	Pelatihan Umum Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis Public Training Strategic Human Resources Management	11 - 12 Juli 2023 July, 11 - 12, 2023	PT Media Edutama Indonesia	Firman Fauzy Susanto
9	Pelatihan Audit Internal Audit Internal Training	16 – 23 Juli 2023 July 16 - 23, 2023	Ruang Seminar	Zakaria Abdul R., Akhmad Syarif H.
10	Pelatihan “Street Smart Master of Ceremony” “Street Smart Master of Ceremony” Training	23 Juli 2023 July, 23, 2023	Persona Public Speaking	R. Resti Restiana
11	Memahami Prinsip & Praktik Akuntansi Forensik & Audit Investigatif Understand the Principles and Practices of Forensic Accounting & Investigative Auditing	31 Juli - 06 Agustus 2023 July 31 – August, 06, 2023	Ruang Seminar	Zakaria Abdul R.
12	Sertifikasi Certified Anti Fraud Governance (CAFG) Certified Anti Fraud Governance (CAFG) Certification	1 - 3 Agustus 2023 August, 1 - 3, 2023	GRC Management	Dini Rosdini, Subarman Basarah
13	Memaksimalkan Kinerja Investasi Lewat Quality Assessment Maximizing Investment Performance Through Quality Assessment	16 Agustus 2023 August, 16, 2023	PT Edvisor Profina Visindo	Rian Lestari, R. Mutiara Gilang P.
14	Program Masterclass Seri XXII “Kapasitas Risiko, Teka-teki Mendasar yang Hilang dalam Praktik Manajemen Risiko” Masterclass Program Series XXII “Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle In Risk Management Practice”	31 Agustus – 01 September 2023 August 31 - September 01, 2023	LSPMR	Catur Priyo Widodo, Pamungkas H., Djoko Isdiyarno
15	Workshop Pra-Ijtima Sanawi Annual Meeting DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perasuransian, Dana Pensiun, & Penjaminan Syariah Sanawi Pre-Ijtima Workshop Annual Meeting DPS VIII 2023 in the Sector of Insurance, Pension Funds & Sharia Guarantee	06 September 2023 September 06, 2023	DSN-MUI	Khozin Abu Faqih, Zaini Abdul Malik
16	KPI: Menyelaraskan Kinerja Organisasi KPI: Aligning Organization's Performance	13 – 14 September 2023 September 13 - 14, 2023	PPM Manajemen	Asri Permata Legina
17	Webinar Bisnis Penjaminan Guarantee Business Webinar	04 Oktober 2023 October 04, 2023	PT Bintang Cahaya Gempita	Agus Subrata
18	Pelatihan Docker & Kubernetes Docker & Kubernetes Training	23 – 26 November 2023 November 23 - 26, 2023	INIXINDO	Puji Susanto
19	Pelatihan Laravel Laravel Training	20 – 23 November 2023 November 20 - 23, 2023	Rumah Coding	M. Ihyaul Khair

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
20	Pelatihan & Sertifikasi BNSP Certified Procurement Officer (CPOf) BNSP Certified Procurement Officer (CPOf) Training & Certification	14,15,23, & 24 November 2023 November 14, 15, 23, & 24, 2023	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)	Firman Fauzy Susanto
21	Pelatihan & Sertifikasi CACP (Certification in Audit Committee Practices) CACP Training & Certification (Certification in Audit Committee Practices)	28 – 30 November & 04 Desember 2023 November 28 - 30 & December 04, 2023	Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)	Prima Yusi Sari Subarman Basarah
22	Asuransi Kredit & Penjaminan Kredit Credit Insurance and Credit Guarantee	06 Desember 2023 December 06, 2023	Ahli Asuransi	Fajar Ardiansyah Alvin Noor Syawal
23	Excel Dasar hingga Lanjutan untuk Analisis Data Excel Basic to Advanced for Data Analyze	12 – 13 Desember 2023 December 12 - 13, 2023	Spectra Specialist Training	Daiyah Syifaul Qulub
24	Pelatihan Dalam Kelas "Manajemen Remunerasi" In-Class Training "Remuneration Management"	13 – 14 Desember 2023 December 13 - 14, 2023	PPM Manajemen	Muji Rohmad
25	Konferensi Nasional Manrisk IX "Menavigasi Resiko Negara untuk Pertumbuhan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan" Manrisk IX National Conference "Navigating Country Risk for Sustainable Growth: Opportunity and Challenges"	14 – 15 Desember 2023 December 14 - 15, 2023	LSPMR	Elok Khoirunnisa
26	Workshop Peningkatan Kapabilitas SPI Korporasi dengan Internal Audit Capability Model (IACM) Workshop on Increasing Corporate SPI Capabilities with the Internal Audit Capability Model (IACM)	14 Desember 2023 December 14, 2023	FKSPI Wil. Jabar & Banten	Akhmad Syarif H.
27	Administrasi & Kesekretariatan Administration & Secretariat	19 - 20 Desember 2023 December 19 – 20, 2023	Patrarijaya Consultant	Ria Juniati, R. Resti Restiana
28	Hubungan Konflik Industrial Industrial Conflict Relations	20 - 21 Desember 2022 December, 20 – 21, 2022	PPM Manajemen	Asri Permata Legina
29	Memimpin dengan Kecerdasan Emosional Leading with Emotional Intelligence	20-22 Desember 2023 December, 20-22, 2023	PPM Manajemen	Noresya Ezmira
30	Webinar "Aspek Strategi Ahli Penjaminan dalam Pengelolaan Bisnis di Industri Penjaminan" Webinar "Aspects of Guarantee Expert Strategy in Business Management in the Guarantee Industry"	20 Desember 2023 December, 20,2023	PT Bintang Cahaya Gempita	Miranti Setiani, Elok Khoirunnisa, Dodi Darmawan, Afina Gita

E. ASPEK UMUM

General Aspect

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar pada tahun 2023:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor:
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi:
 - a. Penertiban administrasi kantor.
 - b. Penertiban pengarsipan dokumen kantor.
3. Menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 (persetujuan dan pengesahan RKAP tahun 2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum mengelola Belanja Modal Perseroan. Adapun realisasi belanja modal selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

As a supporting part that supports the needs and infrastructure of other divisions in carrying out operations, the following are the achievements made by the general section of PT Jamkrida West Java in 2023:

1. Office Inventory Management:
 - a. The building and the assets in it.
 - b. Office inventory vehicles.
 - c. Procurement of employee needs such as ATK, uniforms, and others.
2. Administrative Control:
 - a. Office administration control.
 - b. Enforcement of archiving office documents.
3. Provide infrastructure facilities in the implementation of the Company's Annual GMS for Fiscal Year 2022 and Extraordinary GMS in 2023 (approval and ratification of the BP in 2024)

In carrying out its duties, the general department manages the Company's Capital Expenditure. The realization of capital expenditure during 2022 is as follows:

Belanja Modal Capital Expenditure

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

KATEGORI CATEGORY	RKAP 2023 BP 2023	REALISASI REALIZATION	PERSENTASE PERCENTAGE
Inventaris Inventory	667.20	344.13	51.58%
Kendaraan Vehicle	-	-	0.00%
Gedung Building	252.50	(0.004)	0.00%
Kesisteman System	1,125.00	910.37	80.92%
JUMLAH TOTAL	2,044.70	1,254.50	61.35%

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 61,35% atau senilai Rp1,25 miliar dari anggaran senilai Rp2,04 miliar. Pengeluaran Belanja Modal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Based on the table above, the Company realized a capital expenditure of 61.35% or IDR 1.25 billion from the budget of IDR 2.04 billion. This Capital Expenditure is certainly adjusted to the needs of the Company.

F. ASPEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI Information Management System Aspect

Realisasi Program Kerja Bagian Sistem Manajemen Informasi (SMI) sepanjang tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

The realization of the Information Management Systems (IMS) Work Program throughout 2023 is as follows:

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
1	Pembuatan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik/TTE Berbasis Web dan Mobile	Pembuatan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik/TTE (bekerja sama dengan BSR-E-BSSN) berbasis Web dan Mobile untuk proses penandatanganan Sertifikat Penjaminan secara elektronik

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
	Creation of Web and Mobile Based Electronic Signature/E-Sign Applications	Creation of Web and Mobile-based Electronic Signature/ E-Sign Applications (in collaboration with BSR-E-BSSN) for signing Guarantee Certificates electronically
2	Peningkatan Aplikasi Penjaminan Modul Sertifikat Elektronik Electronic Certificate Module Guarantee Application Upgrade	Peningkatan Modul pada Aplikasi Penjaminan untuk mendukung proses penandatanganan Komite Penjaminan dan Sertifikat Penjaminan Elektronik Module Upgrade in the Guarantee Application to support the process of signing the Guarantee Committee and Electronic Guarantee Certificate
3	Membangun kembali Aplikasi Penjaminan Rebuilding the Guarantee Application	Proses pembuatan kembali Aplikasi Penjaminan secara keseluruhan dengan menggunakan Framework Laravel dan Database Postgre The process of rebuilding the entire Guarantee Application using the Laravel Framework and Postgre Database
4	Peningkatan Aplikasi Penjaminan pada Modul Penjaminan dan Penampungan IJP Guarantee Application Upgrade in Guarantee and Guarantee Service Fee Containment Module	Penambahan Fitur Koreksi Sertifikat Penjaminan untuk mengakomodasi perubahan dan pembatalan data, baik karena permintaan eksternal maupun koreksi internal Added Guarantee Certificate Correction Feature to accommodate data changes and cancellations, both due to external requests and internal corrections
5	Migrasi Server Database dan Server Aplikasi untuk Simulasi Perhitungan Penjaminan Ulang/Reasuransi dan IJP Akrua Migration of Database Server and Application Server for Simulation of Re-Guarantee/Reinsurance and Accrual Guarantee Service Fee Calculations	Pembuatan Server Database dan Server Aplikasi untuk keperluan Simulasi Perhitungan Penjaminan Ulang/Reasuransi dan Perhitungan IJP Akrua dengan Data Penjaminan Ulang/Reasuransi yang baru Creating a Database Server and Application Server for Simulation of Re-Guarantee/Reinsurance Calculations and Accrual Guarantee Service Fee Calculations with new Re-Guarantee/Reinsurance Data
6	Pembuatan Aplikasi <i>Host to Host</i> untuk bank bjb Syariah Creating a Host to Host Application for bank bjb Syariah	Pembuatan Aplikasi <i>Host to Host</i> untuk menjembatani keperluan pengiriman dan penerimaan data dari dan ke bank bjb Syariah agar lebih cepat dan aman Creating a Host to Host Application to bridge the need for sending and receiving data to and from bank bjb Syariah to make it faster and safer
7	Revitalisasi <i>Access Point</i> Access Point Revitalization	<i>Upgrade</i> perangkat wifi untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas Access Point dan juga meningkatkan kapasitas jaringan Access Point agar dapat diakses oleh <i>client</i> dengan jumlah banyak WiFi device upgrade to improve the performance and stability of the Access Point and also increase the capacity of the Access Point network so that it can be accessed by a large number of clients

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
8	Penambahan fitur Aplikasi Klaim Added Claim Application feature	Penambahan fitur pada Aplikasi Klaim untuk mengakomodasi input data klaim melalui menu impor dari data excel sehingga dapat memproses input klaim dengan data banyak Added features to the Claim Application to accommodate claim data input via the import menu from Excel data so that it can process claim input with a lot of data
9	Peningkatan Aplikasi Penjaminan Ulang/Reasuransi Reguarantee/Reinsurance Applications Upgrade	Peningkatan Aplikasi Penjaminan Ulang/Reasuransi dengan ketentuan dan formulasi optimalisasi sesuai dengan treaty dari pihak reasuradur Reguarantee/Reinsurance Applications upgrade with optimization provisions and formulations by the agreement from the reinsurer
10	Pembuatan Aplikasi Executive Information System (EIS) Creating an Executive Information System (EIS) Applications	Pembuatan Aplikasi Executive Information System atau Dashboard Informasi untuk kebutuhan manajemen Creating an Executive Information System Applications or Information Dashboards for management needs
11	Pembuatan Aplikasi <i>E-Reporting</i> Creating an E-Reporting Applications	Pembuatan Aplikasi Pelaporan Elektronik bagi semua unit kerja Creating an Electronic Reporting Applications for all work units
12	Pembuatan Aplikasi Budgeting Control Creating a Budgeting Control Applications	Pembuatan Aplikasi Kendali Anggaran untuk menghitung jumlah realisasi anggaran yang sudah terserap dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan dalam RKAP Creating a Budget Control Application to calculate the actual amount of budget that has been absorbed compared to the value targeted in the Business Plan
13	Pembuatan Aplikasi Keuangan Modul Permintaan Kas Creating of Financial Applications Cash Request Module	Pembuatan Modul permintaan dana ke bagian keuangan yang harus di input oleh tiap <i>user</i> pemohon dan harus di setujui atasannya. Pencairan dana dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari pejabat di unit kerja keuangan Creating a funding request module for the finance department which must be input by each requesting user and must be approved by their superior. Disbursement of funds can be done after approval from officials in the financial work unit
14	Penambahan Modul/Menu Aplikasi Akuntansi Addition of Accounting Application Module/Menu	Penambahan fitur approval jurnal oleh pejabat di bagian keuangan dan perbaikan master akun pada laporan khusus agar akun dapat langsung tampil pada laporan neraca atau laba (rugi) Added journal approval feature by officials in the finance department and improvements to master accounts in special reports so that accounts can appear directly on the balance sheet or profit (loss) report

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
15	Peningkatan Aplikasi <i>Scoring Case By Case</i> (CBC) Case By Case (CBC) Scoring Application Upgrade	Penambahan beberapa skema kredit, perbaikan tampilan, perbaikan rumus perhitungan scoring dan perbaikan laporan Added several credit schemes, improved appearance, improved scoring calculation formula, and improved reports
16	Penambahan Fitur dan Pengembangan Aplikasi Surat dan Kearsipan Addition of Features and Development of Mail and Archive Applications	Penambahan fitur disposisi beserta kelengkapan untuk input persetujuan atasan, catatan atasan, dan mengunggah berkas untuk surat masuk dan keluar Added disposition features along with equipment for inputting superior approval, superior notes, and uploading files for incoming and outgoing letters

G. ASPEK PENGAWASAN

Supervision Aspect

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

As a supporting organ of the Company in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) or corporate governance to be able to increase added value for stakeholders, namely a rule, norm, or healthy and ethical business practice. In practice, good corporate governance requires supervisory practices that refer to GCG principles.

Dalam mewujudkan GCG, Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki beberapa peran, diantaranya:

In realizing GCG, the Internal Supervisory Unit (ISU) has several roles, including:

1. Sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan;
2. Sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

1. As an independent supervisor who conducts audits, evaluations, and assesses the company's operations and activities;
2. As a catalyst and consultant in certain matters for the Board of Directors and management related to risk management practices, internal control systems, and GCG practices as well as efforts to improve performance and corporate value sustainably.

Unit SPI Perseroan merupakan aparat pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin

The Company's ISU Unit is the Company's internal supervisor (auditor) led by a head and directly responsible to the Main Director.

oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal yang telah dilakukan Unit SPI Perseroan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan audit internal sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.
3. Melakukan review terhadap SOP yang berlaku di Perseroan.
4. *Counterpart* dengan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik dan OJK).

The things that have been done by the Company's ISU Unit during 2022 are as follows:

1. Conducting internal audits by the annual supervisory work program.
2. Monitoring the implementation of GCG implemented by the Company.
3. Reviewing the applicable SOPs in the Company.
4. Counterpart with external auditors (Public Accounting Firm and OJK).

UNIT USAHA SYARIAH

Sharia Business Unit

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar memperoleh izin pembentukan berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor: KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan mulai menjalankan produksinya pada bulan Mei 2015, Unit Usaha Syariah menjadi bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan bisnis penjaminan.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kelayakan dan Kepatanan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar telah membangun Sistem Informasi *Kafalah* berbasis *web* dan layanan *Kafalah Online*. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*. Selain itu, dalam sistem informasi tersebut juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, regaransi, dan *bussiness recovery program*, serta saat ini dalam proses pengembangan dan akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

Dengan modal awal pendirian senilai Rp15 miliar dan secara bertahap dilakukan penambahan modal senilai Rp35 miliar (total modal Rp50 miliar), Unit Usaha Syariah pada posisi 31 Desember 2023 memiliki Total Ekuitas sebesar Rp65,44 miliar, Total Aset sebesar Rp99,68 miliar, telah menjamin pembiayaan senilai Rp5,71 triliun dengan memperoleh Imbal Jasa Kafalah Cash Basis senilai Rp44,82 miliar, dengan jumlah KUMKM Terjamin (*makful anhu*) sebanyak 995.364 unit.

Sharia Business Unit PT Jamkrida Jabar obtained a formation permit based on OJK Decree Number: KEP-4 / NB.223 / 2015 dated February 3, 2015 and started its production in May 2015, Sharia Business Unit is proof of the Company's commitment in developing the guarantee business.

The Sharia Business Unit of PT Jamkrida Jabar is led by the Head of the Sharia Business Unit and fostered by two Sharia Supervisory Boards recommended by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and has passed the Feasibility and Appropriateness Test from the OJK.

As a means of supporting its operations, the sharia Business Unit of PT Jamkrida Jabar has built a web-based Kafalah Information System and Online Kafalah services. Where the system can display Guarantee, Claim, and Subrogation data up to date. In addition, the information system can also be displayed the calculation of gearing ratio, warranty, and business recovery program, and is currently in the development process and will be integrated with the Financial Information System.

With initial capital worth IDR 15 billion and gradually increasing capital worth IDR 35 billion (total capital IDR 50 billion), the Sharia Business Unit as of December 31 2023 has a Total Equity of IDR 65.44 billion, Total Assets of IDR 99.68 billion, has guaranteed financing worth IDR 5.71 trillion by obtaining Kafalah Service Fee Cash Basis worth IDR 44.82 billion, with a total of 995,364 Guaranteed CMSMEs (*makful anhu*) units.

Adapun kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

The performance of the Sharia Business Unit PT Jamkrida West Java during 2023 can be seen in the following tables.

A. ASPEK KAFALAH

Kafalah Aspect

VOLUME PEMBIAYAAN FINANCING VOLUME PERIODE 2023 PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF KAFALAH	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY					
a. Produktif Productive	804,154.47	719,629.86	5,001,583.68	695.02%	521.97%
b. Non Produktif Non Productive	553,760.84	775,359.09	711,409.20	91.75%	28.47%
JUMLAH TOTAL	1,357,915.30	1,494,988.96	5,712,992.88	382.14%	320.72%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	131,008.02	85,249.51	526,736.99	617.88%	302.06%
b. Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	3,362.74	-	0.00%	0.00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	573,499.25	530,178.09	4,177,414.73	787.93%	628.41%
d. Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0.00%	0.00%
e. Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	96,575.00	90,920.87	290,963.04	320.02%	201.28%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	3,072.20	9,918.66	6,468.92	65.22%	110.56%
g. Surety Bond	-	-	-	0.00%	-100.00%
h. Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	553,760.84	775,359.09	711,409.20	91.75%	28.47%
JUMLAH TOTAL	1,357,915.30	1,494,988.96	5,712,992.88	382.14%	320.72%

Volume Pembiayaan yang dijamin tahun 2023 adalah senilai Rp5,71 triliun atau terealisasi sebesar 382,14% dari RKAP 2023, dimana Volume Pembiayaan Produktif senilai Rp5 triliun (tercapai 695,02%) dan Non Produktif senilai Rp711,41 miliar (tercapai 91,75%). Volume Pembiayaan tahun 2023 mengalami

The Guaranteed Financing Volume in 2023 was IDR 5.71 trillion or realized by 382,14% of the BP 2023, of which the Productive Financing Volume was worth IDR 5 trillion (reached 695,02%) and Non-Productive was worth IDR 711.41 billion (reached 91.75%). The Financing Volume in 2023 grew by 320.72% compared to the realization in 2022.

pertumbuhan sebesar 320,72% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

VOLUME KAFALAH
KAFALAH VOLUME
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF KAFALAH	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY					
a. Produktif Productive	375,243.46	401,089.07	2,546,056.21	634.79%	578.51%
b. Non Produktif Non Productive	491,876.61	745,945.11	607,248.86	81.41%	23.46%
JUMLAH TOTAL	867,120.07	1,147,034.18	3,153,305.07	274.91%	263.65%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	34,517.82	34,319.56	223,525.85	651.31%	547.57%
b. Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	1,818.46	-	0.00%	0.00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	281,131.55	286,702.45	2,137,132.97	745.42%	660.19%
d. Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0.00%	0.00%
e. Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	56,521.90	68,329.94	178,928.48	261.86%	216.56%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	3,072.20	9,918.66	6,468.92	65.22%	110.56%
g. Surety Bond	-	-	-	0.00%	-100.00%
h. Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	491,876.61	745,945.11	607,248.86	81.41%	23.46%
JUMLAH TOTAL	867,120.07	1,147,034.18	3,153,305.07	274.91%	263.65%

Volume Kafalah tahun 2023 adalah senilai Rp3,15 triliun atau terealisasi sebesar 274,91% dari RKAP 2023, dimana Volume Kafalah Produktif senilai Rp2,55 triliun (tercapai 634,79%) dan Non Produktif senilai Rp607,25 miliar (tercapai 81,41%). Volume Kafalah tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 263,65% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The Kafalah Volume in 2023 was IDR 3.15 trillion or realized by 274.91% of the BP 2023, of which the Productive Kafalah Volume was worth IDR 2.55 trillion (reached 634.79%) and Non-Productive was worth IDR 607.25 billion (reached 81.41%). The Kafalah Volume in 2023 grew by 263.65% compared to the realization in 2022.

IMBAL JASA KAFALAH CASH BASIS
CASH BASIS KAFALAH SERVICE FEE
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF KAFALAH	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY					
a. Produktif Productive	5,981.26	5,885.12	29,914.28	508.30%	400.13%
b. Non Produktif Non Productive	9,532.81	11,425.55	14,906.67	130.47%	56.37%
JUMLAH TOTAL	15,514.07	17,310.67	44,820.95	258.92%	188.91%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	861.80	1,063.56	5,759.72	541.55%	568.34%
b. Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	25.48	-	0.00%	0.00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	4,293.68	4,017.18	21,558.57	536.66%	402.10%
d. Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0.00%	0.00%
e. Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	802.83	697.57	2,535.88	363.53%	215.87%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	22.96	81.33	60.12	73.92%	161.87%
g. Surety Bond	-	-	-	0.00%	-100.00%
h. Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	9,532.81	11,425.55	14,906.67	130.47%	56.37%
JUMLAH TOTAL	15,514.07	17,310.67	44,820.95	258.92%	188.91%

Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2023 adalah senilai Rp44,82 miliar atau terealisasi sebesar 258,92% dari RKAP 2023, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp29,91 miliar (tercapai 508,30%) dan Non Produktif senilai Rp14,91 miliar (tercapai 130,47%). Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 188,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The Kafalah Service Fee Cash Basis revenue in 2023 was IDR 44.82 billion or realized by 258.92% of the BP 2023, where the Productive Kafalah Service Fee Revenue was worth IDR 29.91 billion (reached 508.30%) and Non-Productive was worth IDR 14.91 billion (reached 130.47%). The Kafalah Service Fee Cash Basis revenue in 2023 grew by 188.91% compared to the realization in 2022.

IMBAL JASA KAFALAH ACCRUAL BASIS (*)
ACCRUAL BASIS KAFALAH SERVICE FEE (*)

PERIODE 2023

PERIOD 2023

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF KAFALAH		2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY						
a.	Produktif Productive	5,317.20	6,586.51	21,428.01	325.33%	302.99%
b.	Non Produktif Non Productive	8,105.19	10,892.74	14,554.62	133.62%	79.57%
JUMLAH TOTAL		13,422.39	17,479.25	35,982.64	205.86%	168.08%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY						
a.	Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	841.82	1,168.83	3,635.40	311.03%	331.85%
b.	Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	16.43	-	0.00%	0.00%
c.	Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	3,709.45	4,639.89	15,740.25	339.24%	324.33%
d.	Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0.00%	-100.00%
e.	Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	718.77	628.87	1,996.28	317.44%	177.74%
f.	Bank Garansi Bank Guarantee	21.82	132.48	56.08	42.33%	156.98%
g.	Surety Bond	25.33	-	-	0.00%	-100.00%
h.	Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	8,105.19	10,892.74	14,554.62	133.62%	79.57%
JUMLAH TOTAL		13,422.39	17,479.25	35,982.64	205.86%	168.08%

(*) termasuk restitusi IJK/including Kafalah Service Fee restitution

Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp35,98 miliar atau terealisasi sebesar 205,86% dari RKAP 2023, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp21,43 miliar (tercapai 325.33%) dan Non Produktif senilai Rp14.55 miliar (tercapai 133,62%). Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 168,08% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

The Kafalah Service Fee Accrual Basis revenue in 2023 was IDR 35.98 billion or realized by 205.86% of the BP 2023, where Productive Kafalah Service Fee Income was worth IDR 21.43 billion (achieved 325.33%) and Non-Productive was worth IDR 14.55 billion (achieved 133.62%). The Kafalah Service Fee Accrual Basis revenue in 2023 grew by 168.08% compared to the realization in 2022.

JUMLAH KUMKM
NUMBER OF CMSMEs
PERIODE 2023
PERIOD 2023

dalam satuan unit/in units

JENIS TERJAMIN TYPES OF GUARANTEE	2022	RKAP 2023 BP 2023	2023	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	1,806	51	16,845	33227.67%	832.72%
b. Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	20	-	0.00%	0.00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	54,076	57,375	978,371	1705.22%	1709.25%
d. Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0.00%	0.00%
e. Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	57	283	101	35.75%	77.19%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	77	161	47	29.15%	-38.96%
g. Surety Bond	-	-	-	0.00%	-100.00%
JUMLAH TOTAL	56,016	57,890	995,364	1719.41%	1676.93%

Jumlah KUMKM Terjamin (Makful Anhu) tahun 2023 adalah sebanyak 995.364 unit atau terealisasi sebesar 1.719,41% dari RKAP 2023. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1.676,93% jika dibandingkan tahun 2022.

The number of Guaranteed CMSMEs (Makful Anhu) in 2023 was 995,364 units or realized by 1,719.41% of the BP 2023. The number of Guaranteed CMSMEs in 2023 grew by 1,676.93% compared to 2022

B. ASPEK KEUANGAN
Financial Aspect

Kinerja Perusahaan Company Performance

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2023
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RIKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
ASET					
ASSETS					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	29,189.02	28,395.93	58,103.66	204.62%	99.06%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(462.89)	(54.00)	(138.74)	256.92%	29.97%
Surat Berharga Marketable Securities	10,028.27	13,477.54	20,361.76	151.08%	103.04%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	(5.40)	-	0.00%	0.00%
Piutang Re/Cogaranasi Re/Co-Guarantee Receivables	2,908.88	3,173.87	2,835.71	89.35%	-2.52%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	(172.98)	-	0.00%	0.00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	679.40	550.24	1,289.98	234.44%	89.87%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	-	-	0.00%	0.00%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	1,820.52	909.69	6,527.93	717.60%	258.58%
Piutang Lain-Lain Other Receivables	13.66	15.17	13.76	90.67%	0.71%
Properti Investasi Investment Property	-	-	-	0.00%	0.00%
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	44,176.85	46,290.07	88,994.06	192.25%	101.45%
ASET TIDAK LANCAR					
NON-CURRENT ASSETS					
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	2,492.46	3,735.68	7,779.99	208.26%	212.14%
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	1,884.98	2,072.16	1,911.69	92.26%	1.42%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	980.18	477.56	980.18	205.25%	0.00%
Aset Lain-Lain Other Assets	33.92	132.95	18.56	13.96%	-45.27%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON-CURRENT ASSETS	5,391.54	6,418.35	10,690.43	166.56%	98.28%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	49,568.39	52,708.41	99,684.49	189.12%	101.10%

Kinerja Perusahaan Company Performance

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2023
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RIKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT TERM LIABILITIES					
Utang Pajak Taxes Payable	31.54	13.16	91.08	691.95%	188.76%
Utang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Payable	2,379.14	2,182.89	6,551.07	300.11%	175.35%
Utang Klaim Claim Payable	-	-	-	0.00%	-100.00%
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	34.81	127.61	471.04	369.12%	1253.08%
Penampungan Sementara Temporary Shelter	997.65	681.54	3,513.02	515.45%	252.13%
Utang Lancar Lainnya Other Current Payables	1,297.02	2,441.44	2,129.96	87.24%	64.22%
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	3,201.39	3,054.82	13,930.02	456.00%	335.12%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	7,941.56	8,501.46	26,686.18	313.90%	236.03%
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES					
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	4,886.32	5,105.64	6,949.37	136.11%	42.22%
Cadangan Klaim Claim Reserve	1,552.12	1,133.90	607.14	53.54%	-60.88%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Employee Benefits Liabilities	-	-	-	0.00%	-100.00%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM LIABILITIES	6,438.44	6,239.54	7,556.50	121.11%	17.37%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	14,380.00	14,741.00	34,242.69	232.30%	138.13%
EKUITAS EQUITY					
Modal Capital Stock	25,000.00	25,000.00	50,000.00	200.00%	100.00%
Cadangan Umum General Reserve	6,017.44	8,233.75	7,526.66	91.41%	25.08%
Saldo Laba Retained Earnings	4,266.13	4,555.12	7,823.74	171.76%	83.39%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga Difference in The Fair Value of Securities	(95.18)	178.54	91.40	51.19%	-196.03%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Difference in Remeasurement of Post-Employee Benefits Liability	-	-	-	0.00%	-100.00%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	35,188.39	37,967.41	65,441.80	172.36%	85.98%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	49,568.39	52,708.41	99,684.49	189.12%	101.10%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (AUDITED)	RKAP 2023 BP 2023	2023 (AUDITED)	CAPAIAN ACHIEVEMENT	PERTUMBUHAN GROWTH
PENDAPATAN KAFALAH KAFALAH INCOME					
Imbal Jasa Kafalah Kafalah Service Fee	13,667.04	17,479.25	32,029.27	183.24%	134.35%
Beban Akuisisi Acquisition Expenses	(2,200.32)	(2,414.32)	(4,810.59)	199.25%	118.63%
Restitusi UK Restitution of Kafalah Service Fee	(244.64)	-	(235.84)	0.00%	-3.60%
Management Fee Management Fee	1,309.58	1,083.09	2,545.50	235.02%	94.38%
Beban Regaransi Re-Guarantee Expenses	(4,947.69)	(7,150.04)	(8,560.48)	119.73%	73.02%
JUMLAH PENDAPATAN KAFALAH TOTAL KAFALAH INCOME	7,583.97	8,997.99	20,967.86	233.03%	176.48%
KLAIM CLAIM					
Beban Klaim Claim Expenses	(2,879.25)	(2,188.03)	(12,407.60)	567.07%	330.93%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim Recovery (Establishment) in Reserve Claim	(265.36)	(66.74)	235.26	-352.48%	-188.66%
JUMLAH KLAIM TOTAL CLAIM	(3,144.60)	(2,254.77)	(12,172.34)	539.85%	287.09%
PENDAPATAN KAFALAH BERSIH KAFALAH INCOME - NET	4,439.36	6,743.22	8,795.51	130.43%	98.13%
PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME	2,229.27	2,670.00	2,359.67	88.38%	5.85%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME	221.89	164.85	768.69	466.30%	246.43%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)	(931.44)	(471.60)	(12.27)	2.60%	-98.68%
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES					
Beban Operasional Operating Expenses	(426.94)	(725.73)	(780.27)	107.52%	82.76%
Beban Sumber Daya Manusia Human Resource Expenses	(1,031.28)	(2,968.31)	(2,390.06)	80.52%	131.76%
Beban Administrasi & Umum General and Administrative Expenses	(336.56)	(660.00)	(917.53)	139.02%	172.62%
JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL OPERATING EXPENSES	(1,794.79)	(4,354.03)	(4,087.87)	93.89%	127.76%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK EARNINGS BEFORE TAX	4,164.29	4,752.43	7,823.74	164.63%	87.88%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES					
Beban Pajak Kini Current Income Tax Expenses	-	-	-	0.00%	0.00%
Manfaat Pajak Tangguhan Deffered Tax Benefits	101.84	(197.31)	-	0.00%	0.00%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TOTAL INCOME TAX EXPENSES	101.84	(197.31)	-	0.00%	0.00%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN EARNINGS AFTER TAX	4,266.13	4,555.12	7,823.74	171.76%	83.39%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	-	-	186.58	0.00%	-100.00%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	4,266.13	4,555.12	8,010.32	175.85%	87.77%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

Dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi & Komprehensif Lain di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Laba Bersih Tahun Berjalan UUS Tahun 2023 adalah sebesar Rp7,82 miliar atau terealisasi sebesar 171,76% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 83,39% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- Total Aset UUS tahun 2023 adalah senilai Rp99,68 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 189,12% dibandingkan realisasi tahun 2022 senilai Rp49,57 miliar.
- Pendapatan Investasi UUS tahun 2023 adalah senilai Rp2,36 miliar atau terealisasi sebesar 88,38% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,85% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- Beban Klaim UUS tahun 2023 adalah senilai Rp12,41 miliar atau terealisasi sebesar 539,85% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 287,09% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.
- Beban Usaha UUS tahun 2023 adalah senilai Rp4,09 miliar atau terealisasi sebesar 93,89% dari RKAP 2023 dan mengalami pertumbuhan sebesar 127,76% jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar adalah:

- Dari sisi capaian Volume Kafalah, terlihat bahwa Kafalah Pembiayaan Usaha Menengah, Mikro, dan Konstruksi mampu melampaui target, namun disisi lain Kafalah Bank Garansi, *Surety Bond*, dan *Multiguna* masih dibawah target.
- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Kafalah Bank Garansi

From the Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss & Other Comprehensive above, it can be explained that:

- SBU's Current Year Earnings After Tax in 2023 was IDR 7.82 billion or realized by 171.76% of the BP 2023 and grew by 83.39% compared to the realization in 2022.
- Total Assets of SBU in 2023 were worth IDR 99.68 billion or grew by 189.12% compared to the realization in 2022 was worth IDR 49.57 billion.
- SBU's Investment Income in 2023 was IDR 2.36 billion or realized by 88.38% of the BP 2023 and grew by 5.85% compared to the realization in 2022.
- SBU's Claim Expense in 2023 was IDR 12.41 billion or realized by 539.85% of the BP 2023 and grew by 287.09% compared to the realization in 2022.
- SBU's Operating Expenses in 2023 were IDR 4.09 billion or realized by 93.89% of the BP 2023 and grew by 127.76% compared to the realization in 2022.

Some factors that affect the performance achievements of the Sharia Business Unit of PT Jamkrida Jabar are:

- In terms of Kafalah Volume achievement, it can be seen that the Kafalah of Medium, Micro, and Construction Business Financing was able to exceed the target but on the other hand, the Kafalah of Guarantee Bank, Surety Bond, and Multipurpose were still below the target.
- One of the factors that caused the Kafalah of Guarantee Bank target was not

adalah tidak maksimalnya kontribusi dari mitra bank umum syariah dikarenakan penyerapan fasilitas pada kategori ini tidak maksimal. Adapun untuk *Surety Bond*, realisasi kafalah dialihkan ke unit konvensional. Sedangkan untuk Kafalah Pembiayaan Multiguna di tahun 2023, UUS mengambil kebijakan untuk lebih selektif dan membatasi akseptasi sebagai bagian dari upaya maintenance pemenuhan rasio penjaminan usaha produktif agar tetap sesuai dengan ketentuan OJK paling sedikit 25%.

- Untuk Kafalah Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi tidak ditargetkan secara khusus dalam RKAP 2023 karena UUS masih memfokuskan kafalah pada kategori pembiayaan lainnya.

maximized contribution from Islamic commercial bank partners because the absorption of facilities in this category was not optimal. As for the Surety Bond, the realization of the kafalah was transferred to conventional units. As for the Kafalah of Multipurpose Financing in 2023, SBI takes a policy to be more selective and limit acceptance as part of maintenance efforts to fulfill the productive business kafalah ratio so that it remains by OJK regulations of at least 25%.

- For Kafalah Small Business and Cooperative Financing is not specifically targeted in the BP 2023 because SBU is still focusing on other financing categories.



**CORPORATE
GOVERNANCE**

TATA KELOLA PERUSAHAAN

**CORPORATE
GOVERNANCE**

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu *"menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

Good Corporate Governance (GCG) is a system designed to direct professional company management based on transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality principles.

PT Jamkrida Jabar (the "Company") has a strong commitment to consistently and continuously implementing GCG within the Company. GCG implementation is an important foundation for achieving the Company's vision: "to become a Trusted Credit Guarantee Company that Contributes to Regional Economic Growth".

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

The objectives of PT Jamkrida Jabar in implementing GCG are:

1. As a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Sharia Supervisory in carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. As a guideline for the Board of Directors to carry out the Company's daily activities based on high moral values regards to articles of association, business ethics, and applicable laws and regulations.
3. As a guideline for the management and employees of PT Jamkrida Jabar in carrying out their daily activities and duties by GCG principles.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

BASE OF GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation at PT Jamkrida Jabar refers to applicable laws and regulations such as:

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation Number: 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
3. Circular of the Financial Services Authority Number: 54/SEOJK.05/2017 concerning Reports on Implementing Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
4. Regulation of the Governor of West Java Number: 105 of 2020 concerning Regulations for implementing Good Governance of Regional Owned Enterprises in West Java Province.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG. Hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

The application of GCG principles at PT Jamkrida Jabar aims to obtain a good, effective, and efficient result and to grow value for shareholders and stakeholders.

The Company has instilled in the Company's culture and business behavior, reflected in fairness in business transactions, openness, and management behavior in carrying out the guaranteed business.

The Company has built a foundation and framework of reference to support GCG, contained inside:

1. Vision and Mission of the Company provide clear directions and business development strategies.
2. An organizational structure that clearly describes lines of responsibility regarding the main elements of corporate governance implementation encompass the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Internal Oversight Unit, Risk and Claims Management Division, and the Corporate Secretary.

3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

3. Supervisory function of the Board of Commissioners.

GCG implementation for the Company is not only a necessity to comply with regulations but a fundamental element that refers to international best practices for healthy and sustainable business continuity in the long term. The implementation of comprehensive GCG in several industries and companies has been proven to have a good contribution to increasing corporate value (value creation) and provided real benefits for each industry and the Company, including increased competitiveness and company performance, and the trust of stakeholders, both local and foreign investors.

To achieve this, of course, a joint commitment from all levels of the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, and employees of Jamkrida Jabar is needed to implement GCG principles as the basis for carrying out guarantee business activities, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality.

The Company believes that consistent implementation of GCG principles and practices will provide benefits, both for the Company and its Stakeholders, namely by:

1. Improving management's seriousness in applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and prudence in managing the Company.
2. Improving the Company's performance, efficiency, management, and services to Stakeholders.
3. Protecting the Company from external intervention and lawsuits
4. Avoid conflicts of interest between the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Directors, Shareholders, and the Company.

PT Jamkrida Jabar menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 3 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

PT Jamkrida Jabar realizes the importance of GCG in supporting business growth and providing added value to Stakeholders. In implementing GCG comprehensively and continuously, the company tries to carry out GCG principles and practices based on the applicable laws and regulations.

According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU PT"), a Limited Liability Company has 3 (three) key organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the Company and holds all authority that is not delegated to the Board of Commissioners and Directors. The GMS is also a forum for shareholders to make important decisions related to the continuity of the Company's business and operations.

Decisions made at the GMS are based on the interests of the company. Shareholders do not intervene in the duties, functions, and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors to exercise their rights by the Articles of Association and laws and regulations resolutions made at the GMS fairly and transparently.

Throughout 2023, the Company has held 1 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and 3 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Grand Hotel Preanger Bandung yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Tanpa Modifikasian.
Pemegang Saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Keputusan Agenda Keempat
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Penambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham sehingga modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berubah menjadi

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 held on June 26, 2023, at the Grand Hotel Preanger Bandung decided the following matters:

1. First Agenda Decision
Shareholders approved and ratified the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year.
2. Second Agenda Decision
Shareholders approved and ratified the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2021 Fiscal Year audited by Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Public Accounting Firm with Reasonable Without Exceptions/Fair Without Modification Opinion.
Shareholders provide discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 Fiscal Year, as long as these actions are not criminal acts and do not conflict with the valid laws and regulations.
3. Third Agenda Decision
Shareholders approved and ratified the proposed Use of the Company's Net Profits for the 2022 Fiscal Year.
4. Fourth Agenda Decision
The Shareholders approved and ratified the additional Capital Deposit of the West Java Provincial Government to the Company for IDR 50,000,000,000 (fifty billion rupiahs) or 5,000 (five thousand) shares so that the capital issued and paid up by the West Java Provincial Government changed to IDR

Rp203.000.000.000 (duaratus tiga miliar rupiah) atau sebanyak 20.300 (duapuluh ribu tiga ratus) lembar saham.

203,000,000,000 (two hundred three billion rupiahs) or 20,300 (twenty thousand three hundred) shares.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tersebut dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Runa Febrian, S.H., M.Kn.

The decisions at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year stated in Deed No. 09 dated June 26, 2023, made before Notary Runa Febrian, S.H., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on October 10, 2023, at the Meeting Room, 4th Floor, Bureau of Regional Owned Enterprises, Investment and Development Administration, West Java Province Regional Secretariat, decided the following matters:

1. Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri Yanti Rachmawati dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Plt. Direktur Keuangan Perseroan.
2. Pemegang Saham menyetujui untuk mengangkat Taufiek Dharviandi sebagai Direktur Operasional yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pemegang Saham menyetujui untuk menggeser posisi Agus Subrata sebagai Direktur Operasional menjadi Direktur Keuangan dan diangkat untuk melanjutkan kepemimpinan sementara untuk posisi sebagai Plt. Direktur Utama sampai diangkatnya Direktur Utama secara definitif.

1. Shareholders approved the resignation of Yanti Rachmawati from her position as President Director and Acting Finance Director of the Company.
2. Shareholders approved to appoint of Taufiek Dharviandi as Operations Director who will become effective after being declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority.
3. Shareholders approved to shift of Agus Subrata's position as Director of Operations to Director of Finance and he was appointed to continue temporary management as Acting President Director until the President Director is definitively appointed.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 10

The decisions at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are stated in Deed No. 02 dated October 10, 2023, made before Notary Dindin Saepudin, S.H.

Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris
Dindin Saepudin, S.H.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 28 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2024.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui usulan Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Garce, Karunawan untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Penambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan sebesar Rp57.080.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan puluh juta rupiah) atau sebanyak 5.708 (lima ribu tujuh ratus delapan) lembar saham sehingga modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Rp260.080.000.000 (duaratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah) atau sebanyak 26.008 (duapuluh enam ribu delapan) lembar saham.
4. Keputusan Agenda Keempat
Pemegang Saham mengusulkan pengajuan Muhammad Iskandar sebagai Komisaris

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 28, 2023, at the Meeting Room, 4th Floor, Bureau of Regional Owned Enterprises, Investment and Development Administration, West Java Province Regional Secretariat, decided the following matters:

1. First Agenda Decision
Shareholders approved the Company's Work Plan and Budget for the 2024 Fiscal Year.
2. Second Agenda Decision
Shareholders approved the Board of Commissioners' proposal based on the Audit Committee's proposal for the appointment of the Public Accounting Firm Hertanto, Garce, Karunawan to audit the Company's financial statements for the 2023 Fiscal Year.
3. Third Agenda Decision
Shareholders approved and ratified the additional capital contribution of the West Java Provincial Government to the Company amounting to IDR 57,080,000,000 (fifty-seven billion eighty million rupiahs) or 5,708 (five thousand seven hundred and eight) shares so that the capital is issued and paid in by the West Java Provincial Government changed to IDR 260,080,000,000 (two hundred and sixty billion eighty million rupiahs) or 26,008 (twenty-six thousand and eight) shares.
4. Fourth Agenda Decision
Shareholders proposed Muhammad Iskandar as the Company's new

Independen baru Perseroan untuk diajukan mengikuti uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan dan yang bersangkutan efektif menjabat terhitung setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Independent Commissioner to take part in the fit and proper test at the Financial Services Authority and the person concerned will be effective after passing the fit and proper test by the Financial Services Authority.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 04 tanggal 28 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H.

The decisions at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are stated in Deed No. 04 dated November 28, 2023, made before Notary Dindin Saepudin, S.H.

No. No.	Jabatan Position	Nama Name	Keterangan Information
1	Komisaris Utama President Commissioner	Muhammad Taufiq Budi Santoso	
2	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dini Rosdini	Berakhir 26 November 2023 Ends November 26, 2023
3	Komisaris Independen Independent Commissioner	Muhammad Iskandar	Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Effective after passing the fit and proper test by the Financial Services Authority
4	Direktur Utama President Director	Yanti Rachmawati	Berakhir 10 Oktober 2023 Ends October 10, 2023
5	Direktur Keuangan Finance Director	Agus Subrata	Merangkap sebagai Plt. Direktur Utama Concurrently as Acting President Director
6	Direktur Operasional Operational Director	Taufiek Dharviandi	Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Effective after passing the fit and proper test by the Financial Services Authority

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company by the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors has collective duties and responsibilities in managing the company.

All members of the Company's Board of Directors have met the following criteria:

- a. The assignment of members of the Board of Directors is by the GMS.
- b. Has complied with the fit & proper test provisions from the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law, and related GCG provisions and has obtained approval from the Financial Services Authority and Shareholders.
- c. All members of the Board of Directors have adequate integrity, competence, and financial reputation.
- d. Members of the Board of Directors do not take and receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
- e. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.
- f. All members of the Board of Directors are Indonesian citizens.
- g. All members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in financial institution operations.

KOMPOSISI DIREKSI COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negeraan Citizenship	Domisili Domicile
1	Yanti Rachmawati	Direktur Utama President Director	22-02-2022 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 952/NB.11/2022 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 952/NB.11/2022	Akta No. 11 tanggal 05-04-2022 Deed No. 11 dated 05-04-2022 Berakhir 10 Oktober 2023 Ends on October 10, 2023	Indonesia	Indonesia
2	Agus Subrata	Direktur Operasional Operational Director	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 432/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 432/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Deed No. 74 dated 13-09-2021 Berakhir 10 Oktober 2023 Ends on October 10, 2023	Indonesia	Indonesia
3	Agus Subrata	Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama) Finance Director (Acting President Director)	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 432/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 432/NB.11/2021	Akta No. 02 tanggal 10-10-2023 Deed No. 02 dated 10-10-2023 Melanjutkan Masa Jabatan s.d. 31-08-2026 Continuing the term of office until 31-08-2026	Indonesia	Indonesia
4	Taufiek Dharviandi	Direktur Operasional Operational Director	Dalam proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan In the process of fit and proper test by the Financial Services Authority	Akta No. 02 tanggal 10-10-2023 Deed No. 02 dated 10-10-2023 Masa Jabatan 5 tahun Term of Office 5 years Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh	Indonesia	Indonesia

	Otoritas Jasa Keuangan Effective after passing the fit and proper test by the Financial Services Authority
Selama tahun 2023 terdapat perubahan susunan Direksi seperti tersebut di atas.	During 2023 there will be changes to the composition of the Board of Directors as mentioned above.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is the organ of the Company that is responsible for managing the Company. The Board of Directors must, in good faith and full responsibility for the interests of the Company, manage the business and affairs of the Company while taking into account the balance of interests of all parties with an interest in the Company's activities. The Board of Directors acts carefully, prudently, and by considering various important aspects that are relevant in carrying out their duties. The Board of Directors uses the authority they have for the benefit of the Company only.

The Board of Directors has the following duties and authorities:

1. The main duties of the Board of Directors are:
 - a) Lead and manage the Company by the aims and objectives of the Company and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
 - b) Mastering, maintaining, and managing the Company's assets.
2. The Board of Directors is fully responsible for carrying out their duties for company interests in achieving its aims and objectives.
3. Each member of the Board of Directors must have good intention and full responsibility to carry out their duties for the interests and business of the Company by observing the applicable laws and regulations

- menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
- a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir
4. In carrying out their duties, the actions of the Board of Directors below must inform or obtain written approval from the Board of Commissioners, namely:
 - a. Every change in the participation of the Company's shares in other companies in the form of transfer of shares, reduction of shares, or increase of shares. The Board of Directors must obtain the approval of the Main Commissioner and a member of the Board of Commissioners. Or if the Main Commissioner is absent, then the Board of Directors action must obtain approval from 2 (two) members of the Company's Commissioners.
 - b. Legal actions to transfer, relinquish rights or make debt guarantees for all or part of the Company's assets in 1 (one) financial year, either in one transaction or several transactions that are independent or related or related to each other, must obtain the approval of the GMS attended or represented by the shareholders. Shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total number of shares with valid voting rights and decisions approved by at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total number of votes legally cast at the Meeting.
 - c. Legal actions to transfer or make as collateral for a debt or release the rights to the Company's assets above, must also be announced in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language circulating at the domicile of the Company no later than 30 (thirty) days from the date the act has committed the law.
 5. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all actions of the President Director are approved at the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven

atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

to a third party, then another member of the Board of Directors has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

6. The Board of Directors for certain actions on their responsibility, also has the right to appoint one or more representatives or proxies, by giving him or them the power for certain actions as stipulated in the Power of Attorney.

The division of duties and authorities for each member of the Board of Directors is determined by the GMS and this authority can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Frequency of Board of Directors Meetings held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 17 that "The Board of Directors of Guarantee Institutions required to hold regular meetings of the Board of Directors at least 1 (one) time in 1 (one) month".

During 2023, the Board of Directors held 33 (thirty three) meetings with the following attendance:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Yanti Rachmawati	22	4	79%
2	Agus Subrata	27	6	100%

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a company organ that has collective duties and responsibilities for supervising and providing

memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

direction to the Board of Directors and ensuring that the company implements GCG at all levels or levels of the organization.

All members of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar have met the following criteria:

- a. The assignment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS.
- b. Has complied with the fit and proper test provisions from the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law, and related GCG provisions, and has obtained approval from the Financial Services Authority.
- c. All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence, and financial reputation.
- d. All members of the Board of Commissioners do not take and or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
- e. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.
- f. All members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negara Citizenship	Domisili Domicile
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama President Commissioner	03-12-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 801/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 801/NB.11/2021	Akta No. 07 tanggal 21-12-2021 Masa Jabatan 4 tahun Deed No. 07 dated 21-12-2021 Term of Office 4 years	Indonesia	Indonesia
2	Dini Rosdini	Komisaris Independen Independent Commissioner	17-09-2019 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 532/NB.11/2019 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 532/NB.11/2019	Akta No. 39 Tanggal 26-11-2019 Masa Jabatan 4 Tahun Berakhir 26 November 2023 Dipertegas dengan Akta No. 03 Tanggal 27-11-2023 Deed No. 39 dated 26-11-2019 Term of Office 4 years Ends on November 26, 2023 Confirmed by Deed No. 03 dated 27-11-2023	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2023 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana Komisaris Independen berakhir masa jabatannya tanggal 26 November 2023 seperti tersebut di atas.

During 2023 there will be changes to the composition of the Board of Commissioners, where the Independent Commissioner's term of office ends on November 26, 2023, as mentioned above..

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties of the Board of Commissioners are:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan

1. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the Company's development plan, the Company's work plan and annual budget, implementation of the provisions of the Articles of Association and GMS decisions as well as the applicable laws and regulations.
2. Carry out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, GMS Decision,s and applicable laws and regulations.
3. Carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being responsible to the GMS.
4. Research and review the Quarterly, Semester and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the report. If the Commissioner refuses to sign the report, then the refusal and the reasons must be stated in writing.
5. Following the development of the Company's activities.
6. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues considered important for the management of the Company.
7. Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance.

For the supervisory and advisory functions as referred to above to be carried out effectively, the Board of Commissioners also has the following duties:

1. Provide opinions and advice to management regarding the determination of the vision, mission, culture, and values of the Company.
2. Conduct studies and provide opinions on business strategies that need to be implemented by the Company.

- pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
 5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
 6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
 7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
 8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
 9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

3. Conducting assessments, and providing opinions and advice on human resource management systems.
4. Conduct assessments, and provide opinions and advice on risk control systems.
5. Conduct an assessment and provide opinions and advice on the Draft Business Plan and its elaboration in the Annual Work Plan and Budget.
6. Provide approval for strategic business decisions which according to laws and regulations and GMS decisions must be approved by the Board of Commissioners.
7. Provide an assessment of the reports of internal and external auditors and provide advice to management on matters that need to be followed up.
8. Approve the Business Plan (RKAP) submitted by the Directors of the Company after conducting inspections and discussions with the Directors.
9. Periodically supervise the implementation of the Business Plan and provide opinion/approval on changes to the Business Plan by applicable regulations.
10. Submit monitoring reports to Shareholders.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners divides tasks among each member of the Board of Commissioners to specifically supervise certain areas, which are set forth both in the Board of Commissioners Decree and in the resolutions of the Board of Commissioners Coordination Meeting.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan".

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 24 (Dua puluh empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

The frequency of the Board of Commissioners' meetings held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 31 that "The Board of Commissioners of Guarantee Institutions required to hold a Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time in 3 (three) months".

During 2023, the Board of Commissioners has held 24 (Twenty-four) meetings with the following attendance:

No. <i>No.</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>		% Kehadiran <i>Attendance</i>
		Luring <i>Offline</i>	Daring <i>Online</i>	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	2	22	100%
2	Dini Rosdini	9	14	96%

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

The Board of Sharia Supervisory is an independent body recommended by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and plays an important role for the Company as a supervisor for the application of Sharia principles in every operational activity of the Sharia Business Unit.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH COMPOSITION OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negara Citizenship	Domisili Domicile
1	Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chair of The Board of Sharia Supervisory	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 Deed No. 38 date 28-11-2014	Indonesia	Indonesia
2	Khozin Abu Faqih	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of The Board of Sharia Supervisory	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 Deed No. 38 date 28-11-2014	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

During 2023 there were no changes to the composition of the Board of Sharia Supervisory.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Duties and Responsibilities of the Board of Sharia Supervisory

Duties and authorities of the Board of Sharia Supervisory:

1. The Board of Sharia Supervisory has the duty and authority to provide advice and suggestions to the Board of Directors, supervise the Sharia aspects of the operational activities of the Company's Sharia Business Unit, as well as act as a representative of the Company's Sharia Business Unit at the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2023 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Zaini Abdul Malik	4	-	100%
2	Khozin Abu Faqih	4	-	100%

2. The implementation of supervisory duties and providing advice and suggestions carried out by the Board of Sharia Supervisory as referred to above is carried out on:
 - a. Sharia Guarantee Activities;
 - b. Sharia Guarantee Contract marketed by the Company's Sharia Business Unit;
 - c. Sharia Guarantee marketing practice carried out by the Company's Sharia Business Unit.
3. The Board of Sharia Supervisory is entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding the Company's Sharia Business Units.

If the Board of Sharia Supervisory assesses that there are policies or actions of members of the Board of Directors related to the matters referred to in paragraph 2 that are not by Sharia Principles, the Board of Sharia Supervisory is obliged to ask for an explanation from members of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that are not by the Principles Sharia.

Frequency of meeting of the Board of Sharia Supervisory held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 40 that "BSS is required to hold BSS meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year".

During 2023, 4 (four) BSS meetings were held, with the following attendance:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

1. Komite Audit

- a. PT Jamkrida Jabar sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Audit, membentuk Komite Audit PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit.
 - 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit.
dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 concerning Company Committees Under the Board of Commissioners, Article 2 Components of Company Committees under the Board of Commissioners states that:

The Company's Committees under the Board of Commissioners consist of:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; and
3. Risk Monitoring and Corporate Governance Committee.

1. Audit Committee

- a. PT Jamkrida Jabar as a Guarantee Institution that has a national operational area is required to form an Audit Committee as stated in POJK Number: 3/POJK.05/2017/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions Article 29 paragraph (1).
- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 concerning the Establishment and Appointment of the Audit Committee, form the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar and appoint:
 - 1) Dini Rosdini (Independent Commissioner) as Chair of the Audit Committee.
 - 2) Prima Yusi Sari as a Member of the Audit Committee.
Each term of office commences from January 6, 2020, to December 31, 2023.
Both the Chairman and Members of the Audit Committee have expertise in accounting.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;

c. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of the internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits to assess the adequacy of internal controls include the financial reporting process;
- 2) Provide suggestions for prospective external auditors to the Board of Commissioners to be appointed and determined by the General Meeting of Shareholders, based on independence, the scope of the assignment, and audit fees;
- 3) Reviewing the financial information that will be released by the Company to the public and or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
- 4) Conduct a review of compliance with laws and regulations;
- 5) Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the external auditor regarding the services provided;

- | | |
|--|---|
| <p>6) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;</p> <p>7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;</p> <p>8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;</p> <p>9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.</p> | <p>6) Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;</p> <p>7) Examine complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;</p> <p>8) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;</p> <p>9) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.</p> |
|--|---|

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

d. Frequency of Audit Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Dini Rosdini	4	2	100%
2	Prima Yusi Sari	4	2	100%

e. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

e. Audit Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Mengulas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal (SPI) 2023 Reviewing the 2023 Annual Supervision Work Program of the Internal Supervisory Unit (ISU).	Terlaksana Done
2	Pemantauan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI Triwulanan Monitoring of the ISU Quarterly Annual Supervision Work Program	Terlaksana Done
3	Mengulas Kinerja Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan Reviewing Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial Performance	Terlaksana Done

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
4	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2024 Compilation of the 2024 Audit Committee Work Program	Terlaksana Done
5	Pemantauan Proses Audit Eksternal External Audit Process Monitoring	Terlaksana Done
6	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan 2022 Follow-up Monitoring of Public Accounting Firm (KAP) Audit Findings on the 2022 Financial Report	Terlaksana Done
7	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 oleh KAP Discussion of the Audit Results of the Company's 2022 Financial Statements by KAP	Terlaksana Done
8	Mengulas RKAP 2024 Reviewing the 2024 Business Plan	Terlaksana Done
9	Mengevaluasi Kinerja KAP dan Memberikan Rekomendasi Pengajuan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2023 Evaluating KAP Performance and Providing KAP Submission Recommendations for the 2023 Financial Report Audit	Terlaksana Done
10	Mengulas Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2023 Reviewing the 2023 Financial Report Prognosis	Terlaksana Done
11	Melakukan Penilaian Tata Kelola Perusahaan Conduct Corporate Governance/CG Assessment	Terlaksana Done
12	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain Sharing and Discussion with OJK and other Jamkrida	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE PROFILE

DINI ROSDINI

Ketua Komite Audit
Chair of the Audit Committee



PRIMA YUSI SARI

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Palembang, 24 Agustus 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Palembang, on August 24, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2023.
- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctor of Accounting Science at the Padjadjaran University in 2023.
- Master of Management Science at the University of Indonesia in 2000.
- Bachelor of Accounting at Padjadjaran University in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar from January 6, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1999-sekarang).
- Anggota Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Anggota Komite Audit PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

EMPLOYMENT HISTORY

- Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (1999-present).
- Member of the Audit Committee of PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Member of the Audit Committee of PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 3) Muji Rohmad sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi,
 dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.
 Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang akuntansi.
 Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang ilmu manajemen.

- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

2. Nomination and Remuneration Committee

- a. Apart from the Audit Committee, the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar may form other committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.
- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number:KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/ 2021 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, form the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar and appoint:
 - 1) Dini Rosdini (Independent Commissioner) as Chair of the Nomination and Remuneration Committee.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu as Independent Member of the Nomination and Remuneration Committee.
 - 3) Muji Rohmad as Member of the Nomination and Remuneration Committee.
 with their respective terms of office starting from August, 02, 2020, to December, 31, 2023.
 The Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in accounting.
 Independent members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in management.
- c. Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - d) Struktur remunerasi;
 - e) Kebijakan atas remunerasi;
 - f) Besaran atas remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;

In carrying out its functions, the Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) Position composition of members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS;
 - b) Policies and criteria required in the Nomination process;
 - c) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS;
 - d) Remuneration structure;
 - e) Policy on remuneration;
 - f) Amount of remuneration.
- 2) Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or Board of Sharia Supervisory based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;
- 3) Assist the Board of Commissioners in assessing target achievement and performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS;
- 4) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity-building programs for members of the Board of Directors and or

- 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Board of Commissioners and or BSS;

- 5) Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS to submit to the GMS;
- 6) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) year.

d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

d. Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Dini Rosdini	3	1	100%
2	Wa Ode Zusnita Muizu	3	1	100%
3	Muji Rohmad	3	1	100%

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasiny

e. Nomination and Remuneration Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Penyusunan kajian dan permintaan pendapat hukum kepada pihak Independen Preparation of studies and requests for legal opinions from independent parties	Terlaksana Done
2	Pemberian arahan kepada manajemen terkait pengisian kekosongan jabatan pada SOTK Providing direction to management regarding filling vacancies in the Organizational Structure and Work Procedures	Terlaksana Done
3	Review Bisnis Proses dan Kelengkapan Prosedur Operasi Standar (SOP) Perusahaan Reviewing the Company's Standard Operating Procedures (SOP)	Terlaksana Done
4	Review Kinerja SDM Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Review HR Performance and Monthly, Quarterly, Semester and Annually	Terlaksana Done
5	Penyusunan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Tahun 2024 Compilation of the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2024	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

DINI ROSDINI

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chair of the Nomination and Remuneration Committee



PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004.
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctoral Degree in Management at Padjadjaran University in 2008.
- Master of Management at Padjadjaran University in 2004.
- S1 Management at Halu Oleo University in 2000.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from August 2, 2020, to December 31, 2023.

WA ODE ZUSNITA MUIZU

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Kendari, 14 Oktober 1977

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Kendari, October 14, 1977

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2008.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (s.d. sekarang).

EMPLOYMENT HISTORY

Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (until now).



MUJI ROHMAD

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bantul, 15 Agustus 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bantul, August 15, 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN
D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998.

EDUCATIONAL BACKGROUND

D4 Accounting at the State College of Accountancy (STAN) in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from August 2, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (2018-sekarang).
- Manajer Umum Keuangan PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Kepala Divisi Keuangan, Akunting, & Perpajakan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2000-2009).

EMPLOYMENT HISTORY

- Head of Finance and General Affairs Division of PT Jamkrida Jabar (2018-present).
- Finance General Manager of PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Head of Finance, Accounting & Taxation Division Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor at BPKP Representative Office of South Sulawesi Province (2000-2009).

3. Komite Pemantau Risiko

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, membentuk Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:

- 1) Muhammad Taufiq Budi Santoso (Komisaris Utama) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 2) Subarman Basarah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
- 3) Membantu Dewan Komisaris dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* dan pegawai Perseroan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;
- 4) Mendukung terwujudnya budaya Perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi,

3. Risk Monitoring Committee

- a. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/ 2022 dated March 1 2022 concerning the Formation and Appointment of the Risk Monitoring Committee, formed the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar and appointed:

- 1) Muhammad Taufiq Budi Santoso (President Commissioner) as Chair of the Risk Monitoring Committee.
- 2) Subarman Basarah as Member of the Risk Monitoring Committee.

each term of office commencing from 01 March 2022 to 01 March 2026.

- b. Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

- 1) Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies;
- 2) Monitor and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit;
- 3) Assisting the Board of Commissioners in creating a conducive working climate and becoming a means for stakeholders and employees of the Company to report matters that can cause corporate losses, both financial and non-financial, which can damage the image and sustainability of the company's business;
- 4) Supporting the realization of a corporate culture based on the principles of transparency,

- akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan;
- 5) Menerima laporan/pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar. Kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Perseroan;
 - 6) Melakukan penelaahan lebih lanjut atas informasi dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 7) Memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*) antara lain jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor, isi laporan, perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, pelecehan, diskriminasi, catatan yang merugikan, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya;
 - 8) Memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran hanya kepada Dewan Komisaris/Direksi dan kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari pelapor yang bersangkutan;
 - 9) Memberikan keputusan tindak lanjut laporan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan;
 - 10) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dalam rangka perbaikan system dan

- accountability, responsibility, independence and fairness;
- 5) Receiving reports/complaints/ providing information submitted either directly or indirectly in connection with alleged acts that violate laws, regulations/ standards. Code of ethics, and policies, as well as other similar actions in the form of direct threats to the public interest, as well as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) that occur within the Company;
 - 6) Conduct a further review of the information and reports of alleged violations received;
 - 7) Protecting the whistleblower, including guarantees for the confidentiality of the complainant's identity, report contents, protection against the possibility of threats, intimidation, punishment, termination of employment, demotion, harassment, discrimination, adverse records, or unpleasant actions other;
 - 8) Provide information on the progress of reporting violations only to the Board of Commissioners/Directors and the reporter accompanied by a written request from the reporter concerned;
 - 9) Provide decisions on follow-up reports based on sufficient and reliable evidence;
 - 10) Provide recommendations to related work units to improve systems and work processes accompanied by supporting documents;
 - 11) Reporting the implementation of monitoring the implementation and enforcement of GCG to the

- proses kerja disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
- 11) Melakukan pelaporan penyelenggaraan pemantauan penerapan dan penegakan GCG kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 12) Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman whistleblowing system dan penerapannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
 - 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data informasi Perusahaan.

Board of Commissioners and Directors;

- 12) Evaluate the effectiveness of the whistleblowing system guidelines and their application to the Board of Commissioners and Directors
- 13) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;
- 14) Maintain the confidentiality of documents, Company information data.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

c. Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings

No. <i>No.</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>		% Kehadiran <i>Attendance</i>
		Luring <i>Offline</i>	Daring <i>Online</i>	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	0	6	100%
2	Subarman Basarah	0	6	100%

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

d. Risk Monitoring Committee Work Program and Its Realization

No. <i>No.</i>	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
1	Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan <i>Evaluating Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial and Non-Financial Performance</i>	Terlaksana <i>Done</i>
2	Melakukan Review dan Evaluasi Proses Bisnis dan SOP Penjaminan/Klaim/Regaransi/Investasi <i>Reviewing and Evaluating the Business Process and Standard Operating Procedures of Credit Guarantee/Claim/Re-Insurance/Investment</i>	Terlaksana <i>Done</i>
3	Melakukan Evaluasi Profil Risiko per Skim Kredit per Mitra Bisnis secara Triwulanan <i>Evaluating the Risk Profile of Credit Schemes on a Quarterly Basis</i>	Terlaksana <i>Done</i>
4	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko untuk Tahun 2023 <i>Compilation of the Risk Monitoring Committee Work Program for 2023</i>	Terlaksana <i>Done</i>

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

No. <i>No.</i>	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
5	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain Sharing Session and Discussion with OJK and other Jamkrida	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE

MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chair of the Risk Monitoring Committee



SUBARMAN BASARAH

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Surabaya, 25 Juni 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Surabaya, on June 25, 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Diploma Program in Oracle8i DBA and Software Analyst at Princeton Information Technology Center, Glenside, Pennsylvania, USA in 2003.
- Bachelor of Science in Environmental Engineering at Institut Teknologi Bandung, in 1994.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from March 1, 2022 to March 1, 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Maret 2022-sekarang).
- Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Staf Ahli Direksi PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

EMPLOYMENT HISTORY

- Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (March 2022-present).

- Program Diploma Oracle8i DBA dan Software Analyst di Pusat Teknologi Informasi Princeton, Glenside, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2003.
- S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung tahun 1994.

- Director of Marketing and Business Development of PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Director of PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager of PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Expert Staff to the Board of Directors of PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

4. Kewenangan Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, dan informasi tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Divisi yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS.
- d. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- e. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk tim yang bersifat *ad-hoc* dengan kriteria dan periode pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

4. Authority of the Company's Committees Under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Company's Committees Under the Board of Commissioners have the following powers:

- a. Access all documents, records, and information about employees, funds, assets, and resources of the Company related to the implementation of their duties and functions.
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, BSS, Division that manages Human Resources (HR), employees, and other related parties.
- c. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS.
- d. If necessary, the Committee may involve experts and or consultants/independent parties needed to assist in carrying out their duties, by obtaining written approval from the Board of Commissioners.
- e. If necessary, the Committee may form an ad-hoc team with the criteria and implementation period adjusted to the needs and type of work.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
2. Komite Penjaminan;
3. Komite Klaim; dan
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.

1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan berikut perubahannya, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K)

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE DIRECTORS

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees Under the Board of Directors, Article 2 Components of Company Committees Under the Board of Directors states that:

The Company's Committees under the Board of Directors consist of:

1. Investment Committee;
2. Guarantee Committee;
3. Claims Committee; And
4. Employee Nomination and Remuneration Committee.

1. The Investment Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson doubles as a member, who is the Director of Finance, as well as other members who may come from:
 - a. President Director for an investment value of more than IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah);
 - b. Division Heads and/or Section Heads in charge of Finance and General Affairs functions; And
 - c. Head of Division and/or Head of Section in charge of the Risk Management function.

2. The Guarantee Committee consists of at least 3 (three) members, with membership requirements as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide Guarantees and Sign Guarantee Principle Approval Letters (SP3) as well as Guarantee Certificates and their amendments, as well as Directors Decree Number: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide on Kafalah and Sign Kafalah Principle Approval Letters (SP2K) as well as Kafalah Certificates and their amendments.

serta Sertifikat Kafalah berikut perubahannya.

3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:

- a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:

- 1) Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).

- 2) Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit konstruksi/pengadaan barang.

Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.

- b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
- c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang

3. The Claims Committee consists of at least 3 (three) members, with the provisions of members as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 concerning Authority to Decide and Sign Credit Claims Decisions, namely:

- a. That the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of submissions:

- 1) Up to an amount of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiahs) for all types of credit, including salary deduction credit, both direct salary deduction credit and through Kopkar/Koppeg disbursed by Collateral Recipients (Banks and Non-Banks)).

- 2) Up to an amount of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) for construction/procurement loans.

The Claims Committee is chaired by the Head of the Risk & Claims Management Division and consists of the Head of the Guarantee Division and the Head of the Finance & General Affairs Division.

- b. Whereas the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of claims submitted as mentioned in point up to an amount of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs), the Claims Committee is chaired by the Director of Finance, with members consisting of the Director of Operations, Head of Guarantee Division, Head Finance & General Affairs Division, as well as Head of Risk & Claim Management Division.
- c. Whereas the application for credit claims for each Guaranteed with a total claim submission of more than IDR 500,000,000.00 (five hundred

memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.

million rupiahs) and other special issues that require a joint decision of the Board of Directors, the Claims Committee is chaired by the Main Director, with full members of the Board of Directors, Head Guarantee Division, Head of Finance & General Affairs Division, and head of Risk & Claim Management Division.

4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direksi;
 - b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

4. The Employee Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson also serves as a member, who is the Director of Finance, and other members may come from:
 - a. Directors;
 - b. Head of Division or Head of Section and or Staff in charge of the Human Resources (HR) management function;
 - c. Head of Division or Head of Section who represents each Division in the Company.

5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Direksi

5. Work programs related to the duties and responsibilities of the Committees under the Board of Directors

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees under the Board of Directors, the duties and responsibilities of other committees are as follows:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

- a. The duties and responsibilities of the Investment Committee include:
 - 1) Assisting the Board of Directors in formulating investment policies and supervising the implementation of the investment policies that have been set;
 - 2) Review and provide advice to the head of the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company;

- | | |
|--|--|
| <p>3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.</p> | <p>3) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.</p> |
| <p>b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan; 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan; 3) Memberikan keputusan penjaminan; 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur; 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. | <p>b. The duties and responsibilities of the Guarantee Committee include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assisting the Board of Directors in formulating guarantee operational policies, supervising and implementing established guarantee operational policies; 2) Conduct feasibility analysis and risk management of each application for guarantee; 3) Provide guarantee decisions; 4) Sign SP3 and SP on behalf of the Guaranteed/Debtor; 5) Review and provide advice to the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company; 6) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information. |
| <p>c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan; 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim; 3) Memberikan keputusan klaim; 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. | <p>c. The Claims Committee's duties and responsibilities include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assisting the Board of Directors in formulating claim policies and supervising the implementation of established claim policies; 2) Perform feasibility analysis and risk management of each claim submission; 3) Provide a claim decision; 4) Review and provide advice to the Board of Directors regarding the potential conflict of interest of the Company; 5) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information. |
| <p>d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:</p> | <p>d. The duties and responsibilities of the Employee Nomination and Remuneration Committee include:</p> |

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - a) Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan;
 - b) Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau *variable*;
 - c) Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - d) Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
- 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- 1) Provide recommendations to the Board of Directors regarding:
 - a) Promotion nominations, transfers, and demotions for employees;
 - b) Remuneration structure for Employees which includes salaries, incentives, and or fixed and or variable benefits;
 - c) Policy on remuneration for employees;
 - d) Amount of remuneration for employees.
- 2) Assisting the Board of Directors in assessing target achievement and performance by the remuneration received by each employee;
- 3) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) a year;
- 4) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan
Satuan Pengawas Internal

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

- 1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDITOR, AND EXTERNAL AUDITOR FUNCTIONS

1. Compliance function

- a. Member of the Board of Directors in charge of the compliance function

President Director

- b. Work units or employees carrying out the compliance function

Corporate Secretary and
Internal Supervisory Unit

- c. Implementation of compliance with laws and regulations

- 1) Corporate Secretary:

The intention of official position:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Petugas Kepatuhan).

Enforce compliance with industry authority regulations and the provisions of Good Corporate Governance (Compliance Officer).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
- c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Mengikuti perkembangan bisnis inti perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan.
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

Duties and Authorities:

- a) Publish the latest information about the Company in various media, both print and electronic
- b) Facilitate the recording and storage of minutes of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners meetings.
- c) Organizing Management Meetings, Board of Directors and Board of Commissioners meetings (Management Meetings) and General Shareholders Meetings.
- d) Follow the development of the company's core business, especially changes to laws and regulations.
- e) Provide advice to the Board of Directors regarding compliance with applicable regulatory provisions.

2) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

2) Internal Supervisory Unit (ISU)

The intention of the official position:

Assisting the Board of Directors in planning, managing, supervising, and controlling operational and financial audit activities as well as SOP preparation activities in the Company within the limits of applicable government standards and regulations to ensure compatibility between implementation and existing standards and or regulations.

Tugas dan Kewenangan:

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
- b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadwalkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan.
- c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi.
- d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya.
- f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil

Duties and Authorities:

- a) Designing, proposing, implementing, and evaluating SPI program/policy plans to support the achievement of company goals.
- b) Plan and create an audit program, and schedule audit implementation to ensure compliance with the expected regulations/procedures/efficiency/management control functions.
- c) Supervise and monitor operational activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure compliance with procedures and improve efficiency.
- d) Supervise and monitor financial activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure that the distribution of cash and its use is by procedures and efficiently.
- e) Coordinate with related departments in preparing standard operating procedures and procedures (SOP); manage and monitor its implementation to ensure the existence and suitability of its implementation.
- f) Control & monitor the implementation of program audits and report audit findings to management accompanied by recommendations for improvement.
- g) Formulating, compiling, proposing, and implementing policies,

- temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI.
 - h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.

- systems, and procedures, as well as SOP Work Unit ISU.
- h) Carry out and supervise the implementation of GCG in their respective fields of work.

a. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

a. Company Financial Soundness Level

The company has an adequate level of financial soundness, with the parameters of liquidity ratios, gearing ratios, profitability ratios, and good corporate governance self-assessments, as stated in the table below:

No. No.	Jenis Rasio Ratio Type	Tahun 2023 Year 2023
1.	LIKUIDITAS Liquidity	
a.	Current Ratio Current Ratio	273,61%
2.	GEARING RATIO	
a.	Gearing Ratio Produktif Productive Gearing Ratio	8,50 Kali/Times
b.	Total Gearing Ratio Total Gearing Ratio	28,17 Kali/Times
3.	RENTABILITAS Profitability	
a.	Rasio Return on Asset (ROA) Return on Assets (ROA) Ratio	2,01%
b.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO)	92,09%
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa Claims to Compensation Revenue Ratio	74,65%
4.	Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Self-Assessment	

No. No.	Jenis Rasio Ratio Type	Tahun 2023 Year 2023
	Hasil penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) dengan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin. The results of the self-assessment of good corporate governance PT Jamkrida Jabar scored 90.01 (ninety point zero one) with the title "Very Good", by the Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.	

- b. Unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen

- b. Work units or functions that handle and resolve consumer complaints

No. No.	Penanggung Jawab Person Responsible	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi Head of Work Unit/Executor of Functions
1	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko, Klaim, & Subrogasi Head of Risk Management, Claim, & Subrogation Division
2	Irwan Budhi Setiawan	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
3	Fahmi Jamiul Ulum	Kabag. Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit Section

2. Fungsi Auditor Internal (SPI)

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit
- 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas

2. Internal Auditor Function (ISU)

The effectiveness and scope of implementation of the duties of the internal auditors in assessing all aspects and elements of activities.

- a. Scope of audit work
- 1) Examine and assess to ensure that the Company's internal control system is adequate, and functions effectively, efficiently, and economically in achieving the goals and objectives of the Company, ensuring the reliability of financial information and operational information as well as maintaining and protecting the Company's assets.
 - 2) Carry out operational and compliance audits of management activities aimed at assessing the efficiency and

operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
- 4) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
- 5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
- 6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- 1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
- 2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
- 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

- 1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan

effectiveness of company operations, reliability of company information and reporting, and compliance with laws and regulations.

- 3) Carry out follow-up audits (special audits) on cases that have indications of fraud.
- 4) Carry out a performance audit on the work plan and program of each work unit and assess its conformity with company goals and assess risk management.
- 5) Carry out special/additional assignments that are relevant to the scope of ISU tasks.
- 6) The scope and frequency of audits conducted by ISU depend on certain situations and conditions such as the results of previous audits, the materiality of the risk level surrounding an activity, the adequacy of internal controls, and the availability of ISU resources.

b. The structure or position of the internal audit work unit

- 1) ISU is directly under the President Director.
- 2) ISU is led by a Head of SPI.
- 3) The Head of ISU is appointed and dismissed by the President Director.

c. Internal auditor independence

- 1) ISU organizationally and personally must be independent of the activity being audited so that it can provide impartial and prejudiced opinions and recommendations in the implementation and reporting of the audit. Independence can be achieved through position in the

dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:

- a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
- a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan

company and auditor objectivity, namely:

- a) The Head of ISU must be placed in a position directly under the Main Director so that the implementation of the internal audit has the full support of the Board of Directors and the company's work units, without the interference of any party;
 - b) ISU is not allowed to be involved in operational activities which include planning, development, implementation, and reporting of company work units to ensure the credibility of the results of their supervision.
 - c) ISU must be free from the intervention of any party in determining the scope of work, and execution of work, as well as in communicating audit results to the authorities.
 - d) ISU is prohibited from having a sense of fear, loyalty, and ambition that can affect the activities being carried out so that it can affect the responsibilities of the assignment.
- 2) ISU is said to act objectively when it is independent and unbiased and avoids the possibility of a conflict of interest.
- a) ISU must have an objective mental attitude, be independent and avoid possible conflicts of interest in carrying out supervisory duties.

- dalam melakukan tugas pengawasan.
- b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait.
- 3) SPI harus menjaga integritas melalui:
- a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
- Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada
- b) ISU must be sure that they can make professional decisions freely, their work results are reliable, trustworthy, and free from outside influence so that they can produce objective reports and can be used by all related parties.
- 3) ISU must be maintain integrity through:
- a) ISU is prohibited from receiving compensation in any form from employees, clients, or company partners so that it can affect their professional judgment.
 - b) ISU must show an honest and serious mental attitude in carrying out its duties and fulfilling its responsibilities.
 - c) Isu may not knowingly engage in actions or activities that may damage the image.
- d. Job description of the internal audit work unit
- In carrying out its duties, SPI has duties and responsibilities to:
- 1) Assist the Board of Directors in fulfilling their responsibilities in managing the company, by way of auditing compliance, operations, and performance of all activities of the company's work units in an integrated manner on compliance, completeness, and use of accounting, financial and other controls as well as providing suggestions for improvement towards on achieving the goals

- pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
- 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
 - 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
 - 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
 - 5) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
 - 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
 - 7) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
 - 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit

and objectives that have been set in each work unit and the company.

- 2) Assist the Board of Directors in efforts to improve the realization of GCG, encourage the effectiveness of the company's internal control system, improve risk management and company performance, and apply business ethics;
- 3) Helping the Board of Directors to pay attention to changes in the industrial environment, business risks that may arise, opportunities for efforts to increase efficiency and effectiveness, and other matters that affect the company's performance;
- 4) Encouraging work units within the Company in increasing the effectiveness of the internal control system and achieving work unit performance targets to achieve the Company's vision, mission, goals, and objectives;
- 5) Provide an assessment of the adequacy and effectiveness of the company's internal control system and risk management of the company's activities;
- 6) Report on important matters relating to weaknesses and opportunities for improvement in the process of controlling the company's financial and operational activities;
- 7) Identify the activities to be audited, evaluate and assess the level of risk of these activities about the audit plan;
- 8) Provide regular reports on the results of the semester, annual and follow-up audits (special audits) as well as the adequacy of audit resources;
- 9) Provide recommendations for improvements to the company's

lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit; 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan; 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).	business processes and internal controls; 10) Monitor the implementation and accuracy of the follow-up implementation of the Audit Report (AR).
e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI Perusahaan belum memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI yang definitif di tahun 2023.	e. Profile of Head of Internal Audit Unit/ISU The company does not yet have a definitive Head of Internal Audit/ISU Work Unit in 2023.
f. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI Jumlah pegawai yang berada di bawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar saat ini berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SPI dan staf.	f. Number of employees in the Internal Audit Work Unit/ISU The number of employees under the PT Jamkrida Jabar ISU Work Unit currently amounts to 2 (two) people consisting of the Acting Head of ISU and staff.
g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.	g. Report on the results of the implementation of internal audit tasks The report on the results of the implementation of the internal audit is submitted directly by the internal audit to the Main Director. The report contains recommendations and corrective actions, as well as responses from related sectors.
3. Fungsi auditor eksternal Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal	3. The function of the external auditor The effectiveness of the implementation of the external auditor's duties and the compliance of the Guarantee Agency with the provisions, including among others regarding the provision of all accounting records and supporting data needed for the

memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketepatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.

external auditor, so as to enable the external auditor to give his opinion regarding the fairness, compliance, and conformity of the Guarantee Institution's financial statements with the applicable auditing standards .

At the time of the inspection by the External Auditor, good communication and cooperation between the External Auditor and Management had been carried out intensively.

The Board of Directors supports findings related to accounting policies, interpretations of applicable accounting standards, developments in OJK regulations, and others.

The Board of Directors also actively monitors the follow-up of the External Auditor's audit findings so that it is hoped that similar findings will not be repeated in the future.

Implementation of the External Audit Function has been going well, which can be seen from the following:

- a. The company always appoints a Public Accountant (PA) and a Public Accounting Firm (PAF) that are registered with OJK.
- b. Appointment of the same PA and PAF by the Company for no more than 5 (five) consecutive financial years. The PAF that has audited the Company's financial statements for the last 5 (five) years, can be seen in the table below.
- c. The appointment of PA and PAF has obtained approval and recommendation from the Board of Commissioners.
- d. Assignment of inspection to PA has fulfilled the following aspects:
 - 1) Capacity of appointed PAF;
 - 2) Legality of work agreements;
 - 3) The scope of the audit;
 - 4) Professional standards of public accountants; and
 - 5) Communication between OJK and the appointed PAF.

- e. AP yang ditunjuk telah:
- 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- e. The appointed PA has:
- 1) Deliver audit results and management letters to the Company promptly.
 - 2) Able to work independently, and meet the professional standards of public accountants and work agreements as well as the established audit scope.

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar selama 5 (lima) tahun terakhir:

PA and PAF who have audited the financial statements of PT Jamkrida Jabar for the last 5 (five) years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi OJK Name of Public Accountant and OJK Registration Number	Biaya Auditor Eksternal External Auditor Fee (Rp)
2023	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	177.000.000
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	82.500.000

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
 - a. The Board of Directors is responsible for implementing risk management strategies and policies, internal control systems, and information technology governance and provides

- | | |
|--|---|
| <p>memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektivitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.</p> | <p>reports to the Board of Commissioners.</p> <p>b. The Board of Commissioners oversees the overall level of effectiveness and implementation of policies.</p> |
| <p>2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi
Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.</p> | <p>2. Adequacy of policies, procedures, and use of information technology
Risk management policies, procedures, and the use of information technology require the company to comply with the rules and regulations that have been set.</p> |
| <p>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi
Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.</p> | <p>3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks of using information technology
This policy establishes risk management principles and processes which are carried out in stages: risk identification, risk assessment, risk management, and monitoring and evaluation.</p> |
| <p>4. Struktur organisasi sistem informasi
Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:</p> <p>a. Staf SMI sebagai penanggung jawab pengembangan operasional teknologi informasi..</p> <p>b. Staf SMI sebagai penanggung jawab infrastruktur teknologi informasi..</p> | <p>4. Information system organizational structure
PT Jamkrida Jabar Information Management System Management Organization consists of:</p> <p>a. IT staff as the person in charge of information technology operational development.</p> <p>b. IT staff as the person in charge of information technology infrastructure.</p> |
| <p>5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman <i>Disaster Recovery Plan</i> Perseroan.</p> | <p>5. Internal control system for the use of information technology
The internal control system for the use of information technology refers to the SOP for Management Information Systems and the Company's Disaster Recovery Plan Guidelines.</p> |
| <p>6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh</p> | <p>6. Comprehensive internal control system</p> |

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

Compliance with risk policies and guidelines is regularly monitored by the work unit concerned.

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN KARYAWAN

IMPLEMENTATION OF REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF SHARIA SUPERVISORY, AND EMPLOYEES

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

1. Disclosure of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory (BSS).

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura.

- a. Remuneration in non-natura forms.

Pada tahun 2023 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

In 2023 the Company provides non-natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely in the form of basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances (especially for Directors), holiday allowances, incentives, and bonus originating from the Company's net profit.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non tunai.

- b. Other facilities in natura forms/non-cash.

Pada tahun 2023 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu tunjangan transportasi dan asuransi kesehatan.

In 2023 the Company provides natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely transportation allowances and health insurance.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

2. Disclosure of remuneration packages or policies within 1 (one) year

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

- a. Packages or remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS determined by the GMS.

Pada tahun 2023, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

2 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah.

In 2023, the GMS determined the remuneration policy in 1 (one) year for the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, including basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances, holiday allowances, incentives, and bonus-originating from the Company's net profit.

- b. Remuneration and other facilities for all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS include at least the number of members of the Board of Directors, the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the BSS and the total number of remuneration policies and other facilities.

2 Directors, 2 Commissioners, and 2 Board of Sharia Supervisory.

Jumlah yang diterima dalam satu tahun <i>Amount received in one year</i>		Remunerasi *) <i>Remuneration *)</i>	Fasilitas lain dalam bentuk natura**) <i>Other facilities in kind natura form**)</i>
Direksi Board of Directors	Jumlah Direksi Number of Directors	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	6.521,03	457,6
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board Commissioners	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	2.214,76	211,82
Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory	Jumlah DPS Number of BSS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	504,2	22,1

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

Information:

*) Including salary and other fixed income, including benefits, share-based compensation, bonus, and other forms of non-natura remuneration

**) Housing, transportation, health insurance, and so on.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

- c. The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS who receive remuneration packages in 1 (one) year are grouped according to income level as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	2	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) up to IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	0	2	0

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Above IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)	0	0	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and below	0	0	2

Jumlah yang tercantum diambil dari total Pendapatan (THP) Bruto per Tahun Buku 2023
The amount listed is taken from the total Gross Take Home Pay per Fiscal Year 2023

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

3. The ratio of the highest and lowest salaries

The salary that is compared in the salary ratio is the imbalance received by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees in the last month of the reporting year.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

The ratio of salary and lowest, in the following comparison scale:

- the ratio of the highest and lowest employee salaries;
- the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Directors;
- the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Commissioners; and
- the highest salary ratio for members of the Board of Directors and employees.

	Rasio gaji Salary ratio
	a) 5,17 : 1
	b) 1,17 : 1
	c) 1,11 : 1
	d) 2,93 : 1

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui *website* www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Company has prepared and presented reports by the provisions regarding the transparency of the Company's financial and non-financial conditions with the following details:

1. The Company has submitted Annual Financial Reports promptly to the Financial Services Authority and other interested parties.
2. The Company's Annual Financial Report is published through the website www.jamkrida-jabar.co.id and print media.
3. Information regarding guarantee service products issued by the company is available on the website.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN

1. Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru.
 - b. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar melalui investasi sebagai resiprokal.
 - c. Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja serta efisiensi proses internal dalam layanan klaim.
 - d. Meningkatkan tingkat imbal hasil investasi melalui optimalisasi portofolio investasi.
 - e. Meningkatkan subrogasi sebagai salah satu upaya recovery klaim.
 - f. Mengembangkan pasar secara nasional.
 - g. Menurunkan nilai piutang re/kogaransi.
 - h. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.

CORPORATE STRATEGIC PLAN

1. Short-term strategic plan for 1 (one) year.
 - a. Strengthening the existing and new guarantee product portfolio.
 - b. Strengthen and develop partnership networks for market penetration & expansion through reciprocal investment.
 - c. Increase the effectiveness and standardization of work processes as well as the efficiency of internal processes in claims services.
 - d. Increasing the level of investment returns through optimizing the investment portfolio.
 - e. Increasing subrogation as a claim recovery effort.
 - f. Developing the market nationally.
 - g. Reduce the value of re/co-guarantee receivables.
 - h. Increasing HR competency and productivity.
 - i. Increasing the culture of risk awareness and implementing prudent risk management.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan <i>risk management</i> yang <i>prudent</i>. j. Meningkatkan pendapatan, <i>market share</i>, dan <i>profitability</i> dengan mengedepankan <i>underwriting</i> yang <i>prudent</i>. k. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi secara berkelanjutan. l. Meningkatkan kualitas <i>cost control</i> khususnya pada biaya-biaya operasional. <p>2. Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas jaringan pemasaran melalui penambahan kantor pemasaran/unit pelayanan di beberapa kabupaten/kota. b. Mengintegrasikan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi secara terpadu. <p>3. Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4. b. Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran melalui pembukaan kantor perwakilan. c. Melakukan <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah dengan syarat bahwa kontribusi kinerja Penjaminan syariah mencapai minimal 30% dari total portofolio penjaminan. <p>4. Rencana Kerja & Anggaran Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proyeksi Volume Penjaminan tahun 2024 adalah senilai Rp13,19 triliun atau naik sebesar 18,09% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp11,17 triliun, dimana untuk penjaminan sektor produktif tumbuh sebesar 10,84% dan sektor non produktif tumbuh sebesar 24,40%. | <ul style="list-style-type: none"> j. Increase revenue, market share and profitability by prioritizing prudent underwriting. k. Developing information technology applications sustainably. l. Improving the quality of cost control, especially operational costs. <p>2. Medium-term strategic plan for 3 (three) years.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Expanding the marketing network by adding marketing offices/service units in several districts/cities. b. Integrated information technology infrastructure and applications in an integrated manner. <p>3. Long-term strategic plan for 5 (five) years.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Expanding services and marketing outreach to BUKU 3 and 4 banking. b. Strengthening and expanding the marketing network through opening representative offices. c. Perform Sharia Business Unit Spin-Off with the condition that the performance contribution of Sharia Guarantee reaches a minimum of 30% of the total guarantee portfolio. <p>4. Annual Work Plan & Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The projected Guarantee Volume in 2024 is IDR 13.19 trillion or an increase of 18.09% compared to the 2023 Prognosis of IDR 11.17 trillion, where guarantees for the productive sector will grow by 10.84% and the non-productive sector will grow by 24.40%. b. The projected Accrual Base Guarantee Fee (IJP) Income in 2024 is IDR 236.74 billion or an increase of 24.00% compared to the |
|--|--|

- b. Proyeksi Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Accrual Basis tahun 2024 adalah senilai Rp236,74 miliar atau naik sebesar 24,00% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp190,92 miliar, dimana untuk IJP Accrual Basis sektor produktif tumbuh sebesar 29,98% dan sektor non produktif tumbuh sebesar 20,62%.
 - c. Proyeksi Total Aset tahun 2024 adalah senilai Rp692,17 miliar atau naik sebesar 13,48% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp609,93 miliar.
 - d. Proyeksi Total Ekuitas tahun 2024 adalah senilai Rp318,27 miliar atau naik sebesar 1,24% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp314,38 miliar.
 - e. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2024 adalah senilai Rp114,88 miliar atau naik sebesar 24,35% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp92,38 miliar.
 - f. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 adalah senilai Rp259,02 miliar atau naik sebesar 27,49% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp203,17 miliar.
 - g. Proyeksi Laba Tahun Berjalan tahun 2024 adalah senilai Rp8,12 miliar atau naik sebesar 18,31% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023 senilai Rp6,87 miliar.
 - h. Proyeksi Management Fee tahun 2024 adalah senilai Rp8,93 miliar atau turun sebesar 10,81% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp10,01 miliar.
 - i. Proyeksi Biaya Akuisisi tahun 2024 adalah senilai Rp40,62 miliar atau naik sebesar 30,56% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp31,11 miliar.
- 2023 Prognosis of IDR 190.92 billion, where for the IJP Accrual Basis the productive sector grows by 29.98% and the non-productive sector grew by 20.62%.
- c. The projected Total Assets in 2024 are IDR 692.17 billion or an increase of 13.48% compared to the 2023 Prognosis of IDR 609.93 billion.
 - d. The projected Total Equity in 2024 is IDR 318.27 billion or an increase of 1.24% compared to the 2023 Prognosis of IDR 314.38 billion.
 - e. The projected Total Short Term Liabilities in 2024 is IDR 114.88 billion or an increase of 24.35% compared to the 2023 Prognosis of IDR 92.38 billion.
 - f. The projected Total Long Term Liabilities in 2024 is IDR 259.02 billion or an increase of 27.49% compared to the 2023 Prognosis of IDR 203.17 billion.
 - g. The projected Profit for the Current Year in 2024 is IDR 8.12 billion or an increase of 18.31% compared to the 2023 Prognosis of IDR 6.87 billion.
 - h. The projected Management Fee in 2024 is IDR 8.93 billion or a decrease of 10.81% compared to the 2023 Prognosis of IDR 10.01 billion.
 - i. The projected Acquisition Costs in 2024 are IDR 40.62 billion or an increase of 30.56% compared to the 2023 Prognosis of IDR 31.11 billion.
 - j. The projected Investment Income in 2024 is IDR 17.57 billion or a decrease of 1.61% compared to the 2023 Prognosis of IDR 17.86 billion, this is due to a decrease in investment managed funds as a result of the bailout funds not yet being replaced for the payment of claim expenses which are the parties' obligations. Reinsurance.
 - k. The projected Subrogation Income in 2024 is IDR 3.36 billion or an increase of 23.81% compared to the 2023 Prognosis of IDR 2.72 billion.
 - l. The projected Claim Expenses in 2024 are IDR 81.73 billion or a decrease of 0.68% compared to the 2023 Prognosis of IDR 81.18 billion. This decrease is based on the

- j. Proyeksi Pendapatan Investasi tahun 2024 adalah senilai Rp17,57 miliar atau turun sebesar 1,61% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp17,86 miliar, hal ini disebabkan oleh penurunan dana kelolaan investasi sebagai dampak dari belum digantikannya dana talangan atas pembayaran beban klaim yang menjadi kewajiban pihak Reasuransi.
- k. Proyeksi Pendapatan Subrogasi tahun 2024 adalah senilai Rp3,36 miliar atau naik sebesar 23,81% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp2,72 miliar.
- l. Proyeksi Beban Klaim tahun 2024 adalah senilai Rp81,73 miliar atau turun sebesar 0,68% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp81,18 miliar, penurunan ini didasarkan pada strategi bisnis Perseroan yang melakukan *risk sharing* dengan metode penjaminan bersama dan/atau penjaminan ulang.
- m. Proyeksi Beban Operasional tahun 2024 adalah senilai Rp5,38 miliar atau naik sebesar 50,23% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp3,58 miliar. Beban Operasional diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan target produksi, khususnya skim produktif dan target pendapatan subrogasi. Selain itu, peningkatan ini juga seiring dengan upaya Perseroan dalam rangka meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders, khususnya dengan mitra bisnis.
- n. Proyeksi Beban Regaransi/Asuransi Jiwa tahun 2024 adalah senilai Rp74,44 miliar atau naik sebesar 20,20% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp61,93 miliar.

Company's business strategy of carrying out risk sharing using joint guarantee and/or re-guarantee methods.

- m. The projected Operational Expenses in 2024 are IDR 5.38 billion or an increase of 50.23% compared to the 2023 Prognosis of IDR 3.58 billion. Operational expenses are projected to increase in line with increased production targets, especially productive schemes and subrogation income targets. Apart from that, this increase is also in line with the Company's efforts to improve good relations with stakeholders, especially with business partners.
- n. The projected for Re-Guarantee/Life Insurance Expenses in 2024 is IDR 74.44 billion or an increase of 20.20% compared to the 2023 prognosis of IDR 61.93 billion.
- o. The Projected HR Expenses in 2024 is IDR 30.81 billion or an increase of 39.16% compared to the 2023 Prognosis of IDR 22.14 billion. This growth is in line with projected adjustments to human resources, both for management and employees, and salary adjustments in line with adjustments to the Regency/City Minimum Wage (UMK) and Provincial Minimum Wage (UMP).
- p. The Projected for Administrative and General Expenses in 2024 is IDR 11.15 billion or an increase of 57.08% compared to the 2023 Prognosis of IDR 7.10 billion. This is influenced by the increase in the Company's operational activities.

- o. Proyeksi Beban SDM tahun 2024 adalah senilai Rp30,81 miliar atau naik sebesar 39,16% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp22,14 miliar. Pertumbuhan ini sejalan dengan adanya proyeksi penyesuaian SDM, baik Pengurus maupun Pegawai, dan penyesuaian gaji seiring dengan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- p. Proyeksi Beban Administrasi dan Umum tahun 2024 adalah senilai Rp11,15 miliar atau naik sebesar 57,08% dibandingkan Prognosa 2023 senilai Rp7,10 miliar. Hal ini dipengaruhi peningkatan aktivitas operasional Perseroan.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHICH ACHIEVE 5% (FIVE PER HUNDRED) OR MORE, WHICH COVERS TYPE AND NUMBER OF SHARE SHARE

No. No.	Nama Name	Kategori Kepemilikan Saham *) Category Ownership Share *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham Nominal Amount of Share Ownership	Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Share Ownership
1	Tidak Ada None	A	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		B	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		C	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		D	Nihil Nothing	Nihil Nothing

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
The guarantor institution concerned;
- B. Lembaga Penjamin lain;
Other Guarantee Institutions;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin; dan
Financial services companies other than Guarantee Institutions; and
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
Other companies domiciled inside or outside the country, including shares acquired through the stock exchange.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

DISCLOSURE OF FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BSS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, OTHER BSS MEMBERS, AND/OR SHAREHOLDERS OF PT JAMKRIDA JABAR

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

1. Financial relationships and family relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Yanti Rachmawati	Direksi Lainnya Other Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Agus Subrata	Direksi Lainnya Other Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

2. Financial relationships and family relationships between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya Other Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Dini Rosdini	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya Other Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

3. Financial relationships and family relationships of BSS members with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other BSS members, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Zaini Abdul Malik	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		DPS Lainnya Other BSS		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Khozin Abu Faqih	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		DPS Lainnya Other BSS		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Information:

The financial relationship is when a person receives income, financial assistance, or loans from members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, Guarantee Institution whose controlling shareholders are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, and/or the controlling shareholder of the Institution Guarantor.

Family relationship is having a family relationship up to the second degree, both vertical and horizontal, including in-laws, son-in-law, and in-laws, so what is meant by family includes biological/step/adopted parents, siblings/step/adopted siblings and their husbands or wives, biological children /step/adoptive, biological/step/adopted grandparents, biological/step/adopted grandchildren, siblings/step/adopted parents and their husbands or wives, in-laws, in-laws, in-laws, husbands/wives of biological/step/adopted children, husband or wife's grandfather or grandmother, husband/wife of biological/step/adopted grandchildren, and biological/step/adopted siblings of husband or wife and their husband or wife

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA OTHER IMPORTANT DISCLOSURES

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Resignation or dismissal of the external auditor

Tidak Ada None

2. Transaksi material dengan pihak terkait
Material transactions with related parties

Tidak Ada None

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
Ongoing and/or potential conflicts of interest

No. No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of Parties Having Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) <i>Transaction Value (Millions of Rupiah)</i>	Keterangan*) <i>Information*)</i>
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

- *) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku
Not in accordance with applicable systems and procedures

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan During 2022, there were no transactions containing conflicts of interest in the Company
--

4. Informasi material lain mengenai PT Jamkrida Jabar
Other material information regarding PT Jamkrida Jabar

Tidak ada None

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
Resignation or dismissal of the Independent Commissioner

Tidak ada None

6. Sertifikasi
Certification

No. <i>No.</i>	Materi Sertifikasi <i>Certification Material</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Peserta <i>Participant</i>
1	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG Certification (Certified Anti Fraud Governance)	1-3 Agustus 2023 August 1 - 3, 2023	GRC Management	Komisaris Independen Independent Commissioner
				Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee
2	Sertifikasi CPOf BNSP (Certified Procurement Officer) BNSP CPOf Certification (Certified Procurement Officer)	23-24 November 2023 November 23-24, 2023	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)	Kabag. SDM & Umum Head of HR & General Department
3	Sertifikasi CACP (Certification in Audit Committee Practices) CACP Certification (Certification in Audit Committee Practices)	04 Desember 2023 December 04, 2023	IKAI (Indonesian Institut of Audit Committee)	Anggota Komite Audit President Director
				Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Audit Committee

7. Tenaga kerja asing
Foreign workers

Selama tahun 2022, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.
During 2022, the Company does not employ foreign workers.

No. <i>No.</i>	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nomor Uji Kematangan & Kelayakan <i>Number of Fit and Proper Test</i>	KITAS <i>Limited Stay Permit Card</i>		IMTA <i>Permit to Use Foreign Workers</i>	
				Izin Kerja <i>Work Permit</i>	Masa Berlaku <i>Validity Period</i>	No. Izin <i>Permit</i>	Masa Berlaku <i>Validity Period</i>
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal
Total internal fraud

Selama tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.

During 2022, there were no internal fraud committed by the management, permanent employees or non-permanent employees of the Company.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun <i>Internal fraud within 1 (one) year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of cases committed by</i>		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS <i>Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Sharia Supervisory</i>	Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>	Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary Employees</i>
Total penyimpangan Total fraud	-	-	-
Telah diselesaikan Resolved	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal In the process of internal completion	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian No solution yet	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up through the legal process	-	-	-

9. Permasalahan hukum
Legal problems

Selama tahun 2023, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

During 2023, the Company will not have legal problems, both civil and criminal.

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Has obtained a decision that has permanent legal force a. b.	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata In the process of settlement in court and in alternative dispute resolution institutions for civil cases	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>
a.		
b.		
Total <i>Total</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

10. Etika bisnis Perusahaan
Company business ethics

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.

The business ethics that are used as a reference for the Company and all employees are contained in the PT Jamkrida Jabar Code of Conduct.



LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan Dana CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Dana CSR diambil dari keuntungan Perseroan yang disisihkan setiap tahunnya.

Berikut ini adalah penyaluran dana CSR PT Jamkrida Jabar pada periode tahun 2023:

Corporate Social Responsibility (CSR) is the Company's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of the environment and society.

As a form of the Company's concern and social responsibility to the environment and society, the Company routinely distributes CSR Funds to the right targets every year, be it to victims of natural disasters, orphan foundations, or other assistance. CSR funds are taken from the Company's profits set aside annually.

The following is the distribution of PT Jamkrida Jabar's CSR funds in the 2023 period:

No. No.	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
1	2023-01-03	Partisipasi Pembuatan <i>Leaflet</i> Mesjid Raya Al-Jabbar via PT Imaji Media Pustaka Participation in Making Leaflets for the Grand Mosque of Al-Jabbar via PT Imaji Media Pustaka	20,000,000
2	2023-01-18	Partisipasi Acara Perayaan Natal bersama IKNB via Asippindo Participation in Christmas Celebration Events with IKNB via Asippindo	5,000,000
3	2023-01-19	Partisipasi Kegiatan Renovasi Mesjid Al Muslimun Participation in Al Muslimun Mosque Renovation Activities	1,500,000
4	2023-01-31	Partisipasi Kegiatan Donor Darah oleh Tim Jabar Bergerak Participation in Blood Donation Activities by the Jabar Bergerak Team	2,000,000
5	2023-02-28	Partisipasi Kegiatan Forum Bhayangkara Indonesia Participation in Bhayangkara Indonesia Forum Activities	2,500,000
6	2023-02-28	Partisipasi Acara Turnamen Badminton Kapolsek Buah Batu Participation in Buah Batu Police Chief's Badminton Tournament Event	2,000,000
7	2023-03-09	Partisipasi Kegiatan Yayasan POTADS Participation in POTADS Foundation Activities	5,000,000
8	2023-03-09	Partisipasi Kegiatan Support Program JQR Goes to Campus JQR Participation in JQR Goes to Campus JQR Support Program Activities	5,000,000

No. No.	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
9	2023-03-27	Partisipasi Kegiatan Yayasan Lidzikri Participation in Lidzikri Foundation Activities	1,000,000
10	2023-03-27	Partisipasi Kegiatan Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM) Participation in Activities of the Intermedia Communication Forum Foundation (FORKAM)	1,000,000
11	2023-03-29	Partisipasi Kegiatan Pesantren Ramadhan DKM Baitur Ruhiah Participation in DKM Baitur Ruhiah Ramadhan Islamic Boarding School activities	1,500,000
12	2023-03-31	Partisipasi Kegiatan Buka Puasa Gratis Gift of Seven Pos Polisi Margahayu Raya Barat Participation in Iftar Activities Free Gifts from Seven West Margahayu Raya Police Posts	1,000,000
13	2023-04-05	Partisipasi Kegiatan Tunas Bangsa Indonesia Merdeka Participation in Shooting the Independent Indonesian Nation Activities	25,000,000
14	2023-04-11	Partisipasi Kegiatan Bazar Ramadhan dan Baksos Diskuk Jabar Participation in Ramadhan Bazaar and Social Activities of West Java Cooperatives and SME's Service	5,000,000
15	2023-04-13	Partisipasi Kegiatan Bantuan Paket Sembako untuk Jaring Pengaman Sosial Kab. Sukabumi Kepada Yayasan Wasilah Arrahman Participation in Basic Food Package Assistance Activities for District of Sukabumi Social Safety Nets to the Wasilah Arrahman Foundation	100,000,000
16	2023-04-13	Partisipasi Kegiatan Bantuan Paket Sembako untuk Jaring Pengaman Sosial Kab. Sukabumi Kepada Yayasan Sabadesa Participation in Basic Food Package Assistance Activities for District of Sukabumi Social Safety Nets to the Sabadesa Foundation	100,000,000
17	2023-04-14	Partisipasi Kegiatan BUBOS ke 7 Participation in the 7th BUBOS Activity	45,000,000
18	2023-04-14	Partisipasi Kegiatan Yayasan PC Salimah Participation in PC Salimah Foundation Activities	1,500,000
19	2023-04-14	Partisipasi Kegiatan BUBOS ke 7 Participation in the 7th BUBOS Activity	5,000,000
20	2023-04-14	Partisipasi Kegiatan Gerobak Ramadhan JQR Participation in JQR Gerobak Ramadhan Activities	5,000,000
21	2023-04-18	Partisipasi Kegiatan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPR INDONESIA) Participation in activities of the Central Leadership Council of the Independent Youth Non-Governmental Organization Caring for the Indonesian People (NGO PMPR INDONESIA)	25,000,000
22	2023-04-28	Partisipasi Kegiatan Pemberian THR RW 11 Sekejati Participation in RW 11 Sekejati THR Giving Activities	1,000,000
23	2023-04-28	Kegiatan Pemberian Takjil Ramadhan PT Jamkrida Jabar PT Jamkrida West Java Takjil Ramadhan Providing Activities	3,215,000
24	2023-04-28	Partisipasi Kegiatan Diskuk Provinsi Jawa Barat Participation in West Java Cooperatives and SME's Service Activities	8,100,000
25	2023-05-12	Partisipasi Kegiatan Musyawarah Kerja Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (Muskerda PPDI) Provinsi Jawa Barat Participation in Regional Work Conference Activities of the Indonesian Village Apparatus Association (Muskerda PPDI) West Java Province	10,000,000
26	2023-05-26	Partisipasi Kegiatan Program Jurnalis Sadar Resiko Bencana Jabar Quick Response (JQR)	5,000,000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

No. No.	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
		Participation in West Java Quick Response (JQR) Disaster Risk Awareness Journalist Program Activities	
27	2023-05-26	Partisipasi Kegiatan Pengurus Daerah Persatuan Anggota adan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PABPDSI) Kab. Tasikmalaya Participation in Regional Management Activities of Member Associations and Village Consultations throughout Indonesia (PABPDSI) Kab. Tasikmalaya	5,000,000
28	2023-06-27	Partisipasi Kegiatan Food Estate Koperasi Mandiri Jabar Parahyangan Participation in West Java Parahyangan Mandiri Cooperative Food Estate Activities	20,000,000
29	2023-06-27	Partisipasi Kegiatan Bantuan Hewan Qurban kepada Yayasan Cipta Mandala Participation in Sacrificial Animal Assistance Activities to the Cipta Mandala Foundation	50,000,000
30	2023-06-27	Partisipasi Kegiatan Yayasan Aksara Insan Madani Participation in Insan Madani Literacy Foundation Activities	20,000,000
31	2023-07-05	Partisipasi Kegiatan Bantuan Hewan Qurban kepada Yayasan Aksara Insan Madani Participation in Sacrificial Animal Assistance Activities to the Insan Madani Literacy Foundation	35,000,000
32	2023-07-07	Partisipasi Kegiatan Hari Koperasi ke 76 Tahun 2023 Tingkat Jawa Barat Participation in activities for the 76th Cooperative Day 2023 at West Java level	10,000,000
33	2023-07-07	Partisipasi Kegiatan Serial Diskusi Lingkar Studi Informasi & Demokrasi (eLSID) Participation in Information and Democracy Study Circle (eLSID) Discussion Series Activities	5,000,000
34	2023-07-07	Partisipasi Kegiatan Dekranasda Provinsi Jawa Barat Participation in West Java Province Dekranasda Activities	20,000,000
35	2023-07-07	Partisipasi Kegiatan Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesi (APPSBI) Participation in activities of the Indonesian Cultural Pencak Silat College Association (APPSBI)	20,000,000
36	2023-07-12	Partisipasi Kegiatan Kirab Muharram 1445H Yayasan Asih Putera Participation in the 1445H Muharram Carnival Activities of the Asih Putera Foundation	1,500,000
37	2023-07-13	Partisipasi Kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana TK Al Ghifari Khoerun Walad Participation in Al Ghifari Khoerun Walad Kindergarten Facilities Improvement Activities	1,500,000
38	2023-07-17	Partisipasi Kegiatan Kompetisi Usia Dini Piala Gubernur Jawa Barat Tahun 2023 Participation in the 2023 West Java Governor's Cup Early Age Competition Activities	20,000,000
39	2023-07-28	Partisipasi Kegiatan Teduh Festival (PT Kita Mau Maju) Participation in Shady Festival Activities (PT Kita Mau Maju)	20,000,000
40	2023-07-31	Partisipasi Kegiatan HUT RI Ke 78 Tahun 2023 Arshadika 2023 Participation in activities for the 78th Indonesian Independence Day 2023 Arshadika 2023	2,000,000
41	2023-08-10	Partisipasi Kegiatan Renovasi Mesjid Jami Al Mukaromah Cilengkrang City View Participation in the renovation activities of the Jami Al Mukaromah Cilengkrang City View Mosque	20,000,000
42	2023-08-11	Partisipasi Kegiatan HUT RI ke 78 Panitia Mutiara RT 04 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu Bandung	2,000,000

No. No.	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
		Participation in Activities for the 78th Independence Day of the Republic of Indonesia Mutiara Committee RT 04 Sukamenak Village, Margahayu District Bandung	
43	2023-08-14	Partisipasi Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 78 Permata Bumi Kel Cisaranten Kulon Participation in activities for the 78th Independence Day of the Republic of Indonesia Permata Bumi Cisaranten Kulon Village	2,500,000
44	2023-08-14	Partisipasi Kegiatan Pertandingan Panahan untuk Pemula, Pelajar, Mahasiswa dan Pemula Umum dengan tema Merah Putih Archery Competition 2023 Participation in Archery Competition Activities for Beginners, Students, College Students and General Beginners with the theme Red and White Archery Competition 2023	1,500,000
45	2023-08-14	Partisipasi Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 78 Pondok Rahayu Cijagra Participation in Pondok Rahayu Cijagra's 78th Indonesian Independence Day Activities	1,500,000
46	2023-08-16	Partisipasi Kegiatan HUT RI ke 78 Tahun 2023 Kelurahan Sekejati Participation in activities for the 78th Independence Day of the Republic of Indonesia in 2023, Sekejati Village	1,500,000
47	2023-08-24	Partisipasi Kegiatan HUT RI Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Participation in Indonesian Independence Day Activities in Padasuka Village, North Sumedang District	1,500,000
48	2023-08-25	Partisipasi Kegiatan Turnamen Tennis Meja Sekejati Cup Participation in Sekejati Cup Table Tennis Tournament Activities	1,500,000
49	2023-08-28	Partisipasi Kegiatan Para Penyandang Disabilitas via Yayasan Dangiing Sumbi Jatining Asih Participation in Activities for Persons with Disabilities through the Dangiing Sumbi Jatining Asih Foundation	2,000,000
50	2023-08-28	Partisipasi Kegiatan Merdeka (Meriahkan dengan Kebajikan) via LAZGDI Participation in Merdeka Activities (Enlivening with Kindness) through LAZGDI	2,000,000
51	2023-08-28	Partisipasi Kegiatan Turnamen Olahraga dan Seni DPD Perbarindo Jabar Participation in West Java DPD Perbarindo Sports and Arts Tournament Activities	5,000,000
52	2023-09-01	Partisipasi Kegiatan Hari Jadi Jawa Barat ke 78 dengan Tema West Java Festival Tahun 2023 Participation in West Java's 78th Anniversary Activities with the 2023 West Java Festival Theme	50,000,000
53	2023-09-05	Partisipasi Kegiatan Bazar Murah di Kota dan Kabupaten Sukabumi via CV Duta Nusantara Agro Participation in Cheap Bazaar Activities in Sukabumi City and Regency through CV Duta Nusantara Agro	20,000,000
54	2023-09-11	Partisipasi Kegiatan Seminar Pendidikan Anti Korupsi via Aliansi Aktivis Jabar Participation in Anti-Corruption Education Seminar Activities through the West Java Activist Alliance	20,000,000
55	2023-09-11	Partisipasi Kegiatan Silatda dan Bakti Sosial (PABPDSI) Participation in Silatda and Social Service Activities (PABPDSI)	20,000,000
56	2023-09-26	Partisipasi Kegiatan Pemberian Santunan kepada Warga yang Membutuhkan via Jamkrida Banten Participation in activities providing compensation to residents in need through Jamkrida Banten	500,000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

No. No.	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
57	2023-09-29	Partisipasi Kegiatan Piala Kapolretasbes Bandung Cup Dalam Rangka HUT Polri Ke 77 Tahun 2023 Participation in the Kapolrestabes Bandung Cup Activities for the 77th National Police Anniversary in 2023	1,500,000
58	2023-10-05	Partisipasi Kegiatan HUT ke 7 Jamkrida Sulsel Participation in activities for the 7th anniversary of Jamkrida, Sulsel	500,000
59	2023-10-23	Partisipasi Kegiatan Pengembangan Mesjid Al Munawwaroh Participation in Al Munawwaroh Mosque Development Activities	2,000,000
60	2023-10-26	Partisipasi Kegiatan Hari Sumpah Pemuda (Pengurus Pusat GPM-GIBAS) Participation in Youth Pledge Day Activities (GPM-GIBAS Central Management)	1,500,000
61	2023-10-31	Partisipasi Kegiatan Pembangunan Baru dan Rehab Asrama Putra & Putri Pondok Pesantren Al Furqon Participation in New Development and Rehabilitation Activities for Boys & Girls Dormitory at Al Furqon Islamic Boarding School	100,000,000
62	2023-10-31	Partisipasi Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia Participation in the activities of the Independent Youth Non-Governmental Organization Caring for the Indonesian People	35,000,000
63	2023-10-31	Kegiatan Pemberian Santunan Anak Yatim Dalam Rangka Milad Ke 11 PT Jamkrida Jabar Activities to Provide Compensation for Orphans in the Commemoration of the 11th Anniversary of PT Jamkrida Jabar	11,000,000
64	2023-10-31	Partisipasi Kegiatan Yayasan Al Muhajirin Amal Lingkungan Insan Kamil Participation in activities of the Al Muhajirin Amal Lingkungan Insan Kamil Foundation	25,000,000
65	2023-11-13	Partisipasi Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Mushola Al-Musiqo Participation in Al-Musiqo Mosque Construction and Repair Activities	5,000,000
66	2023-11-15	Partisipasi Kegiatan Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Participation in Al-Muhajirin Mosque Construction Activities	1,500,000
67	2023-11-16	Partisipasi Kegiatan Acara Charity dari Xpander Mitsubishi Owner Club Pengda Jabar Participation in Charity Event Activities from the Xpander Mitsubishi Owner Club West Java Regional Management	1,500,000
68	2023-11-29	Pembelian Paket Sembako untuk Kegiatan CSR PT Jamkrida Jabar via PT Agro Jabar Purchase of basic food packages for PT Jamkrida Jabar's CSR activities through PT Agro Jabar	75,000,000
69	2023-12-14	Partisipasi Kegiatan FGD dari Lembaga Swadaya Masyarakat Participation in FGD Activities from Non-Governmental Organizations	10,000,000
70	2023-12-14	Partisipasi Kegiatan Bimtek Nasional Lembaga Berantas Korupsi Indonesia Participation in National Technical Guidance Activities of the Indonesian Corruption Eradication Institute	5,000,000
71	2023-12-14	Pembelian Paket Sembako Untuk Kegiatan CSR PT Jamkrida Jabar Purchase of basic food packages for PT Jamkrida West Java's CSR activities	73,000,000
72	2023-12-21	Pembelian Paket Sembako untuk Kegiatan CSR PT Jamkrida Jabar via PT Agro Jabar	75,000,000

No. No.	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)
		Purchase of basic food packages for PT Jamkrida Jabar's CSR activities through PT Agro Jabar	
73	2023-12-29	Pembayaran Pengiriman Paket CSR PT Jamkrida Jabar via PT Agro Jabar Payment for PT Jamkrida Jabar CSR Package Delivery via PT Agro Jabar	1,000,000
Jumlah Total Total Amount			1,191,315,000

Adapun capaian dan pertumbuhan Realisasi Dana CSR Tahun 2023 terhadap Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The achievements and growth of the Realization of CSR Funds in 2023 against the 2023 Budget are as follows:

dalam rupiah
in rupiah

Realisasi 2022 2022 Realization	Anggaran 2023 (*) 2023 Budget (*)	Realisasi 2023 2023 Realization	Capaian Achievement	Pertumbuhan Growth
494,361,750	2,163,750,723	1,191,315,000	55.06%	140.98%

*) Total Anggaran CSR Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.163.750.723,- bersumber dari:

1. Sisa Anggaran CSR sebagai bagian dari penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp308.545.679,-;
2. Anggaran CSR sebagai bagian dari penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp1.520.205.044,-; dan
3. Anggaran CSR dalam RKAP 2023 sebesar Rp335.000.000,-.

*) Total CSR Budget for 2023 is IDR 2.163.750.723,- sourced from:

1. The remaining CSR Budget as part of the use of the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year is IDR 308.545.679, -;
2. The CSR budget as part of the use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year is IDR 1.520.205.044,-; and
3. The CSR budget in the BP 2023 is IDR 335.000.000,-.



LAPORAN AUDIT

AUDIT REPORT

Laporan Audit

Audit Report



2023

AUDIT REPORT

PT JAMKRIDA JABAR

Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

terdaftar dan diawasi oleh:



PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



PT JAMKRIDA JABAR

Jl. Soekarno Hatta No. 592 Bandung
Telp. (022) 7504777, 7506307
Fax. (022) 7563333
E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023
PT Jamkrida Jabar

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agus Subrata
Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Saya bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar.
4. Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00129/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 bertanggal 5 April 2024 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana diungkapkan pada catatan 31 atas laporan keuangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 29 April 2024

Direktur Keuangan



Agus Subrata

**PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

	Halaman
Daftar Isi	
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas	5 - 6
Laporan Arus Kas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 45



No. 00146/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jamkrida Jabar**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00129/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 tanggal 5 April 2024 dengan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selanjutnya, PT Jamkrida Jabar telah menerbitkan Kembali laporan keuangannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 31 atas laporan keuangan. Oleh karena itu, kami memberikan Laporan Auditor Independen ini atas laporan keuangan yang telah diterbitkan Kembali.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Perusahaan atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN


Aryo Wibisono, S.E., CPA.
Register Akuntan Publik No. 1290
Jakarta, 29 April 2024



PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	228,216,186,996	191,272,939,970
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(539,940,790)	(878,876,521)
Surat Berharga	2d, 3a,	148,439,700,262	104,755,202,100
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	3b, 9	-	(20,857,963)
Piutang Re/Cogaranasi	2e, 5	134,870,098,529	83,488,976,172
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian *)		(5,668,419,657)	(5,226,122,382)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	22,145,008,231	10,024,534,884
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(213,564,612)	(213,564,612)
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	30,791,300,342	24,040,498,999
Piutang Lain-lain	7	223,791,924	672,904,055
Properti Investasi	10	2,626,966,820	2,495,100,000
Jumlah Aset Lancar		560,891,128,045	410,410,734,702
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	99,244,910,341	75,614,738,918
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	12,694,101,439	13,361,215,515
Aset Pajak Tangguhan *)	2o, 20d	3,642,069,959	5,840,943,395
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 12	1,218,008,076	272,278,302
Jumlah Aset Tidak Lancar		116,799,089,815	95,089,176,130
JUMLAH ASET		677,690,217,860	505,499,910,832

*) Diterbitkan kembali (Catatan 31)

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak *)	2o, 20a	3,832,869,855	1,251,733,981
Utang Re/Cogaransi	13	96,310,581,851	38,197,826,176
Beban yang Masih Harus Dibayar	14	4,763,233,569	4,158,532,265
Penampungan Sementara	15	24,573,600,342	17,652,888,693
Utang Lancar Lainnya	16	12,499,979	33,244,767
Pendapatan Diterima Dimuka	17a	75,910,274,920	43,996,687,948
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		205,403,060,516	105,290,913,830
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	17b	130,228,896,506	121,573,407,802
Cadangan Klaim	2r, 18	19,265,173,914	15,062,088,847
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2n, 19	2,422,327,831	1,975,738,918
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		151,916,398,251	138,611,235,567
JUMLAH LIABILITAS		357,319,458,767	243,902,149,397
EKUITAS			
Modal			
Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 26.028 dan 20.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.			
	21	260,280,000,000	203,200,000,000
Cadangan Umum	21	50,195,706,826	44,817,709,373
Saldo Laba *)	21	10,155,229,276	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga			
Keuntungan pengukuran kembali	2d, 3a, 3b, 8	22,848,546	(1,340,127,293)
Selisih Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n, 19	(283,025,555)	(281,871,080)
JUMLAH EKUITAS		320,370,759,093	261,597,761,435
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		677,690,217,860	505,499,910,832

*) Diterbitkan kembali (Catatan 31)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa			
Penjaminan / Kafalah	2p, 22	236,550,793,972	166,944,974,562
Beban Akuisisi	2p, 22	(35,601,464,854)	(24,228,085,654)
Restitusi IJP	2p, 22	(5,621,008,681)	(4,527,790,716)
Manajemen Fee	2p, 22	27,629,983,137	19,458,760,127
Beban Regaransi	2p, 22	(108,944,082,531)	(73,770,797,298)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		114,014,221,043	83,877,061,021
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 24	(82,747,342,207)	(51,328,319,347)
Pemulihan (Pembentukan)			
Cadangan Klaim	2t, 24	(2,366,662,130)	625,615,439
JUMLAH BEBAN KLAIM		(85,114,004,337)	(50,702,703,908)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		28,900,216,706	33,174,357,113
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 2j, 23	18,302,697,376	13,279,739,311
PENDAPATAN SUBROGASI	2r, 26	2,519,757,010	1,924,565,589
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA *)	27	(2,008,009,143)	1,584,177,254
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	25	(6,143,007,020)	(3,936,842,775)
Beban Sumber Daya Manusia	25	(21,445,494,559)	(18,966,640,491)
Beban Administrasi dan Umum	25	(6,870,798,074)	(6,574,672,623)
JUMLAH BEBAN USAHA		(34,459,299,653)	(29,478,155,889)
LABA SEBELUM PAJAK *)		13,255,362,296	20,484,683,378
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini *)	2o, 21b	(1,282,950,680)	-
Manfaat Pajak Tangguhan *)	2o, 21d	(1,817,182,340)	(5,282,632,943)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(3,100,133,020)	(5,282,632,943)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN *)		10,155,229,276	15,202,050,435

*) Diterbitkan kembali (Catatan 31)

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
LAIN YANG TIDAK AKAN			
DIREKLASIFIKASIKAN			
KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Kerja		(1,480,096)	(292,634,239)
Pajak Tangguhan Terkait			
Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Kerja		325,621	108,161,373
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
LAIN YANG AKAN			
DIREKLASIFIKASIKAN			
KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian)			
Aset Keuangan yang Diukur			
Pada Nilai Wajar Melalui			
Penghasilan Komprehensif		1,744,992,557	(1,251,542,797)
Pajak Tangguhan Terkait			
Keuntungan (Kerugian)			
Aset Keuangan yang Diukur			
Pada Nilai Wajar Melalui			
Penghasilan Komprehensif		(382,016,717)	480,629,827
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		1,361,821,365	(955,385,836)
TAHUN BERJALAN		11,517,050,641	14,246,664,599
LABA KOMPREHENSIF			

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Laporan Audit Audit Report

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi setelah pajak tanggungan	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah pajak tanggungan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021		153,200,000,000	40,139,066,131	(569,214,323)	(97,399,214)	10,585,165,700	203,257,619,294
Modal Disetor	21	50,000,000,000	-	-	-	-	50,000,000,000
Cadangan Umum	21	-	4,678,643,242	-	-	(4,678,643,242)	-
Pembagian Dividen	21	-	-	-	-	(3,059,112,887)	(3,059,112,887)
Bonus dan Tantiem	21	-	-	-	-	(2,318,151,286)	(2,318,151,286)
CSR	21	-	-	-	-	(529,258,285)	(529,258,285)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	15,202,050,435	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	-	-	(770,912,970)	-	-	(770,912,970)
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tanggungan	2n, 19	-	-	-	(184,472,886)	-	(184,472,886)
Saldo per 31 Desember 2022		203,200,000,000	44,817,709,373	(1,340,127,293)	(281,871,080)	15,202,050,435	261,597,761,435

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

- 5 -

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi setelah pajak tanggungan	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah pajak tanggungan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022		203,200,000,000	44,817,709,373	(1,340,127,293)	(281,871,080)	15,202,050,435	261,597,761,435
Modal Disetor	21	57,080,000,000	-	-	-	-	57,080,000,000
Cadangan Umum	21	-	5,377,997,453	-	-	(5,377,997,453)	-
Pembagian Dividen	21	-	-	-	-	(4,803,847,938)	(4,803,847,938)
Bonus dan Tantiem	21	-	-	-	-	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)
CSR	21	-	-	-	-	(1,520,205,044)	(1,520,205,044)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	10,155,229,276	10,155,229,276
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	-	-	1,362,975,840	-	-	1,362,975,840
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tanggungan	2n, 19	-	-	-	(1,154,475)	-	(1,154,475)
Saldo per 31 Desember 2023		260,280,000,000	50,195,706,826	22,848,546	(283,025,555)	10,155,229,276	320,370,759,093

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

- 6 -

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		252,098,067,208	203,239,717,653
Pembayaran Klaim		(82,747,342,207)	(54,548,979,790)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pihak Ketiga		(154,548,031,841)	(141,826,351,637)
Pembayaran Pajak		1,298,185,194	160,712,833
Pendapatan Subrogasi		2,519,757,010	1,924,565,589
Utang Lancar Lainnya		(20,744,788)	33,000,023
Pendapatan lain-lain		(1,925,505,566)	(2,696,977,905)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		16,674,385,010	6,285,686,766
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan		(41,939,505,605)	(27,075,457,086)
Penerimaan Investasi		16,659,133,968	12,815,205,648
Properti Investasi		(131,866,820)	-
Pengeluaran Untuk Pengadaan Aset Tetap		(331,246,780)	(1,011,639,275)
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap		-	-
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain lain		(1,243,599,765)	(42,667,452)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		(26,987,085,002)	(15,314,558,165)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Tambahan Modal Disetor		57,080,000,000	50,000,000,000
Pembagian Dividen		(4,803,847,938)	(3,059,112,887)
Pembagian Bonus dan Tantiem		(3,500,000,000)	(2,318,151,286)
CSR		(1,520,205,044)	(529,258,285)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		47,255,947,018	44,093,477,542
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		36,943,247,026	35,064,606,143
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		191,272,939,970	156,208,333,827
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		228,216,186,996	191,272,939,970
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas		12,939,812	117,532,482
Giro Bank		21,512,508,266	14,968,904,855
Deposito		206,690,738,918	176,186,502,633
Jumlah Kas dan Setara Kas		228,216,186,996	191,272,939,970

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT Jamkrida Jabar, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT.Jamkrida Jabar.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanaan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Usaha (Lanjutan)

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (Makfuul 'Anhu) dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah Batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No.02 pada tanggal 10 Oktober 2023, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai

	2023	2022
Direksi		
Direktur Utama :	-	Yanti Rachmawati
Direktur Keuangan :	Agus Subrata	Yanti Rachmawati *
Direktur Operasional :	Taufiek Dharviandi	Agus Subrata
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama :	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Independen :	-	Dini Rosdini
Dewan Pengawas Syariah		
Ketua :	Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA	Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota :	Khozin Abu Faqih, Lc.	Khozin Abu Faqih, Lc.

* Pada tahun 2022 Ny. Yanti Rachmawati menjabat sebagai Direktur Utama merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan

Sesuai Akta Penyertaan Keputusan Para pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.02 Tanggal 10 Oktober 2023 menyetujui pengunduran diri Ny. Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama periode 2022-2027 dan Plt. Direktur Keuangan Perusahaan.

Setelah mundurnya Ny. Yanti Rachmawati sebagai Direktur Utama, Perusahaan belum menetapkan pengganti sehingga posisi Direktur Utama tidak ada yang menempati.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

d. Susunan Pengurus (Lanjutan)

Taufiek Dharviandi baru efektif menjabat sebagai Direktur Operasional pada Februari 2024 setelah melakukan fit and proper test dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu Ny. Dini Rosdini selesai masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada November 2023.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny. Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 74 tanggal 13 September 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Tuan Agus Subrata Direktur Operasional untuk periode 2021-2026.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 tanggal 29 November 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Muhammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris Utama untuk periode 2021-2026.

Sesuai Akta Penyertaan Keputusan Para pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.11 Tanggal 05 April 2022 memutuskan dan menyetujui Ny. Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama periode 2022-2027

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan PSAK baru yang signifikan adalah PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Dampak dari penerapan PSAK baru tersebut dijelaskan di bawah ini.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan model baru kerugian ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan lainnya.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 71 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Penyesuaian PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan, Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan."
- Amandemen PSAK 16: "Aset tetap"
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

(i) Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch"*).

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perusahaan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vi) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(vii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- Instrumen keuangan lainnya yang risikonya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang pada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan).
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang re/cogaransi.

Pengakuan piutang re/cogaransi dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarante*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban akuisisi dibayar di muka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah.

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun). Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari empat tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi u periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

k. Aset Lain-Lain

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11/2020 tanggal 02 November 2020 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

n. Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dimana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui sejak Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu
Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, umumnya Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Perusahaan saat Perusahaan melaksanakan kewajibannya tersebut.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu
Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi (Lanjutan)

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

r. Cadangan Klaim

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Perusahaan telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan. Cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

Estimasi klaim atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai piutang penjamin ulang dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan netto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
 - Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Beban Klaim

Beban klaim setelah dikurangi bagian penjamin ulang, dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Pertimbangan (Lanjutan)

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 19 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Piutang Regaransi

Cadangan klaim dan Piutang Regaransi diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasian yang dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta probabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas	12,939,812	117,532,482
Giro Bank		
Bank Umum	14,217,979,225	7,425,404,257
Bank BPR Syariah	2,956,505,378	2,138,374,089
Bank BPR	3,040,922,157	3,470,608,215
Bank Umum Syariah	1,297,101,506	1,934,518,294
Jumlah Giro Bank	21,512,508,266	14,968,904,856
Deposito		
Bank Umum	123,975,738,918	97,221,502,633
Bank BPR Syariah	26,000,000,000	26,750,000,000
Bank Umum Syariah	40,350,000,000	35,050,000,000
Bank BPR	16,365,000,000	17,165,000,000
Jumlah Deposito	206,690,738,918	176,186,502,633
Jumlah Kas dan Setara Kas	228,216,186,996	191,272,939,971
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(539,940,790)	(878,876,521)
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	227,676,246,206	190,394,063,450

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2023 di beberapa bank di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 9,50% p.a dan per 31 Desember 2022 mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 11,00% p.a.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	878,876,521	4,405,112,016
Pemulihan Tahun Berjalan	(338,935,731)	(3,526,235,495)
Saldo Akhir	539,940,790	878,876,521

5. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Re/Cogaranasi	123,709,188,934	74,164,489,516
Piutang Estimasi	11,160,909,595	9,324,486,656
Jumlah Piutang Re/Cogaranasi	134,870,098,529	83,488,976,172
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(5,668,419,657)	(5,226,122,382)
Jumlah Piutang Re/Cogaranasi - Bersih	129,201,678,872	78,262,853,790

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	5,226,122,382	4,560,598,252
Pemulihan Tahun Berjalan	—	665,524,130
Penyisihan Tahun Berjalan	442,297,276	—
Saldo Akhir	5,668,419,657	5,226,122,382

Piutang Re/Cogaranasi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE), PT Jamkrida Banten dan PT Igna Asia Broker and Insurance (IGNA).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang estimasi atas Re/Cogaranasi masing-masing sebesar Rp11.160.909.595 dan Rp9.324.486.657 (Lihat catatan 18).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan <i>Management Fee</i>	20,029,851,774	8,444,160,459
Pendapatan Bunga Investasi	2,115,156,457	1,580,374,425
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	22,145,008,231	10,024,534,884
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(213,564,612)	(213,564,612)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bersih	21,931,443,619	9,810,970,272

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaranasi (*management fee*).

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	213,564,612	852,506,852
Pemulihan Tahun Berjalan	—	(638,942,240)
Penyisihan Tahun Berjalan	—	—
Saldo Akhir	213,564,612	213,564,612

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian merupakan cadangan atas pendapatan *management fee*

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Karyawan	176,503,912	666,139,746
Piutang Lainnya	47,288,012	6,764,309
Jumlah Piutang Lain-lain	223,791,924	672,904,055

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

a. Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
IJP Re/Cogaranasi	15,690,522,720	18,354,472,145
Biaya Akuisisi	11,200,931,416	5,036,098,677
Beban Klaim Ditangguhkan	3,198,204,350	—
Beban Operasional Dibayar Dimuka	434,328,967	519,509,842
Uang Muka	267,312,889	130,418,335
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	30,791,300,342	24,040,498,999

Beban klaim ditangguhkan merupakan klaim yang masih dalam proses pemeriksaan atas penjaminan bersama dengan PT Jamkrida Jakarta.

b. Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
IJP Re/Cogaranasi	77,981,060,149	54,118,007,551
Biaya Akuisisi	21,263,850,192	21,496,731,367
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	99,244,910,341	75,614,738,918

Beban operasional dibayar dimuka dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaranasi, Biaya Akuisisi diamortisasi sesuai dengan pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan pola risiko.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA (LANJUTAN)

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

9. SURAT BERHARGA

Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2023	31 Desember 2022
FR 72	8.25%	15/05/2036	—	22,000,000,000	34,000,000,000
FR 68	8.38%	15/03/2034	—	17,000,000,000	24,000,000,000
FR 76	7.38%	15/05/2048	—	20,500,000,000	9,000,000,000
FR 80	7.50%	15/06/2035	—	-	7,000,000,000
PBS 012	8.60%	15/04/2034	—	7,000,000,000	7,000,000,000
FR 92	7.13%	15/06/2042	—	-	3,000,000,000
FR 89	6.88%	15/05/2051	—	5,000,000,000	5,000,000,000
FR 79	8.38%	15/04/2039	—	4,000,000,000	—
PBS 15	8.00%	15/07/2047	—	7,000,000,000	—
PBS 025	8.38%	15/05/2033	—	2,000,000,000	2,000,000,000
PBS 5	6.75%	15/04/2043	—	5,000,000,000	—
FR 67	8.75%	15/02/2044	—	5,000,000,000	—
PT PP THP I 2020	9.90%	27/02/2023	idA	—	1,000,000,000
Harga Perolehan				94,500,000,000	92,000,000,000
Amortisasi Nilai Premium (Diskonto)				9,751,419,357	8,452,099,375
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga				26,880,643	(1,718,111,915)
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif				104,278,300,000	98,733,987,460
Reksadana					
RD Bahana Obligasi Ganesha Kelas I				15,000,000,000	-
Reksadana MNC Dana SBN				5,000,000,000	-
Reksadana Insight Money				8,000,000,000	-
Reksadana Insight Syariah				3,000,000,000	-
Harga Perolehan				31,000,000,000	-
Selisih Nilai Wajar Reksadana				93,464,156	-
Jumlah Reksadana				31,093,464,156	-

Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Hutama Karya	8.07%	06/06/2027	idAAA	6,000,000,000	6,000,000,000
FR 70	8.38%	15/03/2024		7,000,000,000	-
Harga Perolehan				13,000,000,000	6,000,000,000
Premium Obligasi				67,936,106	21,214,640
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi				13,067,936,106	6,021,214,640
Jumlah Aset Keuangan				148,439,700,262	104,755,202,100
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian				-	(20,857,963)
Jumlah Aset Keuangan - Bersih				148,439,700,262	104,734,344,137

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERHARGA (LANJUTAN)

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan obligasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	20,857,963	136,839,191
Pemulihan Tahun Berjalan	(20,857,963)	(115,981,228)
Penyisihan Tahun Berjalan	--	--
Saldo Akhir	--	20,857,963

10. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	2,495,100,000	2,495,100,000
Penambahan	--	--
Keuntungan atas perubahan nilai wajar	131,866,820	--
Saldo Akhir	2,626,966,820	2,495,100,000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

Aset-aset tersebut telah dilakukan penilaian ulang oleh penilai independen pada tanggal 13 Maret 2023 dengan laporan yang diterbitkan oleh KJPP Patuh Ansori Rahman & Rekan No. 00001/2.0174-02/PI/09/0580/1/III/2023 dengan nilai sebesar Rp2.626.966.820.

11. ASET TETAP

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	3,930,909,854	344,132,764	--	4,275,042,618
Kendaraan	4,205,575,000	--	--	4,205,575,000
Gedung	7,527,996,226	--	--	7,527,996,226
Tanah	3,463,500,000	--	--	3,463,500,000
Jumlah	19,127,981,080	344,132,764	--	19,472,113,844
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(2,440,544,865)	(449,326,470)	--	(2,889,871,335)
Kendaraan	(2,120,515,938)	(386,267,125)	--	(2,506,783,063)
Gedung	(1,205,704,762)	(175,653,245)	--	(1,381,358,007)
Jumlah	(5,766,765,565)	(1,011,246,840)	--	(6,778,012,405)
Nilai buku	13,361,215,515			12,694,101,439

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	2,919,270,578	1,011,639,276	—	3,930,909,854
Kendaraan	4,205,575,000	—	—	4,205,575,000
Gedung	7,528,000,029	—	3,803	7,527,996,226
Tanah	3,463,500,000	—	—	3,463,500,000
Jumlah	18,116,345,607	1,011,639,276	3,803	19,127,981,080
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(2,122,570,530)	(317,974,335)	—	(2,440,544,865)
Kendaraan	(1,716,769,251)	(403,746,687)	—	(2,120,515,938)
Gedung	(1,030,051,553)	(175,653,209)	—	(1,205,704,762)
Jumlah	(4,869,391,334)	(897,374,231)	—	(5,766,765,565)
Nilai buku	13,246,954,273			13,361,215,515

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp 18.259.210.350 pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

12. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<i>Software</i>	1,425,197,003	1,076,474,755
Aset Dalam Penyelesaian	691,880,000	—
Aset Lainnya	82,200,000	46,200,000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	2,199,277,003	1,122,674,755
<i>Akumulasi Amortisasi Software</i>	(947,931,427)	(823,858,953)
<i>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</i>	(33,337,500)	(26,537,500)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(981,268,927)	(850,396,453)
Nilai Buku Aset Lain-lain	1,218,008,076	272,278,302

Software merupakan lisensi perangkat lunak komputer dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

Aset Dalam Penyelesaian Merupakan Aset yang masih dalam proses tahap pengerjaan dan belum siap digunakan,serta dimaksudkan untuk digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Jamkrida Jabar pada tahun 2023 memiliki sejumlah aset dalam proses terkait dengan pembuatan aplikasi ataupun upgrading aplikasi untuk menunjang kegiatan usahanya. Pengerjaan tersebut akan selesai paling lambat pada 21 Desember 2024.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

13. UTANG RE/COGARANSI

Utang Re/Cogaranasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Regaransi:		
PT Igna Asia Reinsurance Broker & Consultant (IGNA)	2,721,951,143	37,001,290,686
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	89,747,425,285	1,196,535,490
PT Pialang Asuransi Dekai Indonesia	3,841,205,423	-
Jumlah Utang Re/Cogaranasi	96,310,581,851	38,197,826,176

Utang kepada PT Jamkrida Jakarta PT Igna Asia Reinsurance Broker & Consultant (IGNA) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Biaya Pegawai Yang Masih Harus dibayar	3,731,766,069	3,950,503,029
Beban Umum yang masih harus dibayar	549,118,218	44,822,218
Cadangan CSR	435,935,725	107,045,679
Biaya Komisi Agen	46,413,557	56,161,339
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	4,763,233,569	4,158,532,265

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, bonus dan tantiem, uang lembur karyawan serta biaya komisi agen bulan Desember 2023 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

15. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penampungan IJP Bank Umum	18,455,625,416	12,951,830,607
Penampungan IJP Bank Syariah	4,217,301,720	901,305,060
Penampungan IJP Bank BPR	1,646,316,707	1,315,663,011
Jumlah Penampungan Sementara IJP	24,319,243,843	15,168,798,678
Penampungan Sementara Subrogasi	254,356,499	2,484,090,015
Jumlah Penampungan Sementara	24,573,600,342	17,652,888,693

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, serta kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaranasi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

16. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Lancar Lain-lain	12,499,978	33,000,000
Hutang Karyawan	-	244,768
Jumlah Utang Lancar Lainnya	12,499,978	33,244,768

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	61,980,253,714	40,025,992,551
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	13,930,021,206	3,970,695,397
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	75,910,274,920	43,996,687,948

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	129,770,352,419	117,456,394,815
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	458,544,087	4,117,012,987
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	130,228,896,506	121,573,407,802

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

18. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	15,062,088,847	18,908,364,728
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	4,203,085,067	(3,846,275,881)
Jumlah Cadangan Klaim	19,265,173,914	15,062,088,847

Piutang Estimasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	9,324,486,657	12,545,147,099
Pembentukan (Pemulihan) Piutang Estimasi	1,836,422,938	(3,220,660,443)
Jumlah Piutang Estimasi	11,160,909,595	9,324,486,657

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan, cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1,979,584,799	1,627,086,117
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	442,743,032	348,652,801
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2,422,327,831	1,975,738,918

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan Pasca Kerja

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1,979,584,799	1,627,086,117
Nilai wajar Aset	—	—
Status Pendanaan	1,979,584,799	1,627,086,117
Jumlah lain yang diakui	—	—
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1,979,584,799	1,627,086,117

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban awal periode	1,627,086,117	1,834,011,406
Penyesuaian metode atribusi	—	(177,337,070)
Beban yang diakui di laba/rugi	351,018,586	9,338,316
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	1,480,096	21,751,465
Penyesuaian atas koreksi	—	—
Pembayaran Manfaat	—	(60,678,000)
Kewajiban akhir periode	1,979,584,799	1,627,086,117

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Biaya jasa kini	243,631,528	246,749,158
Biaya bunga	107,387,058	119,497,236
Biaya jasa lalu vested	—	(356,908,078)
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	351,018,586	9,338,316

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuaria

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang belum diakui pada awal periode akuntansi	—	—
(Keuntungan) kerugian aktuarial - kewajiban	1,480,096	21,751,465
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui	1,480,096	21,751,465

e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari kewajiban	1,480,096	21,751,465
Perubahan lainnya	—	—
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	1,480,096	21,751,465

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	361,373,180	339,621,715
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	1,480,096	21,751,465
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	362,853,276	361,373,180

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	442,743,032	348,652,801
Nilai wajar Aset	—	—
Status Pendanaan	442,743,032	348,652,801
Jumlah lain yang diakui	—	—
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	442,743,032	348,652,801

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Kewajiban awal periode	348,652,801	292,341,214
Beban yang diakui di laba/rugi	94,090,231	56,311,587
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	-	-
Kewajiban akhir periode	<u>442,743,032</u>	<u>348,652,801</u>

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Biaya jasa kini	85,493,607	87,905,074
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(20,090,079)	(19,921,715)
Biaya Jasa lalu	-	(32,421,805)
Perubahan Asumsi Keuangan	5,344,735	-
Biaya bunga	23,341,968	20,750,033
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	<u>94,090,231</u>	<u>56,311,587</u>

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2023 dan 2022 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tingkat Diskonto :	6.75%	7.25%
Kenaikan Gaji per Tahun :	6%	6%
Tabel Mortalita :	100% TMI4	100% TMI4
Tingkat Cacat :	5% TMI4	5% TMI4
Usia Pensiun Normal :	58 tahun	58 tahun

20. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
PPh Pasal 21	2,257,911,075	1,037,987,551
PPh Pasal 29	1,282,950,680	-
PPh 4 ayat 2	244,501,713	182,153,305
PPh Pasal 23	47,506,387	31,593,125
Jumlah Utang Pajak	<u>3,832,869,855</u>	<u>1,251,733,981</u>

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2023 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Laba Sebelum Pajak	13,255,362,296	20,484,683,378
Perbedaan Temporer:		
Beban Imbalan Pasca Kerja	445,108,817	(172,365,158)
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(203,848,636)	(124,847,989)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	82,503,581	(3,615,634,833)
Kenaikan Cadangan Klaim	2,366,662,130	(625,615,439)
Jumlah	2,690,425,893	(4,538,463,419)
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	3,456,519,012	1,846,679,177
Beban Perjalanan Dinas	1,909,304,563	1,132,983,490
Tunjangan Kesehatan	396,874,907	356,209,879
Beban Umum Lainnya	703,345,544	1,024,626,132
Beban Representasi	1,200,647,479	833,199,851
Tunjangan Baju	154,302,240	177,132,331
Beban Diklat Karyawan	209,170,096	381,365,331
Pemeliharaan Kendaraan	280,118,555	182,012,954
Jumlah	8,310,282,396	5,934,209,145
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(8,282,580,604)	(5,841,200,691)
Pendapatan Obligasi	(7,593,317,395)	(6,751,354,652)
Pendapatan Jasa Giro	(359,532,580)	(368,684,226)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(1,772,511,927)	(308,528,841)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	1,680,708,641	1,147,065,206
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	778,088,536	671,010,581
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	72,453,965	73,832,926
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	175,850,000	15,462,768
Jumlah	(15,300,841,364)	(11,362,396,930)
Jumlah koreksi fiskal	(4,300,133,076)	(9,966,651,203)
Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan	8,955,229,220	10,518,032,175
Laba (Rugi) Fiskal (dibulatkan)	8,955,229,000	10,518,032,000
Kerugian Pajak Tahun 2018	—	(7,826,711,000)
Kerugian Pajak Tahun 2019	(5,030,548,000)	(5,030,548,000)
Kerugian Pajak Tahun 2020	(10,541,446,000)	(10,541,446,000)
Laba Pajak Tahun 2021	1,930,327,000	1,930,327,000
Laba Pajak Tahun 2022	10,518,032,000	10,518,032,000
Rugi fiskal yang dapat Dikompensasi	(3,123,635,000)	(10,950,346,000)
Laba fiskal setelah dikurangi akumulasi rugi fiskal	5,831,594,000	—
Beban pajak penghasilan (tarif 22%)	1,282,950,680	—

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

d. Pajak Tangguhan

31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(37,725,030)	--	(44,846,700)	(82,571,730)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	1,262,272,480		520,665,669	1,782,938,149
Beban Imbal Pasca Kerja	434,662,563	325,621	97,923,940	532,912,124
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	377,984,621	(382,016,717)	--	(4,032,096)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1,394,672,725	18,150,788	--	1,412,823,513
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	2,409,076,036	--	(2,409,076,036)	-
Jumlah	5,840,943,396	(363,540,308)	(1,835,333,128)	3,642,069,959

31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(10,258,472)	--	(27,466,558)	(37,725,030)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	1,399,907,877	--	(137,635,397)	1,262,272,480
Beban Imbal Pasca Kerja	467,797,576	108,161,373	(141,296,386)	434,662,563
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	(102,645,206)	480,629,827	--	377,984,621
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2,182,415,988	--	(787,743,263)	1,394,672,725
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6,597,567,376	--	(4,188,491,340)	2,409,076,036
Jumlah	10,534,785,140	588,791,199	(5,282,632,943)	5,840,943,396

21. EKUITAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyertaan Modal	260,280,000,000	203,200,000,000
Cadangan Umum	50,195,706,826	44,817,709,373
Saldo Laba	10,155,229,277	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	22,848,546	(1,340,127,293)
Selisih pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	(283,025,555)	(281,871,080)
Jumlah Ekuitas	320,370,759,094	261,597,761,434

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan tiga tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. EKUITAS (LANJUTAN)

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap kedua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000.000.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ketiga Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap keempat pada tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1987/PM/LS/KEU dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp45.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap kelima pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/5/PM/LS/KEU dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 8.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap keenam pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02.00/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2022 dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000,- Komposisi modal ditempatkan dan disetor. PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 04 tertanggal 28 November 2023 PT Jamkrida Jabar telah menerima tambahan setoran modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 57.080.000.000 -.

2023				
Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	26,008	10,000,000	260,080,000,000	99.923%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.077%
Jumlah	26,028		260,280,000,000	100%

2022				
Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	20,300	10,000,000	203,000,000,000	99.90%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.10%
Jumlah	20,320	20,000,000	203,200,000,000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh notaris Yanti Yulianti, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2021 sebesar Rp 10.585.165.700, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 46,70%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2,50%, Dividen sebesar 28,90%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2019 sebesar Rp 3.907.910.588, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

22. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	236,550,793,972	166,944,974,562
Beban Akuisisi	(35,601,464,854)	(24,228,085,654)
Restitusi IJP	(5,621,008,681)	(4,527,790,716)
Management Fee	27,629,983,137	19,458,760,127
Beban Regaransi	(108,944,082,531)	(73,770,797,298)
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	114,014,221,043	83,877,061,020

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

23. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	7,405,490,254	7,094,514,779
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	6,832,974,682	4,505,038,408
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	2,561,468,335	308,528,841
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1,489,764,105	1,336,162,283
Pendapatan Sewa Properti	13,000,000	35,495,000
Jumlah Pendapatan Investasi	18,302,697,376	13,279,739,311

24. BEBAN KLAIM

Beban klaim pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Klaim	82,747,342,207	51,328,319,346
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	2,366,662,130	(625,615,439)
Jumlah Beban Klaim	85,114,004,337	50,702,703,907

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

25. BEBAN USAHA

Beban usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Sumber Daya Manusia	21,445,494,559	18,966,640,491
Beban Administrasi Kantor dan Umum	6,870,798,074	6,574,672,623
Beban Operasional	6,143,007,020	3,936,842,774
Jumlah Beban Usaha	34,459,299,653	29,478,155,888

Rincian Beban Operasional

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Promosi	3,457,694,062	1,905,905,025
Beban Perjalanan Dinas	1,909,304,563	1,132,983,490
Beban Kendaraan Dinas	601,328,640	563,535,088
Beban Penagihan Subrogasi	174,679,755	334,419,171
Jumlah Beban Operasional	6,143,007,020	3,936,842,774

Rincian Beban Sumber Daya Manusia

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gaji dan Tunjangan Karyawan	9,075,846,420	7,367,457,992
Beban Bonus dan Tantiem	3,130,795,000	3,329,249,042
Gaji dan Tunjangan Direksi	2,070,125,860	2,204,253,561
Beban PPH 21	2,726,550,902	2,116,245,274
Beban Insentif	1,108,167,534	1,911,528,413
Gaji dan Tunjangan Komisaris	973,674,576	929,194,012
Beban Purna Jabatan	632,936,250	693,210,000
Beban Pengembangan SDM	933,223,452	418,709,255
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	314,480,000	96,800,000
Pembentukan (Pemulihan) Beban Imbal Pasca Kerja	445,108,817	(111,687,158)
Tunjangan SDM Lainnya	34,585,748	11,680,100
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	21,445,494,559	18,966,640,491

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Umum	3,599,444,010	3,860,103,876
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset	1,011,246,839	897,374,231
Beban Pemeliharaan dan Asuransi Aset	796,440,767	880,375,516
Beban Administrasi	661,214,488	401,689,615
Beban Komunikasi dan Energi	612,778,450	425,726,690
Beban Amortisasi <i>Software</i> dan Aset Lainnya	130,872,474	80,379,542
Beban Sewa	43,491,845	15,949,922
Beban Pajak - Pajak	15,309,201	13,073,231
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	6,870,798,074	6,574,672,623

26. PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Subrogasi		
Pendapatan Subrogasi Penjaminan Bank	2,519,757,010	1,924,565,589
Jumlah Pendapatan Subrogasi	2,519,757,010	1,924,565,589

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	359,641,821	368,684,226
Pendapatan Lainnya	425,189,360	12,213,635
Jumlah Pendapatan Lain-lain	784,831,182	380,897,860
Beban Lain-lain		
- Pemulihan (Kenaikan) CKKE Aset Keuangan	(82,503,581)	3,615,634,833
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	(175,850,000)	(15,462,768)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	(72,471,856)	(73,832,926)
- Beban Bukan Usaha Lainnya	(782,094)	(504,983,959)
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	(778,088,536)	(671,010,581)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	(1,683,144,257)	(1,147,065,206)
Jumlah Beban Lain-lain	(2,792,840,325)	1,203,279,394
Jumlah (Pendapatan) Beban Lain-lain	(2,008,009,143)	1,584,177,254

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

29. INFORMASI TAMBAHAN

a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

29. INFORMASI TAMBAHAN

c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2023 dan 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	32,029,271,503	13,667,037,289
Beban Akuisisi	(4,810,589,848)	(2,200,316,022)
Manajemen Fee	2,545,504,142	1,309,580,285
Restitusi IJP	(235,843,550)	(225,084,466)
Beban Re/Cogaransi	(8,560,484,759)	(4,947,691,570)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	20,967,857,488	7,603,525,516
Beban Klaim		
Beban Klaim	(12,407,600,370)	(2,879,319,534)
Pemulihan Cadangan Klaim	235,255,865	(265,356,089)
Jumlah Beban Klaim	(12,172,344,505)	(3,144,675,623)
Pendapatan Penjaminan Bersih	8,795,512,983	4,458,849,892
Pendapatan Investasi	2,359,666,976	2,229,270,534
Pendapatan Subrogasi	768,688,225	221,891,632
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(12,266,062)	(950,931,148)
Beban Usaha	(4,087,865,346)	(1,794,786,230)
Laba Sebelum Pajak	7,823,736,776	4,164,294,681
Beban Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	--	101,835,505
Laba Bersih Unit Syariah	7,823,736,776	4,266,130,186
Penghasilan Komprehensif Lain Yang Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi		
Keuntungan (Kerugian)		
Aset Keuangan yang	186,581,495	(477,206,571)
Pajak Tangguhan Terkait		
Pengukuran Keuntungan	--	203,482,323
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	186,581,495	(273,724,248)
Laba Komprehensif	8,010,318,271	3,992,405,938

30. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Progran Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumer.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

30. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (LANJUTAN)

- PT Estetika Jasatama perihal Program Penjaminan Kredit Konsumer.
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Kalibesar Raya Utama perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Kredit Konsumtif Pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (*Cash Loans & Non Cash Loan*)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Igna Asia Reinsurance Brokers perihal Jasa Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) Untuk Produk Penjaminan PT Jamkrida Jabar sebagai pengganti dari PT Best One Asia Reinsurance Brokers. Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Portofolio Penjaminan Ulang PT Jamkrida Jabar, tanggal 11 Mei 2023 dan 10 maret 2023 peralihan portofolio tersebut sudah diketahui oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) dan PT Reasuransi Syariah Indonesia sebagai pihak penjaminan ulang.

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Penerbitan kembali laporan keuangan tanggal 5 April 2024.

Sebelumnya perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2023 pada tanggal 5 April 2024, dan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut pada 29 April 2024 dengan perubahan dan tambahan pengungkapan atas catatan laporan keuangan sebagai berikut:

	Sebelum Penerbitan Kembali	Penyesuaian	Setelah Penerbitan Kembali
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Piutang re/cogaranasi			
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(8,061,519,867)	2,393,100,210	(5,668,419,657)
Aset Pajak Tangguhan	4,607,477,661	(965,407,702)	3,642,069,959
Liabilitas			
Utang pajak	2,549,919,175	1,282,950,680	3,832,869,855
Ekuitas			
Saldo Laba	10,010,487,450	144,741,826	10,155,229,276

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

	Sebelum Penerbitan Kembali /Before	Penyesuaian	Setelah Penerbitan Kembali
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan (Beban) Lainnya	(4,401,109,352)	2,393,100,209	(2,008,009,143)
Laba sebelum pajak	10,862,262,087	2,393,100,209	13,255,362,296
Beban Pajak Kini	-	(1,282,950,680)	(1,282,950,680)
Beban Pajak Tangguhan	(851,774,637)	(965,407,703)	(1,817,182,340)
Laba setelah pajak	10,010,487,450	144,741,826	10,155,229,276

32. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 29 April 2024.



PT JAMKRIDA JABAR

Jl. Soekarno Hatta No. 592 Bandung
Telp. (022) 7504777, 7506307
Fax. (022) 7563333
E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

PERNYATAAN MANAJEMEN

Bandung, 29 April 2024

Kepada :

**Aryo Wibisono SE., CPA
KAP Hertanto, Grace, Karunawan
Palma Tower, Lantai 18
JI RA. Kartini II – S Kav. 6 Sektor 2
Jakarta Selatan**

Dengan hormat,

Surat representasi ini kami buat berkaitan dengan audit atas laporan keuangan PT Jamkrida Jabar untuk periode Dua Belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, kami telah meminta keterangan yang kami pandang perlu untuk memperoleh informasi yang tepat bagi kami:

A. Laporan Keuangan

- Kami telah memenuhi tanggung jawab kami, seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat perikatan audit bertanggal 01 Februari 2024, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; khususnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka tersebut.
- Asumsi-asumsi signifikan yang kami gunakan dalam membuat estimasi akuntansi, termasuk yang kami ukur pada nilai wajar, adalah masuk akal. (SA 540)
- Hubungan dan transaksi pihak berelasi telah kami pertanggung jawabkan dan kami sajikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (SA 550)
- Semua peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang untuk itu Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan, telah kami sesuaikan atau kami ungkapkan. (SA 560)
- Dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material, baik secara individual maupun dalam agregasi, terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Daftar kesalahan penyajian tidak dikoreksi kami lampirkan pada surat representasi ini. (SA 450)

SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

- Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00129/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 bertanggal 5 April 2024 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana diungkapkan pada catatan 31 atas laporan keuangan.

Perusahaan melakukan perbaikan pencatatan transaksi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas Piutang Re secara akumulatif sebesar Rp5.668.419.657 (PSAK 71), hal tersebut berdasarkan penilaian manajemen bahwa estimasi arus kas masa depan dari piutang tersebut dapat terealisasi di tahun 2025, pajak kini (PSAK 46) sebesar Rp 1.282.950.680, dan pajak tangguhan (PSAK 46) sebesar Rp 3.642.069.959. Terbentuknya pajak kini untuk laporan keuangan tahun 2023 didasarkan pada undang-undang harmonisasi perpajakan nomor 7 tahun 2021, Bab III tentang pajak penghasilan pasal 6 (2) yang menjelaskan bahwa, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan paragraf 14 yang menjelaskan bahwa, jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas mengakui manfaat tersebut sebagai aset pada periode di mana rugi pajak terjadi karena terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Ketidaksesuaian terkait pajak disebabkan karena rugi fiskal tahun 2018 masih menjadi faktor pengurang pajak tahun 2023, yang seharusnya sudah tidak dapat diperhitungkan sebagai kompensasi pajak penghasilan.

Menindaklanjuti pembahasan tersebut, Perusahaan menerbitkan kembali Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengajukan permintaan kepada KAP HGK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan yang diterbitkan kembali dan melakukan penerbitan kembali (*Reissue*) Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2023.

Adapun Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum dan sesudah diterbitkan kembali oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	Sebelum penerbitan Kembali	Penyesuaian	Setelah penerbitan Kembali
Perubahan Penyajian			
Pendapatan (Beban) Lainnya	(4.401.109.352)	2.393.100.210	(2.008.009.143)
Laba Sebelum Pajak	10.862.262.087	2.393.100.210	13.255.362.297
Beban Pajak Kini	-	(1.282.950.680)	(1.282.950.680)
Beban Pajak Tangguhan	(851.774.637)	(965.407.703)	(1.817.182.340)
Laba Bersih	10.010.487.450	144.741.827	10.155.229.277

A

Adapun Laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah diterbitkan kembali oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	Sebelum penerbitan Kembali	Penyesuaian	Setelah penerbitan Kembali
<u>Perubahan Penyajian</u>			
<u>Aset</u>			
CKKE Piutang Re	(8.061.519.867)	2.393.100.210	(5.668.419.657)
Aset Pajak Tangguhan	4.607.477.661	(965.407.702)	3.462.069.959
<u>Liabilitas</u>			
Utang Pajak	2.549.919.175	1.282.950.680	3.832.869.855
<u>Ekuitas</u>			
Saldo Laba	10.010.487.450	144.741.827	10.155.229.277

- Kebijakan akuntansi yang kami terapkan adalah tepat.
- Semua rencana atau maksud yang mungkin secara material mengubah nilai tercatat atau klasifikasi aset dan liabilitas dalam laporan keuangan telah dicatat atau diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Semua kewajiban, baik aktual dan kontijen, telah dicatat dan, bila sesuai, diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Perusahaan memiliki kontrol atas semua aset diungkapkan dalam laporan keuangan dan, jika perlu, semua hak gadai atau sitaan atas aset tersebut telah diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Kami telah memenuhi aspek perjanjian kontrak yang bisa berdampak material terhadap laporan keuangan dan kasus ketidakpatuhan telah diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Kami telah mereviu semua aset keuangan dan kewajiban keuangan yang ada dan telah dikelompokkan dengan benar sebagai salah satu dari:
 - Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,
 - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
 - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau
 - Liabilitas keuangan lainnya

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dicatat secara tepat sebesar nilai wajarnya, nilai yang diamortisasi berdasarkan klasifikasinya. (PSAK 71, "Instrumen Keuangan")
- Kami telah menelaah nilai residu, umur manfaat, penurunan nilai dan penyusutan aset tetap dan kami berkeyakinan bahwa nilai residu, umur manfaat, penurunan nilai dan penyusutan aset tetap adalah konsisten dengan ekspektasi pola manfaat dari aset tersebut.

A

- Kami percaya bahwa asumsi dan metode yang digunakan untuk mengukur cadangan hak karyawan dan biaya jasa karyawan untuk tujuan akuntansi keuangan adalah tepat sesuai dengan kondisi Perusahaan saat ini. Perhitungan dan pengungkapan penyisihan imbalan kerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (PSAK 24)
- Kami menyatakan pendapatan diakui apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal.

B. Informasi yang Disediakan

- Kami telah memberikan kepada Saudara:
 - Akses ke seluruh informasi yang kami sadari relevan dalam penyusunan laporan keuangan seperti berbagai catatan, dokumentasi, dan hal-hal lainnya;
 - Informasi tambahan yang Saudara minta kepada kami untuk tujuan audit; dan
 - Akses yang tidak terbatas kepada individu dalam entitas yang Saudara butuhkan untuk memperoleh bukti audit.
- Semua transaksi telah dicatat dalam catatan akuntansi dan tercermin dalam laporan keuangan.
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara hasil penilaian kami atas risiko bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. (SA 240)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara seluruh informasi yang berhubungan dengan kecurangan atau kecurangan yang diduga terjadi, yang kami ketahui dan berdampak terhadap Perusahaan serta melibatkan:
 - Manajemen
 - Karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal; atau
 - Pihak lainnya, dimana kecurangan dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. (SA 240)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara seluruh informasi yang berhubungan dengan tuduhan kecurangan atau kecurangan yang diduga terjadi, yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan yang dikomunikasikan oleh karyawan, mantan karyawan, analis, pembuat peraturan, atau lainnya. (SA 240)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara seluruh hal yang kami ketahui tentang ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dampaknya harus dipertimbangkan pada saat menyusun laporan keuangan. (SA 250)
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara identitas pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan dan semua hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang kami ketahui. (SA 550)

a

- Kami telah mengkomunikasikan kepada Saudara semua kekurangan dalam pengendalian internal yang manajemen ketahui.
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara:
 - Sejarah Perusahaan masa lalu dalam melaksanakan maksud yang telah dinyatakannya;
 - Alasan Perusahaan untuk memilih tindakan tertentu;
 - Kemampuan Perusahaan untuk mengejar tindakan tertentu;
 - Adanya atau kurangnya informasi lain yang mungkin telah diperoleh selama audit yang mungkin tidak konsisten dengan pertimbangan atau maksud Manajemen.
- Kami telah melakukan verifikasi data dan dokumen. Seluruh data yang diberikan Perusahaan adalah sah dan valid.
- Tidak ada penunjukan auditor lain untuk perikatan audit tahun buku yang sama.

Demikian surat representasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 29 April 2024
PERSEROAN TERBATAS (PT)
JAMKRIDA JABAR



Agus Subrata
Direktur Keuangan



PT JAMKRIDA JABAR ANNUAL REPORT 2023

 +62-22-7504777, +62-22-7500380

 info@jamkrida-jabar.co.id

 www.jamkrida-jabar.co.id

 [jamkridajabar](https://www.instagram.com/jamkridajabar)

 [Jamkrida Jabar](https://www.facebook.com/JamkridaJabar)

 Jl. Soekarno Hatta No. 592 Kota Bandung